

**Diaspora Communities and Religious Moderation in a Secular System:
State, Religion, and Indonesian Society in Australia**

Oleh

- | | | |
|---|------------|------------------|
| 1. Sukron Ma'mun, Ph.D
NIP. 197904162009121001
UIN Salatiga | Lektor | Ketua Peneliti |
| 2. Prof. Dr. Wardah Nuroniyah, S.H.I., M.S.I
NIP. 198111052011122006
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta | Guru Besar | Anggota Peneliti |
| 3. Akhmad Shodikin, S.Ag. M.HI
NIP 197311042007101001
IAIN Syekh Nurjati Cirebon | Lektor | Anggota Peneliti |

**Kementerian Agama Republik Indonesia
2024**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur alhamdulillah ke hadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai hasil dari penelitian yang bertujuan untuk menggali dan memahami praktik moderasi beragama di kalangan diaspora Indonesia di Australia.

Dalam proses penyusunan penelitian ini, kami mendapatkan dukungan, arahan, dan bantuan dari berbagai pihak yang sangat berperan dalam kelancaran penelitian ini. Oleh karena itu, pertama-tama kami ingin menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kementerian Agama Republik Indonesia, khususnya Litapdimas, yang telah memberikan dukungan penuh berupa pendanaan dan kebijakan yang memungkinkan penelitian ini dapat terlaksana dengan baik. Tanpa adanya dukungan tersebut, penelitian ini tentu tidak akan berjalan secara optimal dan menghasilkan laporan yang komprehensif.

Ucapan terima kasih selanjutnya kami tujukan kepada Prof. Arskal Salim selaku Peneliti Ahli, yang dengan penuh dedikasi telah memberikan arahan, masukan, serta kontribusi akademik yang sangat berharga. Pemikiran dan pandangan beliau telah membantu memperkaya kerangka analisis dan mendalami berbagai aspek penting dalam penelitian ini. Kami juga menyampaikan rasa terima kasih kepada PCI NU Australia-New Zealand, khususnya Bapak Wendi Wijarwadi, yang telah menyediakan data, informasi, serta dukungan selama proses penelitian berlangsung. Dukungan tersebut menjadi salah satu pilar utama dalam menggali praktik moderasi beragama di komunitas diaspora Indonesia.

Selain itu, apresiasi kami sampaikan kepada PCI Muhammadiyah Australia, terutama Dr. Izza Rahman, yang dengan antusias berbagi pandangan dan pengalaman terkait implementasi moderasi beragama di komunitas Muhammadiyah. Tidak lupa kepada Iqro Foundation melalui Pembinaanya, Bapak Hasran Addahroni, atas kontribusinya dalam memberikan informasi berharga mengenai peran Iqro dalam menjaga nilai-nilai keagamaan dan kebudayaan diaspora Indonesia. Terakhir, penghargaan kami berikan kepada Indonesian Diaspora Network (IDN) Australia, khususnya Bapak Salut Muhidin selaku Koordinator, yang telah memberikan pandangan mendalam mengenai peran IDN sebagai jembatan antar komunitas diaspora Indonesia dan masyarakat Australia. Bantuan serta partisipasi semua pihak tersebut menjadi fondasi kuat bagi penyelesaian penelitian ini, dan kami sangat menghargai segala bentuk dukungan yang telah diberikan.

Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penelitian dan penyusunan laporan ini.

Kami menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan sebagai upaya untuk penyempurnaan di masa yang akan datang. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat, baik secara akademis maupun praktis, khususnya dalam memahami dan memperkuat praktik moderasi beragama di kalangan diaspora Indonesia.

Demikian, semoga penelitian ini menjadi kontribusi kecil yang bermanfaat bagi pengembangan keilmuan dan kehidupan sosial yang harmonis.

Jakarta, 10 Desember 2024

Tim Peneliti

Daftar Isi

<i>KATA PENGANTAR</i>	1
<i>Daftar Isi</i>	3
<i>Daftar Gambar</i>	5
BAB I PENDAHULUAN	6
A. Latar Belakang	6
B. Pertanyaan penelitian	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Pentingnya Penelitian.....	9
E. Tinjauan Literatur	9
F. Kerangka teoritis	11
G. Metode penelitian.....	13
H. Pembahasan.....	15
BAB II MODERASI BERAGAMA DAN PERUBAHAN SOSIAL DALAM KOMUNITAS DIASPORA	16
A. Konsep Moderasi Beragama	16
B. Diaspora dan Identitas Budaya	25
1) <i>Pengertian Diaspora</i>	25
2) <i>Pembentukan Identitas dan Komunitas dalam Diaspora</i>	28
C. Diaspora dan Teori Perubahan Sosial	32
BAB III AUSTRALIA DAN ORGANISASI KEAGAMAAN DIASPORA INDONESIA	35
A. Australia dan Keragaman Masyarakat	36
B. Organisasi-Organisasi Masyarakat Indonesia Diaspora di Australia.....	45
C. Transformasi dan Penguatan Kesadaran Beragama Kelompok Diaspora	53
BAB IV KEBIJAKAN PUBLIK DI AUSTRALIA	60
A. Kebijakan Lembaga Publik dan Pendidikan	60
1) <i>Kebijakan Sosial dan Multikulturalisme Australia</i>	61
2) <i>Kebijakan Publik Australia tentang Agama</i>	64
3) <i>Kebijakan Australia tentang Pendidikan</i>	67
B. <i>Australian Value</i> : Prinsip Moderat dalam Keragaman	70
C. Koeksistensi Harmonis dalam Masyarakat Plural dan Multikultural	75
BAB V REKONSEPTUALISASI MODERASI BERAGAMA PADA MASYARAKAT DIASPORA DI SYDNEY	78
A. Adaptif, Kompromi, dan Membangun Karakter Moderat Indonesia.....	78
B. Adaptif dan Membangun Karakter ‘Islam’ yang Kokoh	84

C. Adaptif dan Melebur dalam Moderasi Barat	90
D. Rekonseptualisasi Moderasi Beragama	95
<i>BAB VI KESIMPULAN</i>	<i>100</i>
A. Kesimpulan	100
B. Rekomendasi.....	102
<i>DAFTAR PUSTAKA</i>	<i>104</i>

Daftar Gambar

Figure 1. Komposisi Etnik di Australia	39
Figure 2. Populasi Kelahiran Berdasar Asal Negara	40
Figure 3. Populasi Berdasar Negara Bagian.....	42
Figure 4. Afiliasi Agama Masyarakat Australia	43

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Distribusi demografi warga negara Indonesia di Australia sangat beragam dan luas, meliputi para profesional, buruh, dan pelajar. Menurut data Kedutaan Besar Indonesia di Australia, per tahun 2022, sekitar 96.000 warga negara Indonesia bermukim di berbagai daerah, termasuk Melbourne, Sydney, Queensland, Darwin, dan Perth. Komunitas-komunitas ini tidak hanya besar jumlahnya tetapi juga memiliki struktur organisasi yang berperan penting dalam melestarikan hubungan budaya dan agama sekaligus membantu integrasi dalam masyarakat Australia (Kedutaan Besar Indonesia di Australia, 2022).

Diaspora Indonesia di Australia diwakili oleh berbagai organisasi yang berfungsi sebagai titik fokus bagi komunitas tersebut. Menurut catatan dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Perth, terdapat tidak kurang dari 76 organisasi komunitas Indonesia di Australia. Kelompok-kelompok ini melayani berbagai kebutuhan diaspora Indonesia, menyediakan platform untuk berjejaring, pengembangan profesional, pertukaran budaya, dan dukungan komunitas. Selain itu, organisasi berbasis agama memberikan kontribusi yang signifikan terhadap jalinan komunal, seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Indonesian Catholic Youth Organisation (ICYO), International Full Gospel Fellowship Gereja Injil Seutuh Internasional (IFGF GISI), Reformed Evangelical Church of Indonesia, dan masih banyak lagi (Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Perth, 2024).

Kehadiran organisasi-organisasi ini mencerminkan tingkat kesadaran dan organisasi yang terpuji dalam diaspora Indonesia di Australia. Kelompok-kelompok ini memainkan peran penting dalam melestarikan praktik-praktik budaya dan agama Indonesia sekaligus membantu para anggotanya dalam menghadapi kompleksitas kehidupan dalam masyarakat Barat. Keberagaman organisasi-organisasi ini mencerminkan keberagaman yang lebih luas dalam masyarakat Indonesia itu sendiri, yang mencakup berbagai latar belakang profesi, budaya, dan agama. Namun, keberagaman ini juga menghadirkan tantangan-tantangan unik, khususnya dalam hal bagaimana komunitas-komunitas ini berasimilasi dalam lingkungan masyarakat Barat yang beraneka ragam dan multifaset.

Aspek menarik dari demografi ini adalah sejauh mana diaspora Indonesia di Australia dapat merangkul keberagaman yang ada dalam komunitas Australia. Hal ini khususnya relevan dalam konteks masyarakat Barat, di mana isu-isu integrasi, multikulturalisme, dan kohesi sosial

sering kali menjadi yang terdepan dalam wacana publik. Kemampuan diaspora Indonesia untuk berintegrasi sambil mempertahankan identitas budaya dan agama mereka merupakan bidang penyelidikan yang penting. Selain itu, penting untuk menyelidiki apakah komunitas Indonesia di Australia secara tidak sengaja berkontribusi pada eksaserbasi intoleransi dalam konteks yang beragam ini. Pertanyaan ini khususnya relevan mengingat iklim global saat ini, di mana isu-isu identitas, kepemilikan, dan toleransi beragama semakin terpolarisasi.

Dimensi penting dari penyelidikan ini melibatkan aspek keagamaan, terutama mengingat karakter Indonesia yang didominasi Islam. Indonesia adalah negara dengan mayoritas Muslim terbesar di dunia, dan masuk akal bahwa diaspora Indonesia di Australia juga mencakup sejumlah besar Muslim. Persinggungan antara diaspora Indonesia dan isu-isu Islam ini memunculkan berbagai masalah yang relevan, terutama Islamofobia, yang menyebar luas di masyarakat Barat, termasuk Australia. Islamofobia terwujud dalam berbagai bentuk, mulai dari diskriminasi dan prasangka hingga bentuk-bentuk pengucilan dan marginalisasi yang lebih halus (Saeed, 2007; Weeks, 2020; Vertovec, 2002).

Lintasan evolusi Islam di Australia sangatlah kompleks dan memiliki banyak sisi. Awalnya, keberadaan Islam di Australia sering kali diabaikan atau dipinggirkan. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, Islam telah menarik perhatian yang signifikan karena tantangan rumit yang ditimbulkan oleh heterogenitas komunitas Muslim di Australia, yang mencakup beragam kelompok budaya, etnis, dan sektarian (Modood, 2005; Poole, 2002). Keragaman ini telah menyebabkan berbagai interpretasi tentang Islam dan praktik yang berbeda, yang terkadang dapat menyebabkan ketegangan di dalam komunitas dan antara komunitas dan masyarakat yang lebih luas. Kekhawatiran publik terhadap Islam juga tercermin dalam representasi media, yang sering kali menggambarkan Muslim dalam pandangan negatif, yang berkontribusi pada iklim Islamofobia secara keseluruhan (Saeed, 2007).

Keberadaan diaspora Indonesia, khususnya organisasi keagamaannya, menghadirkan subjek yang menarik untuk diteliti terkait peran mereka dalam membina kehidupan beragama yang moderat dan toleran dalam komunitas diaspora. Mengingat sifat lanskap keagamaan yang beragam dan dinamis di Australia, muncul pertanyaan kritis; apakah komunitas agama dalam diaspora Indonesia berkontribusi pada terwujudnya lingkungan keagamaan yang moderat dan toleran di antara para penganutnya dan masyarakat yang lebih luas? Pertanyaan ini memperoleh signifikansi khusus dalam konteks Australia, di mana persepsi negatif tidak hanya ditujukan kepada Islam tetapi juga meluas ke kelompok agama lain, seperti komunitas Yahudi, sebagaimana dibuktikan oleh persistensi anti-semitisme (Hargreaves & Staetsky, 2020).

Pengamatan ini menunjukkan bahwa lembaga publik di Australia, termasuk lembaga pendidikan seperti sekolah dan universitas, serta badan pemerintah, memainkan peran penting dalam mempromosikan moderasi beragama. Lembaga publik sering kali menjadi garda terdepan dalam upaya untuk membina kohesi sosial dan toleransi beragama, dengan berupaya melawan stereotip negatif dan mempromosikan masyarakat yang lebih inklusif. Peran ini sangat penting mengingat tantangan yang ditimbulkan oleh lanskap agama Australia yang semakin beragam.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, penelitian ini berupaya untuk mengkaji tidak hanya proses dan manifestasi moderasi beragama yang dibina oleh organisasi keagamaan diaspora Indonesia, tetapi juga yang dilaksanakan oleh lembaga publik di Australia. Fokus ganda ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang dinamika moderasi beragama dalam diaspora Indonesia dan implikasinya yang lebih luas terhadap kohesi sosial dan toleransi beragama di Australia.

B. Pertanyaan penelitian

Fokus penyelidikan ini adalah untuk menjawab tiga pertanyaan mendasar.

1. Sejauh mana organisasi keagamaan diaspora Indonesia yang beroperasi di Australia berkontribusi terhadap pengembangan pemahaman, kesadaran, dan pola perilaku dalam komunitas diaspora?
2. Dengan cara apa lembaga publik Australia secara sengaja mendorong komunitas diaspora untuk mengembangkan rasa moderasi?
3. Apa tanggapan yang diperoleh dari organisasi keagamaan diaspora di Australia terhadap beragam program yang diprakarsai oleh lembaga publik?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dipandu oleh tiga tujuan utama. Pertama, penelitian ini bertujuan untuk menguji sejauh mana organisasi keagamaan diaspora Indonesia yang beroperasi di Australia berkontribusi dalam menumbuhkan pemahaman, kesadaran, dan praktik moderasi beragama dalam kerangka sekuler. Lebih jauh, penelitian ini berupaya untuk menilai penerapan model moderasi beragama yang telah dikembangkan dalam masyarakat multikultural dan pluralistik. Upaya ini dirancang untuk mengevaluasi secara kritis realisasi praktis nilai-nilai dan model moderasi beragama sebagaimana diartikulasikan oleh masing-masing organisasi. Kedua, penelitian ini berupaya untuk menganalisis sejauh mana lembaga publik di Australia secara

aktif mempromosikan pengembangan sikap moderat dalam komunitas diaspora. Analisis ini akan mencakup pemeriksaan kebijakan publik yang diterapkan di universitas, sekolah, atau lembaga pemerintah. Terakhir, penelitian ini bertujuan untuk meneliti tanggapan organisasi keagamaan diaspora terhadap program-program yang diprakarsai oleh lembaga publik di Australia.

D. Pentingnya Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis, sehingga memperkuat sifat penting dari pengejarannya di sepanjang tiga dimensi utama. Pertama-tama, dari perspektif teoritis, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kontribusi organisasi keagamaan yang terkait dengan kelompok diaspora dan lembaga publik di Australia terhadap pembinaan pemahaman yang lebih baik, kesadaran yang lebih tinggi, dan disposisi perilaku yang bernuansa mengenai moderasi agama. Lensa sosiologis akan diterapkan untuk meneliti proses transformatif yang melekat dalam mengubah pemahaman, kesadaran, dan perilaku kelompok diaspora. Kedua, penelitian ini bercita-cita untuk menggambarkan konseptualisasi baru tentang moderasi agama, khususnya yang berkaitan dengan kelompok diaspora Indonesia yang tinggal di negara-negara Barat di mana isu-isu agama, khususnya yang terkait dengan Islam, lazim. Ketiga, secara praktis, penelitian ini berupaya untuk memberikan model komprehensif yang ditujukan untuk Kementerian Agama, memfasilitasi penyempurnaan konseptualisasi moderasi agama, yang secara khusus disesuaikan untuk kelompok diaspora yang berada di luar negeri. Patut dicatat bahwa meskipun fokus utamanya adalah pada konteks internasional, penerapan prospektif model ini tidak dihalangi oleh perkembangan dalam negeri.

E. Tinjauan Literatur

Pengaruh hegemoni budaya terhadap individu, khususnya dalam komunitas diaspora, telah menjadi subjek perhatian ilmiah yang semakin meningkat, khususnya dalam konteks pertemuan lintas budaya dalam lingkungan pendidikan tinggi (Ward, Bochner, & Furnham, 2001). Tren internasionalisasi dan globalisasi yang berkembang pesat dalam pendidikan tinggi telah memperkuat fokus pada pengalaman komunitas diaspora, seperti diaspora Indonesia, yang berkontribusi secara signifikan terhadap keragaman budaya negara tuan rumah mereka (Tan & Liu, 2014).

Namun, di balik pengayaan budaya, benturan budaya merupakan hal yang intrinsik bagi pengalaman diaspora, yang menyebabkan tekanan psikologis bagi individu yang bernavigasi

di lingkungan asing (Pantelidou & Craig, 2006). Guncangan budaya, fenomena yang terdokumentasi dengan baik dalam pengalaman mahasiswa internasional, merupakan proses dinamis yang melibatkan adaptasi terhadap lingkungan budaya baru (Pedersen, 1995). Durasi dan sifat periode adaptasi ini berdampak signifikan pada proses penyesuaian dan transisi lintas budaya yang lebih luas (Zhou et al., 2008). Bukti empiris secara konsisten menyoroti tantangan dan tekanan yang terkait dengan guncangan budaya, yang menyebabkan tekanan akulturasi dan masalah adaptasi (Berry, 2006).

Kehadiran mahasiswa internasional, termasuk diaspora Indonesia, sangat penting untuk mendorong keberagaman budaya dan memperkaya negara tuan rumah dengan perspektif dan warisan yang beragam (Bevis, 2002; Harrison, 2002). Literatur menunjukkan bahwa diaspora Indonesia mengalami proses guncangan budaya yang diikuti oleh adaptasi, yang pada akhirnya berkontribusi pada lanskap budaya yang dinamis di negara tuan rumah mereka (Smith & Khawaja, 2011). Adaptasi ini tidak hanya mencakup norma sosial dan budaya tetapi juga tantangan lingkungan akademis dan profesional yang tidak dikenal (Aisha & Mulyana, 2019; Iqbal & Verdaningrum, 2016).

Salah satu aspek penting yang memengaruhi adaptasi diaspora Indonesia di Australia adalah dampak perspektif agama dan ideologi. Ideologi Westernisme yang berlaku di Australia, yang dicirikan oleh tanah air budaya bersama, menimbulkan tantangan bagi diaspora, terutama mereka yang menganut kepercayaan Islam (Georgiou, 2005). Konsep diaspora, sebagaimana dilihat melalui kacamata cendekiawan Muslim, memperkenalkan dikotomi teritorial yang memengaruhi interaksi budaya dan agama dalam konteks Westernisme atau Eropaisme (Albrecht, 2018).

Diaspora Muslim, termasuk diaspora Indonesia, bergulat dengan rasa keterasingan dan mungkin menciptakan wilayah imajiner sebagai tindakan perlindungan terhadap dislokasi budaya di masyarakat Barat (Albrecht, 2018). Dinamika ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana diaspora Indonesia menegosiasikan interaksinya dengan masyarakat sekuler Barat di Australia, terutama yang menyangkut kegiatan pendidikan dan profesional.

Penelitian ilmiah tentang diaspora Indonesia telah mengeksplorasi sistem budaya dan kepercayaan dalam berbagai konteks global (Srimulyani, 2021; Aidulsyah & Gusnelly, 2019; Setianto, 2015). Studi di Australia telah meneliti tantangan yang dihadapi oleh umat Islam, termasuk Indonesia, dalam melestarikan praktik budaya dan keagamaan mereka dalam konteks yang beragam tetapi terkadang terpinggirkan (Baum, 1997; Forrest & Dunn, 2010; Pe-Pua et al., 2010). Di Inggris, perhatian telah diarahkan pada integrasi komunitas Muslim, dengan fokus pada interaksi antara politik multikultural, sekularisasi, dan pelebagaan Islam

(Wardana, 2013). Studi-studi ini menyoroti dinamika kompleks integrasi agama dan budaya, yang mengungkapkan keragaman dan fragmentasi internal dalam diaspora Muslim di negara-negara Barat. Penelitian Wardana (2014) menyelidiki hubungan sosial di antara imigran Muslim Indonesia di London, dengan menekankan peran agama dalam membentuk dinamika diaspora. Studi ini menggarisbawahi keragaman perspektif tentang persatuan dan keberagaman Muslim dalam komunitas Indonesia di London, yang mencerminkan sifat hubungan sosial yang bernuansa dalam konteks diaspora.

Sebagai kesimpulan, literatur tentang diaspora Indonesia di negara-negara Barat menunjukkan pengalaman yang beraneka ragam yang melibatkan adaptasi budaya, interaksi keagamaan, dan negosiasi ideologi yang beragam. Tantangan yang dihadapi oleh diaspora, khususnya dalam menyelaraskan keyakinan Islam dengan ideologi Eropa atau Westernisme yang berlaku, menyoroti dinamika rumit dari keragaman budaya dan moderasi agama. Penelitian di masa mendatang harus menyelidiki lebih dalam peran organisasi keagamaan dalam membentuk pemahaman dan perwujudan moderasi agama dalam komunitas diaspora Indonesia di Australia, yang memberikan wawasan berharga bagi wacana yang lebih luas tentang keragaman budaya di negara-negara asing.

F. Kerangka teoritis

Sebagai anggota diaspora Indonesia, individu secara alami memiliki identitas yang berbeda yang dibentuk oleh kewarganegaraan mereka, terbukti melalui kepemilikan kartu identitas dan paspor, yang melambangkan lambang representatif kehidupan Indonesia. Namun, perwujudan identitas ini sering kali tunduk pada benturan budaya, yang mengakibatkan variasi yang mencolok dalam cara individu merepresentasikannya. Beberapa orang mungkin mengubah ekspresi budaya asli mereka agar selaras dengan norma-norma baru, sementara yang lain dengan teguh menjunjung tinggi dan melestarikan warisan budaya mereka, menjadikannya sebagai identitas yang teguh dalam masyarakat tuan rumah. Benturan budaya menjadi keharusan dalam lingkungan di mana dominasi budaya yang berlaku mengesampingkan dominasi budaya sendiri, terutama dalam kasus pergulatan dengan hegemoni budaya dan ideologis, seperti yang dicontohkan oleh Eropaisme. Menyadari bahwa budaya, menurut Ki Hajar Dewantara dan Suparsono (2004, hlm. 31), merupakan hasil dari upaya manusia untuk terlibat dengan alam dan dinamika temporal, individu dipaksa untuk beradaptasi dengan lingkungan budaya yang berlaku dan keadaan kontemporer untuk mencapai harmoni dan kebahagiaan. Akibatnya, bentrokan budaya muncul sebagai keniscayaan yang tak terelakkan

ketika dihadapkan dengan dominasi budaya dan ideologi, seperti yang dicontohkan oleh pengaruh Eropaisme yang meluas.

Dalam kerangka teori ini, pertimbangan strategi adaptif untuk keterlibatan yang efektif dengan budaya dan lingkungan baru menjadi sangat penting. Forbush dan Foucault-Welles (2016) menggambarkan adaptasi sepanjang dua dimensi: dimensi psikologis, yang meliputi identitas, kesehatan mental, dan kepuasan hidup, dan dimensi sosiokultural, yang melibatkan navigasi yang tepat dari tekanan sehari-hari dalam konteks akademis, kampus, tempat kerja, dan masyarakat (Ward, 1996; Ward & Searle, 1991).

Proses adaptasi yang mencakup dimensi psikologis dan sosiokultural berlangsung melalui empat tahap dalam akulturasi budaya, sebagaimana diidentifikasi oleh Yusiputra dan Umar (2023). Transisi budaya mengawali transisi dari budaya lama ke budaya baru, yang dipengaruhi secara signifikan oleh latar belakang dan kebiasaan budaya. Selanjutnya, adaptasi budaya melibatkan penyesuaian terhadap nuansa lingkungan budaya baru. Tahap ketiga, guncangan budaya, sering kali muncul akibat tantangan dalam memperoleh kemahiran berbahasa asing. Setelah melewati tahap-tahap ini, tahap keempat, akulturasi budaya, menandakan asimilasi budaya asing, dengan penerimaan budaya yang secara bertahap berakar.

Dalam tahap akulturasi, anggota diaspora Indonesia menavigasi dua budaya dalam kehidupan baru mereka di negara tuan rumah. Tantangan mendasar terletak pada pelestarian identitas budaya mereka sambil beradaptasi dengan lingkungan budaya yang berlaku. Akulturasi budaya mengintegrasikan budaya baru tanpa menghapuskan budaya asli seseorang, yang mendorong peningkatan kondisi kehidupan. Tahapan-tahapan ini membentuk kerangka kerja untuk menganalisis adaptasi dalam diaspora Indonesia di Australia, yang sangat penting untuk memahami dinamika akulturasi budaya. Akulturasi yang berhasil menunjukkan interaksi positif dalam diaspora dan komunitas lokal, yang mendorong hubungan sosial yang harmonis. Mempertimbangkan peran moderasi beragama adalah suatu keharusan. Interaksi sosial memfasilitasi pengintegrasian nilai-nilai ini ke dalam etos masyarakat Indonesia. Meskipun ada bentrokan dan tantangan budaya, moderasi beragama tetap menjadi bagian integral bagi komunitas diaspora Indonesia di Australia.

Berdasarkan tahapan-tahapan tersebut, analisis ini mengukur sejauh mana nilai-nilai moderasi beragama dianut oleh diaspora Indonesia di Australia. Analisis ini memetakan pola-pola keagamaan yang mendasari pemahaman mereka, dengan mengkaji afiliasi dengan gerakan-gerakan tradisional (NU, Muhammadiyah) dan gerakan-gerakan kontemporer (Jamaah Tarbiyah, Jamaah Salafi, dan simpatisan Hizbut Tahrir).

Analisis yang cermat muncul dari pemeriksaan tahap-tahap akulturasi budaya dan gerakan-gerakan keagamaan. Analisis ini menyoroti pemahaman, kesadaran, dan manifestasi perilaku, yang mewakili moderasi beragama di tengah perspektif ideologis yang berbeda dalam diaspora Indonesia di Australia. Tujuannya adalah untuk memastikan bagaimana sikap, perilaku, dan pemahaman tentang moderasi beragama terwujud, yang berfungsi sebagai contoh representatif moderasi beragama di negara-negara asing.

Penelitian ini didasari oleh sebuah kerangka yang terdiri dari sembilan nilai inti moderasi beragama, yaitu *rahmatiyah* (kasih sayang kepada sesama), *insaniyyah* (berorientasi pada kemanusiaan), *adliyah* (menegakkan keadilan), *mubadalah* (seimbang), *mashlahah* (memberikan manfaat kepada sesama), dan *mu'ahadah* (berorientasi pada keadilan). *wataniyyah* (berkomitmen pada negara), *dusturiyyah* (menaati konstitusi), *tasamuhiyyah* (toleransi), dan *'urfiyyah* (menghormati adat istiadat setempat). Nilai-nilai tersebut pada dasarnya bersumber dari pengembangan empat indikator utama dalam gerakan moderasi beragama, yaitu komitmen pada kebangsaan, toleransi terhadap perbedaan, penerapan pendekatan tanpa kekerasan, dan akomodasi terhadap budaya setempat (Balitbang dan Diklat Kementerian Agama, 2019). Moderasi beragama, yang merupakan nilai dasar di negara kepulauan, memperkuat toleransi dan antikekerasan di kalangan diaspora Indonesia di Australia, yang menjelaskan asal muasal budaya masyarakat yang toleran.

Konsep moderasi beragama melibatkan sikap keagamaan yang seimbang, meliputi praktik agama sendiri dan menghormati praktik agama orang lain. Keseimbangan ini berfungsi sebagai perlindungan terhadap ekstremisme dan kecenderungan revolusioner (Balitbang dan Diklat Kementerian Agama, 2019, hlm. 18).

G. Metode penelitian

Studi ini merupakan upaya penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan sosiologis untuk meneliti gerakan-gerakan keagamaan baik dalam diaspora Indonesia maupun kelompok-kelompok keagamaan di Australia. Dalam lingkup sosiologi, penelitian ini secara cermat diarahkan untuk mengamati perubahan-perubahan sosial dalam komunitas diaspora. Penelitian ini menyelidiki adaptasi mereka terhadap lingkungan sekuler, dengan memeriksa apakah ada kesinambungan nilai-nilai moderasi agama yang berkelanjutan, baik yang berasal dari interaksi dengan komunitas-komunitas sekuler maupun yang dipengaruhi oleh lembaga-lembaga publik di Australia. Sebaliknya, penelitian ini mengeksplorasi skenario-skenario di

mana nilai-nilai moderasi agama mungkin tidak ada, yang berpotensi memperkuat sikap-sikap intoleran yang sudah ada sebelumnya dalam komunitas-komunitas ini.

Titik fokus penelitian ini mencakup kelompok-kelompok agama diaspora, termasuk komunitas Islam dan Kristen, serta lembaga-lembaga publik seperti sekolah, universitas, dan badan-badan pemerintah di Australia. Data akan diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan pemeriksaan dokumen-dokumen sumber yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh masing-masing lembaga keagamaan. Kelompok-kelompok agama yang menjadi sasaran penelitian ini meliputi Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama, Pengurus Cabang Istimewa Muhammadiyah, Indonesian Diaspora Network (IDN) di Sydney, dan Iqro Foundation, Australia. Akibatnya, wawancara akan dilakukan dengan para administrator dari masing-masing lembaga ini. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara online melalui Zoom dengan berbagai lembaga tersebut. Wawancara zoom ini dilakukan mengingat efektifitas waktu, sembari menunggu izin dan visa terbit.

Observasi dilakukan di lembaga-lembaga ini, khususnya selama keterlibatan kelompok diaspora dalam kegiatan dengan komunitas masing-masing. Untuk melengkapi metode pengumpulan data, berbagai dokumentasi kegiatan, buku referensi keagamaan yang digunakan dalam praktik keagamaan, dan pedoman organisasi akan digunakan sebagai sumber data dalam penelitian ini. Dokumentasi dari lembaga-lembaga publik di Australia akan bersumber baik secara daring maupun langsung, yang mencakup peraturan yang berlaku untuk universitas, sekolah, dan badan pemerintah, khususnya yang terkait dengan kebijakan publik tentang kehidupan beragama.

Penelitian ini akan dilakukan di Australia, khususnya di New South Wales, dengan lokasi utama di Sydney, yang menjadi basis penelitian utama karena banyaknya organisasi keagamaan dan keberadaan Kedutaan Besar Indonesia di Australia. Penelitian ini diperkirakan akan berlangsung selama 4 bulan, sejak September-Desember dimulai dengan komunikasi, wawancara melalui telepon, dan observasi daring. Selanjutnya, tahap penelitian lapangan berlangsung selama 10 hari, yang melibatkan wawancara langsung, observasi di tempat, dan pengambilan data dokumenter di seluruh Australia.

Data akan dianalisis menggunakan kerangka moderasi beragama, yang berasal dari konsep yang diumumkan oleh Kementerian Agama. Namun, para peneliti bercita-cita untuk memajukan konsep moderasi beragama, yang secara khusus disesuaikan untuk kelompok diaspora di Australia. Oleh karena itu, analisis ini akan dilengkapi dengan teori-teori tambahan yang mungkin dapat dijelaskan selama penelitian berlangsung.

H. Pembahasan

Penelitian ini dibagi menjadi enam bab. Bab Satu berfungsi sebagai pendahuluan, menjelaskan alasan di balik dilakukannya penelitian ini, mengidentifikasi masalah penelitian, mengartikulasikan tujuan dan signifikansi penelitian, melakukan tinjauan pustaka yang komprehensif, menguraikan kerangka teoritis, dan menjelaskan metode yang digunakan untuk pengumpulan dan analisis data.

Bab Dua membahas wacana akademis tentang konsep moderasi beragama, baik dalam lingkup Kementerian Agama maupun dalam konteks toleransi beragama yang lebih luas. Selain itu, bab ini menguraikan teori perubahan sosial dalam komunitas diaspora, yang menyediakan landasan teoritis untuk analisis selanjutnya atas data yang diperoleh di lapangan.

Bab berikutnya, Bab Tiga, membahas secara rinci tentang organisasi keagamaan yang ada dalam komunitas diaspora di Australia. Bab ini tidak hanya menawarkan gambaran umum tentang kegiatan mereka, tetapi juga menguraikan program-program yang dijalankan oleh organisasi-organisasi ini. Program-program ini dirancang untuk merangsang dan berkontribusi pada pengembangan pengetahuan, kesadaran, dan perilaku keagamaan yang moderat di antara komunitas diaspora di Indonesia. Lebih jauh, bagian ini bertujuan untuk merumuskan tipologi kegiatan yang menumbuhkan kesadaran akan moderasi beragama dalam setiap organisasi.

Bab Empat dikhususkan untuk pemeriksaan menyeluruh terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh lembaga publik di Australia, dengan fokus khusus pada lembaga pendidikan seperti sekolah dan universitas, serta badan pemerintah. Kebijakan ini diarahkan untuk membina koeksistensi yang harmonis dalam masyarakat yang plural dan multikultural.

Dalam Bab Lima, analisis mendalam dilakukan terhadap tanggapan masing-masing organisasi keagamaan terhadap kebijakan publik yang ditetapkan oleh pemerintah Australia, khususnya yang membahas interaksi antara kelompok sosial dan agama. Tanggapan serupa dari lembaga publik di Australia terhadap komunitas non- Australia yang tinggal di negara tersebut juga diteliti.

Bab terakhir berfungsi sebagai sintesis argumentatif, yang merangkum temuan-temuan penelitian dan memberikan pernyataan dan rekomendasi yang konklusif. Rekomendasi-rekomendasi ini secara khusus ditujukan kepada Kementerian Agama dan komunitas diaspora di Australia.

BAB II MODERASI BERAGAMA DAN PERUBAHAN SOSIAL DALAM KOMUNITAS DIASPORA

A. Konsep Moderasi Beragama

Kata “moderasi” secara bahasa berasal dari bahasa Latin “*moderatio*” yang berarti moderasi, tidak berlebihan dan tidak kekurangan (Kementerian Agama, 2019). Dalam bahasa Arab, moderasi berasal dari kata *wasath* atau *wasathiyah* yang berarti *tawassuth* (tengah), (adil), dan *tawazun* (keseimbangan) (Kementerian Agama, 2019; Wulan & Fajrussalam, 2022). Kata *Wasith* diserap ke dalam bahasa Indonesia dan mempunyai tiga arti, yaitu penengah dan pendamai, penengah perselisihan dan pemimpin dalam permainan (Kementerian Agama, 2019). Islam moderat disebut juga Islam *Wasathiyyah*, berasal dari dua kata, Islam dan “*wasathiyyah*”. Sebagaimana kita ketahui bersama, Islam adalah agama yang penuh berkah, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Islam adalah agama dominan di Indonesia saat ini, negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. Al-Asfahani (2009) mengartikan “*wasathan*” sebagai “*sawa’un*”, titik tengah antara dua batas, atau keadilan, tengah, baku atau biasa. *Wasathan* juga berarti mencegah sikap keras kepala atau bahkan meninggalkan garis kebenaran agama (Al-Asfahani, 2009). Kata “*al-wasathiyyah*” berasal dari kata “*al-wasath*” (*sin* dibaca sukun) dan “*al-wasath*” (*sin* dibaca fathah), keduanya merupakan kata kerja “*mashdar*” (infinitive) *wasatha*. Kata *wasathiyyah* seringkali disinonimkan dengan kata “*al-iqtishad*” dengan pola subjek “*al-muqtashid*”. Sikap beragama Islam (Zamimah, 2018). Sedangkan dalam bahasa Arab, kata “moderasi” sering disebut dengan “*wasath*” atau “*wasathiyyah*”; orangnya disebut dengan “*wasith*”. Dalam Bahasa Indonesia kata *wasith* mempunyai tiga arti, yaitu 1) penengah, perantara (seperti dagang, perniagaan, dan lain-lain), 2) penengah antara pihak-pihak yang bersengketa (pemisah, penengah), dan 3) pemimpin dalam perlombaan. Menurut para ahli bahasa Arab, kata ini adalah “segala sesuatu yang baik menurut obyeknya” (Almu’tasim, 2019). Dalam bahasa Arab, segala sesuatu yang terbaik ada di tengah-tengah. Misalnya kedermawanan adalah sikap antara kikir dan boros, keberanian adalah sikap antara pengecut dan nekat, dan sebagainya (Kementerian Agama, 2019).

Sementara itu, moderasi secara umum berarti keseimbangan dalam mengedepankan keyakinan, moral, dan karakter ketika memperlakukan orang lain sebagai individu dan ketika berhadapan dengan negara (Subhi, 2019). Oleh karena itu, moderasi beragama adalah pandangan, sikap, dan perilaku dalam beragama yang selalu mengambil jalan tengah, selalu bertindak adil, dan tidak ekstrem. Dilihat dari pengertian di atas, maka penanaman nilai-nilai moderat keagamaan di lembaga pendidikan masih perlu ditingkatkan. Nilai moderasi beragama

bagi peserta didik adalah peserta didik mempunyai sifat adil yang berarti manusia harus mampu memperlakukan sesuatu dengan adil. Keseimbangan berarti keseimbangan antara aktivitas kerohanian dan kebaikan berarti menghasilkan kebaikan dan menciptakan kebaikan agar tidak menimbulkan akibat perpecahan; kebijaksanaan berarti kepedulian, Hormat menjadikan berbelas kasih dan jujur; istiqomah berarti konsisten berpegang pada kebenaran dan berjalan di jalan yang benar; menghormati ras, kebangsaan, budaya, pendapat, sikap dan perilaku orang yang berbeda (Sari, 2021).

Secara praktis, moderasi atau bentuk jalan tengah Islam dapat dibagi menjadi empat bidang pembahasan, yaitu: 1) moderasi dalam urusan keimanan; 2) moderasi dalam urusan ibadah; 3) moderasi dalam perangai dan akhlak; Moderasi dalam persoalan *tasyri'* atau pembentukan hukum Islam (Yasid, 2020). Quraish Shihab (2017) berpendapat bahwa moderasi (*wasathiyyah*) mempunyai pilar-pilar penting, yaitu: *Pertama*, pilar keadilan. Pilar ini sangat penting. Beberapa makna penjelasan keadilan adalah: Pertama, keadilan dalam arti “kesetaraan”, yaitu persamaan hak. Seseorang yang berjalan lurus selalu menggunakan skala yang sama untuk postur tubuhnya, bukan skala ganda. Kesetaraan membuat masyarakat bersikap adil dan tidak memihak pada pihak yang kontroversial. Adil juga berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya yang semestinya. Hal ini menghasilkan kesetaraan meskipun jumlahnya mungkin berbeda. Ekuitas adalah pemberian hak kepada pemiliknya melalui jalur terdekat. Hal ini tidak mengharuskan seseorang untuk segera mengalihkan haknya kepada pihak lain. Keadilan juga berarti moderasi, “tidak mengurangi atau melebihi-lebihkan.” *Kedua* adalah pilar penyeimbang. Menurut Quraish Shihab, keseimbangan dapat ditemukan dalam suatu kelompok dimana terdapat berbagai bagian yang dapat mencapai suatu tujuan tertentu, sepanjang masing-masing bagian memenuhi syarat dan kadar tertentu. Dengan memenuhi kondisi tersebut, kelompok dapat bertahan dan memenuhi tujuan keberadaannya. Keseimbangan tidak memerlukan tingkat dan kondisi yang sama agar seluruh bagian unit berada dalam keseimbangan. Suatu bagian bisa kecil atau besar, tergantung fungsi yang diinginkan. Dalam tafsirnya, Quraish Shihab menjelaskan bahwa keseimbangan merupakan prinsip utama *wasathiyyah*, karena tanpa keseimbangan tidak akan ada keadilan. Misalnya keseimbangan ciptaan, Allah menciptakan segala sesuatu menurut ukuran, jumlah dan kebutuhan makhluknya. *Ketiga*, pilar toleransi. Quraish Shihab menjelaskan bahwa toleransi adalah batas pengukuran suatu penambahan atau pengurangan yang masih dapat diterima. Toleransi merupakan penyimpangan yang harus dilakukan namun sebelumnya tidak dilakukan (Shihab, 2017).

Konsep *wasathiyyah* seolah menjadi garis yang memisahkan dua hal yang berlawanan. Mediator disinyalir tidak membenarkan adanya paham radikal dalam agama dan pada gilirannya tidak membenarkan pengabaian terhadap isi Al-Quran sebagai landasan hukum utama. Akibatnya, *Wasathiyyah* cenderung lebih toleran dan tidak ragu dalam menafsirkan ajaran Islam. Yusuf Kalhawi berpendapat bahwa *wasathiyyah* (pemahaman moderat) merupakan salah satu ciri Islam yang tidak dimiliki oleh ideologi lain. Hukum yang adil merupakan kebutuhan dasar setiap struktur sosial. Hukum yang adil menjamin hak seluruh lapisan dan individu sesuai dengan kesejahteraan masyarakat dan disertai dengan perilaku penerapan berbagai peraturan (Syafudin, 2009). Menurut Quraish Shihab (2017), keadilan setidaknya memiliki empat makna, yaitu *pertama*, fairness dalam arti “kesetaraan”. Namun perlu ditegaskan bahwa persamaan yang dimaksud di sini adalah persamaan hak. *Kedua*, keadilan dalam arti “keseimbangan”. Keseimbangan terdapat dalam suatu kelompok dimana terdapat bagian-bagian yang berbeda untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jika ada bagian tubuh manusia yang melebihi kadar atau persyaratannya, atau berkurang, maka keseimbangan (keadilan) tidak akan pernah terjadi. Namun penting untuk diingat bahwa keseimbangan tidak memerlukan kesetaraan. Suatu bagian bisa kecil atau besar, tergantung fungsi yang diinginkan. *Ketiga*, keadilan “berkaitan dengan hak-hak individu dan pemberian hak-hak tersebut kepada setiap pemiliknya. *Keempat*, keadilan adalah milik Tuhan. Keadilan di sini berarti “bersikap adil dalam kelangsungan eksistensi, dan tidak menghalangi kelangsungan eksistensi dan perolehan rahmat ketika ada berbagai kemungkinan Keadilan Ilahi pada dasarnya adalah rahmat dan kebaikan-Nya.” Keadilan-Nya adalah konsekuensi bahwa tidak ada halangan bagi pencapaian rahmat Tuhan sepanjang makhluk mampu mewujudkannya. Allah menciptakan dan mengatur alam semesta ini dengan keadilan dan mewajibkan keadilan mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk keimanan, syariah atau hukum, akhlak, bahkan cinta dan benci.

Dalam konteks pemikiran Islam Indonesia, konsep moderasi Islam setidaknya memiliki lima ciri sebagai berikut. *Pertama*, menyebarkan gagasan Islam tentang nir-kekerasan. *Kedua*, mengadopsi gaya hidup modern dan segala turunannya, seperti ilmu pengetahuan dan teknologi, demokrasi, hak asasi manusia, dan sebagainya. *Ketiga*, menggunakan pemikiran rasional untuk mendekati dan memahami ajaran Islam. *Keempat*, menggunakan pendekatan kontekstual untuk memahami sumber ajaran Islam. Kelima, menggunakan ijtihad (istinbat) ketika merumuskan hukum Islam. Namun kelima ciri tersebut dapat diperluas hingga mencakup lebih banyak ciri seperti toleransi, kerukunan, dan kerjasama antar kelompok agama yang berbeda (Hilmy, 2012). Moderasi dalam ajaran Islam sejalan dengan misi rahmatan *lil al-‘alamin* yaitu menyerukan sikap anti kekerasan dalam perilaku sosial,

memahami perbedaan yang mungkin terjadi, mengutamakan kontekstualisasi dalam penafsiran teks suci, menerapkan hukum terkini dengan menggunakan istinbath dan memanfaatkan metode ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menunjukkan dan mengatasi dinamika permasalahan sosial di Indonesia. Selayaknya perbedaan sikap menjadi sebuah dinamisasi kehidupan sosial yang menjadi bagian dari masyarakat yang madani. Keberadaan Islam moderat cukup menjadi penjaga dan pengawal konsistensi Islam yang telah dibawa oleh Rasulullah Saw. Untuk mengembalikan citra Islam yang sebenarnya, maka diperlukan moderasi agar penganut lain dapat merasakan kebenaran ajaran Islam yang *Rahmatan lil 'Alamin*.

Adapun ciri-ciri lain tentang *wasathiyyah*, sebagaimana disampaikan oleh Afrizal Nur (2015), adalah sebagai berikut:

1. *Tawassuth* (mengambil jalan tengah), yaitu pemahaman dan pengamalan yang tidak *ifrath* (berlebih-lebihan dalam beragama) dan *tafrith* (mengurangi ajaran agama).
2. *Tawazun* (berkeseimbangan), yaitu pemahaman dan pengamalan agama secara seimbang yang meliputi semua aspek kehidupan, baik *duniawi* maupun *ukhrawi*, tegas dalam menyatakan prinsip yang dapat membedakan antara *inhira*, (penyimpangan,) dan *ikhtilaf* (perbedaan).
3. *I'tidâl* (lurus dan tegas), yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya dan melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban secara proporsional.
4. *Tasamuh* (toleransi), yaitu mengakui dan menghormati perbedaan, baik dalam aspek keagamaan dan berbagai aspek kehidupan lainnya.
5. *Musawah* (egaliter), yaitu tidak bersikap diskriminatif pada yang lain disebabkan perbedaan keyakinan, tradisi dan asal usul seseorang.
6. *Syura* (musyawarah), yaitu setiap persoalan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan prinsip menempatkan kemaslahatan di atas segalanya.
7. *Ishlah* (reformasi), yaitu mengutamakan prinsip reformatif untuk mencapai keadaan lebih baik yang mengakomodasi perubahan dan kemajuan zaman dengan berpijak pada kemaslahatan umum (*mashlahah 'ammah*) dengan tetap berpegang pada prinsip *al-muhafazhah 'ala al- qadimi al-shalih wa al-akhdzu bi al-jadidi al- ashlah* (melestarikan tradisi lama yang masih relevan, dan menerapkan hal-hal baru yang lebih relevan).
8. *Aulawiyah* (mendahulukan yang prioritas), yaitu kemampuan mengidentifikasi *hal ihwal* yang lebih penting harus diutamakan untuk diterapkan dibandingkan dengan

yang kepentingannya lebih rendah.

9. *Tathawwur wa Ibtikar* (dinamis dan inovatif), yaitu selalu terbuka untuk melakukan perubahan-perubahan kearah yang lebih baik.

Moderasi beragama merujuk pada pendekatan yang menekankan pemahaman yang seimbang dan toleran terhadap ajaran agama. Ini bukan berarti mengurangi nilai-nilai agama, tetapi lebih kepada mendalami ajaran tersebut untuk menghindari ekstremisme. Moderasi beragama penting untuk mencegah konflik antar agama dan menciptakan suasana hidup berdampingan yang harmonis. Kementerian Agama telah mengembangkan kebijakan moderasi beragama sebagai respons terhadap meningkatnya ekstremisme dan radikalisme. Tahun 2019 merupakan awal momentum penguatan moderasi beragama. Saat itu Lukman Hakim Saifuddin menjabat sebagai Menteri Agama menyampaikan pidato pengarahan yang berjudul “Moderasi untuk kebersamaan umat: Memaknai Rapat Kerja Nasional Kemenag 2019”. Beliau mensosialisasikan tiga mantra kepada seluruh jajaran pimpinan pejabat Kementerian Agama untuk dipahami, disosialisasikan. Ketiga mantra itu ialah; moderasi beragama, kebersamaan umat dan integrasi data (Kementerian Agama, 2019). Tujuan dari moderasi ini demi terciptanya pemahaman beragama yang proporsional, bukan radikal ataupun liberal. Moderasi diibaratkan sebagai bandul jam yang bergerak dari pinggir dan selalu cenderung menuju pusatnya (*centripetal*).

Di Indonesia, secara eksplisit masyarakat terlihat rukun satu sama lainnya. Namun, pada kenyataannya kerukunan yang terbangun tak luput dari sebuah kecurigaan satu sama lainnya (Cholil, 2022). Secara teologis, misalnya dalam memahami agama Islam, kemudian meyakini pemahaman itu sekaligus mengekspresikan yang diyakini merupakan fitrah dari sebuah keberagaman (Umami, 2013). Salah satu argumen munculnya moderasi beragama di Indonesia ialah karena masyarakat Indonesia yang sangat plural dan multikultural. Konsep plural lebih menekankan keanekaragaman suku bangsa, kebudayaan. Sedangkan multikultural lebih menekankan relasi antar-kebudayaan sehingga lahirlah toleransi, saling menghargai dan sebagainya (Syafuddin, 2006).

Penguatan moderasi beragama merupakan salah satu indikator utama pembangunan budaya dan karakter bangsa. Moderasi beragama juga menjadi salah satu prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 Kementerian Agama. Dengan moderasi beragama, seseorang tidak bersikap ekstrem dan berlebihan dalam menjalankan ajaran agamanya (Kemenag RI, 2019). Moderasi beragama merupakan upaya kreatif yang mengembangkan keberagaman sikap dalam berbagai batasan, seperti antara penegasan

kebenaran absolut dan subjektivitas, antara penafsiran literal dan penolakan arogan terhadap doktrin agama, serta antara radikalisme dan sekularisme. Indonesia menguraikan tiga prinsip moderasi (*wasathiyah*), yaitu: *Pertama*, moderasi berpikir, yaitu berpikir dalam agama, yang ditandai dengan kemampuan mensintesis teks dan konteks, seperti membaca kitab suci dan secara dinamis memadukan keduanya untuk memperoleh pemahaman yang kompleks. *Kedua*, moderasi dalam bergerak, yaitu penyebaran dakwah yang dirancang untuk mendorong kebaikan dan menghindari segala keburukan. Gerakan ini menghindari kekerasan dan pemaksaan demi pendekatan yang lembut dan santun (Nurkholis, 2017). *Ketiga*, moderasi perilaku (praktik keagamaan) yaitu mempererat hubungan antara agama dan budaya (tradisi) masyarakat setempat. Ide dasar dari moderasi adalah mencari persamaan, bukan memperparah perbedaan. Kita memerlukan moderasi beragama setidaknya karena tiga alasan utama. *Pertama*, salah satu hakikat eksistensi keagamaan adalah menjaga harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan, termasuk memastikan tidak ada nyawa yang hilang. Moderasi beragama menjaga fitrah manusia, dan pentingnya moderasi beragama adalah sebagai cara agar praktik keagamaan kembali pada hakikatnya. *Kedua*, seiring dengan berkembangnya umat manusia, maka agama pun ikut berkembang.

Teks-teks agama juga mengalami multitafsir, sehingga ada orang-orang yang bersikap fanatik pada tafsir kebenaran versi yang disukainya dan sesuai dengan kepentingan politiknya. *Ketiga*, khusus dalam konteks Indonesia, moderasi beragama diperlukan sebagai strategi kebudayaan kita dalam merawat keindonesiaan. Nilai-nilai agama dijaga, dipadukan dengan nilai-nilai kearifan dan adat-istiadat lokal agar terjalin dengan rukun dan damai. Inilah jati diri Indonesia yang sebenarnya, negara yang agamis, dan berkarakter santun serta mampu berdialog dengan keragaman. Moderasi beragama amat penting dijadikan cara pandang agar terhindar dari sikap ekstremisme dan radikalisme agar terhindar dari rusaknya sendi-sendi keindonesiaan. Moderasi beragama merupakan kebaikan moral bersama yang relevan tidak saja dengan perilaku individu, melainkan dengan komunitas atau lembaga. Lebih dari itu, cara pandang dan praktik moderasi dalam beragama bukanlah kebutuhan bagi Masyarakat Indonesia saja, melainkan kebutuhan global masyarakat dunia (Kementerian Agama, 2019). Upaya dalam mengembangkan moderasi beragama ialah dengan meluncurkan buku “Moderasi Beragama”. Tanggal 18 Oktober 2019 dapat dikatakan sebagai “Hari Moderasi Beragama” yang *leading sector*-nya pada Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI (Junaedi, 2019). Salah satu prinsip dalam moderasi agama selalu menjaga keseimbangan diantara dua hal, misalnya keseimbangan antara akal dan wahyu, jasmani dan rohani, antara teks agama dan ijtihad tokoh agama, dan keseimbangan

masa lalu dan masa depan. Inti dari moderasi ialah adil dan berimbang baik itu dalam menyikapi dan mempraktikkan. Moderasi tidak hanya diajarkan oleh Islam, tetapi agama lain juga. Moderasi merupakan sebuah kebijakan yang mendorong terciptanya harmoni sosial dan keseimbangan dalam kehidupan secara personal dan antar manusia secara luas.

Adapun ukuran, batasan, dan indikator untuk menentukan apakah sebuah cara pandang, sikap, dan perilaku beragama tertentu itu tergolong moderat atau sebaliknya, ekstrem. Namun, untuk kepentingan buku ini, indikator moderasi beragama yang akan digunakan adalah empat hal, yaitu: 1) komitmen kebangsaan; 2) toleransi; 3) anti-kekerasan; dan 4) akomodatif terhadap kebudayaan lokal. Keempat indikator ini dapat digunakan untuk mengenali seberapa kuat moderasi beragama yang dipraktikkan oleh seseorang di Indonesia, dan seberapa besar kerentanan yang dimiliki. Kerentanan tersebut perlu dikenali supaya kita bisa menemukan dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk melakukan penguatan moderasi beragama. Komitmen kebangsaan merupakan indikator yang sangat penting untuk melihat sejauh mana cara pandang, sikap, dan praktik beragama seseorang berdampak pada kesetiaan terhadap konsensus dasar kebangsaan, terutama terkait dengan penerimaan Pancasila sebagai ideologi negara, sikapnya terhadap tantangan ideologi yang berlawanan dengan Pancasila, serta nasionalisme. Sebagai bagian dari komitmen kebangsaan adalah penerimaan terhadap prinsip-prinsip berbangsa yang tertuang dalam Konstitusi UUD 1945 dan regulasi di bawahnya. Komitmen kebangsaan ini penting untuk dijadikan sebagai indikator moderasi beragama. karena dalam perspektif moderasi beragama, mengamalkan ajaran agama adalah sama dengan menjalankan kewajiban sebagai warga negara, sebagaimana menunaikan kewajiban sebagai warga negara adalah wujud pengamalan ajaran agama. Toleransi merupakan sikap untuk memberi ruang dan tidak mengganggu hak orang lain untuk berkeyakinan, mengekspresikan keyakinannya, dan menyampaikan pendapat, meskipun hal tersebut berbeda dengan apa yang kita yakini. Dengan demikian, toleransi mengacu pada sikap terbuka, lapang dada, sukarela, dan lembut dalam menerima perbedaan. Toleransi selalu disertai dengan sikap hormat, menerima orang yang berbeda sebagai bagian dari diri kita, dan berpikir positif. Sebagai sebuah sikap dalam menghadapi perbedaan, toleransi menjadi fondasi terpenting dalam demokrasi, sebab demokrasi hanya bisa berjalan ketika seseorang mampu menahan pendapatnya dan kemudian menerima pendapat orang lain. Oleh karena itu, kematangan demokrasi sebuah bangsa, antara lain, bisa diukur dengan sejauh mana toleransi bangsa itu. Semakin tinggi toleransinya terhadap perbedaan, maka bangsa itu cenderung semakin demokratis, demikian juga sebaliknya. Aspek toleransi sebenarnya tidak hanya terkait dengan keyakinan agama, namun bisa terkait dengan perbedaan ras, jenis kelamin, perbedaan orientasi seksual, suku,

budaya, dan sebagainya. Dalam konteks buku ini, toleransi beragama yang menjadi tekanan adalah toleransi antar agama dan toleransi intra agama, baik terkait dengan toleransi sosial maupun politik. Melalui relasi antar agama, kita dapat melihat sikap pada pemeluk agama lain, kesediaan berdialog, bekerja sama, pendirian tempat ibadah, serta pengalaman berinteraksi dengan pemeluk agama lain. Sedangkan toleransi intraagama dapat digunakan untuk menyikapi sekte-sekte minoritas yang dianggap menyimpang dari arus besar agama tersebut. Sedangkan radikalisme, atau kekerasan, dalam konteks moderasi beragama ini dipahami sebagai suatu ideologi (ide atau gagasan) dan paham yang ingin melakukan perubahan pada sistem sosial dan politik dengan menggunakan cara-cara kekerasan/ekstrem atas nama agama, baik kekerasan verbal, fisik dan pikiran. Inti dari tindakan radikalisme adalah sikap dan tindakan seseorang atau kelompok tertentu yang menggunakan cara-cara kekerasan dalam mengusung perubahan yang diinginkan. Kelompok radikal umumnya menginginkan perubahan tersebut dalam tempo singkat dan secara drastis serta bertentangan dengan sistem sosial yang berlaku. Radikalisme sering dikaitkan dengan terorisme, karena kelompok radikal dapat melakukan cara apa pun agar keinginannya tercapai, termasuk meneror pihak yang tidak sependapat dengan mereka. Walaupun banyak yang mengaitkan radikalisme dengan agama tertentu, namun pada dasarnya radikalisme tidak hanya terkait dengan agama tertentu, tetapi bisa melekat pada semua agama. Radikalisme bisa muncul karena persepsi ketidakadilan dan keterancaman yang dialami seseorang atau sekelompok orang. Persepsi ketidakadilan dan perasaan terancam memang tidak serta merta melahirkan radikalisme. Ia akan lahir jika dikelola secara ideologis dengan memunculkan kebencian terhadap kelompok yang dianggap sebagai pembuat ketidakadilan dan pihak-pihak yang mengancam identitasnya. Ketidakadilan mempunyai dimensi yang luas, seperti ketidakadilan sosial, ketidakadilan ekonomi, ketidakadilan politik, dan sebagainya. Ketidakadilan dan perasaan terancam bisa muncul bersama-sama, namun juga bisa terpisah. Persepsi ketidakadilan dan perasaan terancam tersebut bisa memunculkan dukungan pada radikalisme, bahkan terorisme, meskipun belum tentu orang tersebut bersedia melakukan tindakan radikal dan teror. Sedangkan praktik dan perilaku beragama yang akomodatif terhadap budaya lokal dapat digunakan untuk melihat sejauh mana kesediaan untuk menerima praktik amaliah keagamaan yang mengakomodasi kebudayaan lokal dan tradisi. Orang-orang yang moderat memiliki kecenderungan lebih ramah dalam penerimaan tradisi dan budaya lokal dalam perilaku keagamaannya, sejauh tidak bertentangan dengan pokok ajaran agama. Tradisi keberagamaan yang tidak kaku, antara lain, ditandai dengan kesediaan untuk menerima praktik dan perilaku beragama yang tidak semata-mata menekankan pada kebenaran normatif, melainkan juga menerima praktik beragama yang

didasarkan pada keutamaan, tentu, sekali lagi, sejauh praktik itu tidak bertentangan dengan hal yang prinsipil dalam ajaran agama. Sebaliknya, ada juga kelompok yang cenderung tidak akomodatif terhadap tradisi dan kebudayaan, karena mempraktikkan tradisi dan budaya dalam beragama akan dianggap sebagai tindakan yang mengotori kemurnian agama. Meski demikian, praktik keberagamaan ini tidak bisa secara serta merta menggambarkan moderasi pelakunya. Hal ini hanya bisa digunakan untuk sekadar melihat kecenderungan umum. Pandangan bahwa seseorang yang semakin akomodatif terhadap tradisi lokal, akan semakin moderat dalam beragama memang masih harus dibuktikan. Bisa jadi, tidak ada korelasi positif antara sikap moderat dalam beragama dengan akomodasi terhadap tradisi lokal dalam beragama (Kementerian Agama, 2019).

Moderasi beragama merupakan konsep penting dalam menjaga kerukunan dan keharmonisan antar umat beragama, terutama di negara-negara yang kaya akan keberagaman seperti Indonesia. Kementerian Agama Republik Indonesia memiliki peran strategis dalam mendorong moderasi beragama melalui berbagai kebijakan dan program. Moderasi beragama adalah cara memandang, sikap, dan perilaku beragama yang menghargai perbedaan dan menolak ekstremisme. Dalam konteks Indonesia, moderasi beragama menjadi pilar penting dalam upaya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Kemenag mendefinisikan moderasi beragama sebagai upaya untuk meyakini kebenaran agama sendiri sambil menjaga keyakinan orang lain tanpa harus membenarkannya. Urgensi moderasi beragama semakin meningkat seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan globalisasi yang memungkinkan penyebaran paham ekstremis secara cepat.

Arah Kebijakan Moderasi beragama difokuskan pada beberapa aspek utama, yaitu: 1) Penguatan Komitmen Nasional: kebijakan ini menekankan hubungan antara agama dan negara serta penerimaan terhadap empat pilar kebangsaan; dan 2) Pendidikan Moderasi Beragama: implementasi kebijakan ini di bidang pendidikan bertujuan untuk mengurangi intoleransi, fanatisme, dan ekstremisme yang dapat mengancam stabilitas sosial dan keamanan nasional.

Program dan Inisiatif Kementerian Agama telah meluncurkan berbagai program untuk mendukung moderasi beragama, antara lain sebagai berikut (Taufiq & Alkholid, 2021):

1. Pelatihan Kader Mubaligh: Kemenag menyelenggarakan pelatihan bagi mubaligh untuk memberikan pemahaman keagamaan yang moderat kepada masyarakat.
2. Jaringan Diaspora Penggerak Moderasi Beragama (JDPMB): JDPMB dibentuk untuk menggerakkan mahasiswa Indonesia di luar negeri agar menjadi agen

moderasi beragama. Jaringan ini bertujuan untuk membendung intoleransi dan radikalisme di kalangan diaspora

3. Rumah Moderasi Beragama: Kemenag mengeluarkan surat edaran untuk mendirikan rumah moderasi beragama di setiap universitas sebagai upaya untuk menciptakan ruang dialog antarumat beragama.
4. Kampanye Moderasi Beragama: Melalui kampanye ini, Kemenag mengajak masyarakat untuk menerapkan nilai-nilai toleransi dan tenggang rasa dalam kehidupan sehari-hari.

Dampak Kebijakan moderasi beragama ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam menciptakan lingkungan yang menguntungkan bagi keberagaman agama. Sebagai contoh, JDPMB telah berhasil melibatkan mahasiswa dari berbagai negara untuk bersama-sama mendorong sikap toleran dan menghargai perbedaan. Selain itu, pelatihan kader mubaligh juga diharapkan dapat menghasilkan pemimpin agama yang mampu menyebarkan paham moderat di kalangan masyarakat.

Komunitas diaspora sering kali menghadapi tantangan dalam mempertahankan identitas budaya dan agama mereka sambil beradaptasi dengan lingkungan baru. Dalam konteks ini, moderasi beragama menjadi penting untuk mencegah terjadinya konflik identitas yang dapat memecah belah komunitas. Kemenag aktif melakukan kampanye moderasi beragama kepada diaspora Indonesia di berbagai negara. Dalam pertemuan dengan diaspora, Menteri Agama menekankan pentingnya penerapan moderasi beragama sebagai modal penting pembangunan bangsa. Selain itu, Kemenag juga mendorong diaspora untuk terlibat dalam kegiatan lintas agama guna memperkuat kerukunan antarumat beragama. Moderasi beragama merupakan konsep yang sangat relevan dalam konteks Indonesia yang multikultural. Kementerian Agama memiliki peran penting dalam mendorong moderasi melalui berbagai kebijakan dan program. Dengan melibatkan komunitas diaspora, Kemenag tidak hanya memperkuat identitas bangsa tetapi juga menciptakan jembatan antara berbagai kelompok agama di tingkat global. Upaya ini sangat penting untuk menjaga perdamaian dan keharmonisan dalam masyarakat yang majemuk.

B. Diaspora dan Identitas Budaya

1) Pengertian Diaspora

Kata “diaspora” berasal dari kata Yunani “*diaspeiro*” yang berarti menyebar (Karim, 2018). Istilah “*diaspeiro*” pertama kali muncul dalam tulisan Sophocles, Herodotus, dan

Thucydides pada awal abad ke-5 SM (Dufoix, 2009). Sementara itu, istilah “diaspora” muncul sebagai konsep baru pada abad ke-3 SM, sekitar masa ketika para sarjana Yahudi terkemuka di Aleksandria menerjemahkan Alkitab Ibrani ke dalam bahasa Yunani. Sepanjang sejarah, konsep diaspora awalnya mengacu pada penyebaran orang-orang Yahudi, yang dianggap sebagai diaspora tertua di dunia (Elazar, 1991), mengacu pada individu yang berasal dari suatu negara dan bermigrasi ke luar negeri karena berbagai motif (Kenny, 2013). Diaspora didasari oleh tiga alasan, pertama alasan politik, seperti terkait situasi konflik di negara asal. Kedua, faktor ekonomi dapat menjadi pendorong pengetahuan mereka. Orang-orang ini umumnya kembali ke negara asal mereka setelah menyelesaikan studi mereka, namun banyak yang mengembangkan karir dan pilihan pekerjaan mereka di negara tempat mereka belajar berdasarkan keterampilan mereka. Migrasi internasional telah menjadi salah satu faktor penentu utama. Diaspora mengacu pada perpindahan individu dari satu negara ke negara lain. Proses migrasi internasional rumit karena melibatkan perubahan tempat tinggal, tujuan imigrasi, dan keinginan untuk tinggal atau kembali. Migrasi internasional juga merupakan bagian integral dari fenomena globalisasi yang ditandai dengan tumbuhnya, mendalamnya dan percepatan keterhubungan dalam seluruh aspek kehidupan sosial di seluruh dunia. Seiring dengan semakin banyaknya orang yang meninggalkan kampung halamannya untuk menetap di tempat baru, Hal ini menunjukkan adanya peningkatan jumlah ekspatriat yang ada, yaitu individu yang berasal dari suatu negara dan pindah ke luar negeri karena berbagai motivasi. *Pertama*, alasan di balik tindakan tersebut mungkin bersifat politis, misalnya terkait dengan situasi konflik di negara asal. *Kedua*, faktor ekonomi dapat menjadi pendorong, misalnya berupa partisipasi dalam investasi yang kemudian diekspor ke negara tujuan atau manfaat ekonomi lainnya. *Ketiga*, insentif sosial dan budaya juga dapat mendorong ekspatriat, misalnya karena tekanan sosial atau perbedaan budaya di negara asal. Contoh spesifik diaspora adalah kelompok etnis Thioghoa di Indonesia. Dalam dinamika tersebut terdapat perbedaan mobilisasi individu antara negara asal (*home*) dan negara tujuan (*asing*). Tentu tidak dapat dipungkiri bahwa diaspora itu ada karena mereka menuntut ilmu, baik karena misi lembaga, maupun atas inisiatif sendiri dan atas biaya sendiri karena ingin mengembangkan keahlian dan keterampilan keilmuan mereka sendiri. Orang-orang ini umumnya kembali ke negara asal mereka setelah menyelesaikan studi mereka, namun banyak juga yang mengembangkan karir dan pilihan pekerjaan mereka di negara tuan rumah berdasarkan keterampilan mereka, mengalami perkembangan budaya diaspora melalui interaksi dan integrasi dalam komunitas. Budaya *hybrid*, konstruksi budaya baru. Diaspora mencerminkan semangat juang kelompok marginal di seluruh dunia. Berbeda dengan etos kapitalis yang fokus pada barang-barang

ekonomi dan keuntungan ekonomi, diaspora lebih fokus pada etos minoritas global. Dalam konteks transnasionalisme, muncul konsep non-nasionalisme. Ketika batas-batas negara menjadi semakin kabur. Non-nasionalisme berbeda dengan diaspora, diaspora mengandung unsur nasionalisme. Sebagai contoh spesifik, orang Tionghoa di Indonesia adalah contoh nyata. Mereka menghadapi kesulitan untuk diterima oleh masyarakat adat Indonesia dan sering disebut sebagai non-pribumi. Bahkan pergantian judul dari "Tionghoa" menjadi "China" bisa menimbulkan konflik karena dianggap menghina. Di antara kelompok Tionghoa di Indonesia, ada dua kategori: Totok (pendatang baru) dan Peranakan (orang yang sudah lama tinggal di Indonesia dan lahir serta besar di sana). Dalam konteks diaspora Indonesia, pendataan diaspora masih belum dilaksanakan secara benar dan lengkap. Organisasi Indonesia Diaspora Network (IDN) diharapkan berperan penting dalam mengumpulkan dan menyediakan data diaspora Indonesia secara komprehensif (Muhidin & Utomo, 2015). Data tersebut memiliki signifikansi yang sangat besar karena menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana diaspora memengaruhi proses pembangunan di Indonesia, khususnya dari tempat tinggal mereka saat ini, termasuk rincian tentang lokasi distribusi dan karakteristik unik mereka. Pengumpulan informasi tentang diaspora terbukti bermanfaat untuk menilai dan mengidentifikasi kontribusi mereka terhadap kemajuan bangsa. Sangat penting untuk mengungkap dan memanfaatkan potensi diaspora untuk mendukung pembangunan nasional, sebuah strategi yang telah dilaksanakan secara efektif oleh negara-negara seperti India dan Cina. Kedua negara telah berhasil memanfaatkan diaspora mereka sebagai aset vital untuk pembangunan mereka (Romdiati, 2015). Pembahasan ini dibingkai dalam konteks sosiologis migrasi internasional yang menyangkut Pekerja Migran Indonesia (PMI). Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pengaruh keluarga memegang peranan penting dalam perjalanan migrasi internasional calon TKI yang mencari pekerjaan di luar negeri (Gheasi & Nijkamp, 2017). Dalam konteks ini, keluarga TKI memilih untuk mengirim kerabat mereka ke luar negeri sebagai cara untuk memastikan kelangsungan hidup dan meningkatkan taraf hidup mereka, khususnya di kalangan kelompok yang kurang mampu secara finansial dengan latar belakang pendidikan yang terbatas. Tren ini menumbuhkan persepsi bahwa bekerja sebagai TKI di luar negeri dapat meningkatkan status keluarga, yang secara bertahap berkembang menjadi pola pikir yang akhirnya mengakar dalam budaya dan kebiasaan masyarakat setempat (Muhidin & Utomo, 2015).

Keberadaan diaspora Indonesia di seluruh dunia yang berjumlah antara 8-10 juta orang yang tersebar di 120 negara, turut berperan dan merupakan aset penting bagi kemajuan bangsa. Dari jumlah tersebut, terdapat berbagai potensi di atas kesuksesan dari kebanyakan diaspora

Indonesia. Secara emosional, mereka dianggap dapat menjembatani beragam perbedaan sosial dan kultur di negaranegara tempat diaspora berada, sehingga dapat pula berperan dalam mendekatkan hubungan Indonesia dengan berbagai negara. Diaspora ini menjadi sarana diplomasi yang efektif bagi sebuah negara terhadap negara tempat tinggal diaspora tersebut. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Mochamad Aria Siregar (2016), diaspora Indonesia saat ini diperkirakan mencapai setidaknya 6.100.000 orang yang tersebar di berbagai negara. Jumlah diaspora yang cukup besar ini berpotensi dapat membantu mengenalkan Indonesia pada lingkungan global (Siregar, 2016).

Secara garis besar, diaspora didefinisikan sebagai, sekelompok orang yang tinggal di luar wilayah yang mereka telah tinggal untuk waktu yang lama atau di mana nenek moyang mereka tinggal, Menurut Dr. Dino Patti Djalal, sebagaimana disebut oleh Manurung (2015), istilah Diaspora Indonesia sendiri memiliki arti warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri dan terbagi dalam empat kelompok.; a. Kelompok pertama adalah WNI yang tinggal di luar negeri yakni masih memegang paspor Indonesia secara sah. Mereka masih memegang paspor Indonesia secara sah. Dari 167 kedutaan besar dan perwakilan RI yang ada di luar negeri, saat ini diperkirakan ada sekitar 4,7 juta WNI di luar wilayah Indonesia; b. Kelompok kedua adalah warga Indonesia yang telah menjadi warga negara asing karena proses naturalisasi dan tidak lagi memiliki paspor Indonesia; Kelompok ketiga adalah warga negara asing yang memiliki orang tua atau leluhur yang berasal dari Indonesia; d. Kelompok keempat adalah warga negara asing yang tidak memiliki pertalian leluhur dengan Indonesia sama sekali namun memiliki kecintaan yang luar biasa terhadap Indonesia (Manurung, 2015).

2) *Pembentukan Identitas dan Komunitas dalam Diaspora*

a. Teori Peran

Peran adalah seperangkat tingkat yang' diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat dengan tugas utama yang harus dilaksanakan. Setiap insan dan lembaga mempunyai peran (*role*) yang merupakan aspek dinamis dalam kedudukan (*status*). Sehingga, apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran Mengenai peranan ini, Santoso (2014) mengemukakan beberapa dimensi peran sebagai berikut: 1) Peran sebagai suatu kebijakan. Penganut paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik dilaksanakan Peran sebagai strategi. Penganut paham ini mendalikan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat (*public support*). Pendapat ini didasarkan pada suatu paham bahwa keputusan dan kepedulian masyarakat pada tiap tingkatan keputusan

didokumentasikan dengan baik, maka keputusan tersebut memiliki kredibilitas. 2) Peran sebagai alat komunikasi. Peran didayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintah dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai, guna mewujudkan keputusan yang responsif dan responsibel. 3) Peran sebagai alat penyelesaian sengketa. Peran didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi dan meredam konflik melalui usaha pencapaian konsensus dari pendapatpendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan (*mistrust*) dan kerancuan (*biases*). 4) Peran sebagai terapi. Menurut persepsi ini, peran dilakukan sebagai upaya “mengobati” masalah masalah psikologis masyarakat seperti halnya perasaan ketidakberdayaan (*sense of powerlessness*), tidak percaya diri dan perasaan bahwa diri mereka bukan komponen penting dalam Masyarakat (Moreno et al., 2020).

Proses “*templatization*” di kalangan diaspora menunjukkan bagaimana tradisi keagamaan dapat beradaptasi dengan lingkungan baru sambil mempertahankan esensi ritual dan norma keagamaan. Transformasi sosial dalam komunitas diaspora Muslim di Eropa menunjukkan bagaimana agama dapat menjadi faktor dinamis dalam perubahan sosial. Studi ini mengeksplorasi bagaimana identitas keagamaan dipertahankan dan bagaimana komunitas beradaptasi dengan kebijakan identitas nasional dan kewarganegaraan yang diatur oleh badan politik. Praktik keagamaan memberikan kekuatan dan dukungan selama proses migrasi. Setelah migrasi, agama membantu menciptakan rasa komunitas dan memberikan dukungan finansial dan sosial selama masa sulit (Moreno et al., 2020).

b. Strategi Koping dan Eksklusi Sosial

Dalam konteks diaspora, strategi koping seperti koping aktif dan dukungan instrumental dapat memoderasi hubungan antara diskriminasi yang dirasakan dan eksklusi sosial. Peningkatan diskriminasi berhubungan dengan peningkatan eksklusi sosial dalam berbagai dimensi, namun penggunaan strategi koping dapat mengurangi dampak negatif tersebut (Saasa, 2019).

c. Adaptasi Budaya dan Identitas

Moderasi beragama dapat memfasilitasi adaptasi budaya dan pembentukan identitas hibrida dalam komunitas diaspora. Dengan mengedepankan toleransi dan inklusivitas, individu dalam komunitas diaspora dapat lebih mudah menavigasi perbedaan budaya dan membangun identitas yang mencerminkan pengalaman mereka di negara asal dan negara tuan rumah.

d. Partisipasi Sosial dan Keterlibatan Komunitas

Moderasi beragama juga dapat meningkatkan partisipasi sosial dan keterlibatan dalam komunitas. Dengan mengurangi ketegangan antar kelompok dan mempromosikan dialog antaragama, moderasi beragama dapat menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan harmonis.

Konsep diaspora sering memunculkan pertanyaan tentang identitas budaya dan agama, ketika individu menavigasi dualitas realitas antara tanah air dan negara tempat tinggal. Komunitas diaspora, yang terbentuk saat individu atau kelompok berpindah dari tanah air mereka, dicirikan oleh keterhubungan mereka dengan warisan dan praktik bersama, meskipun terpisah secara fisik. Menurut Cohen (2022), anggota diaspora mempertahankan “orientasi tanah air” melalui praktik dan kepercayaan yang menghubungkan mereka dengan tempat asalnya. Orientasi ini membina identitas kolektif dan menawarkan stabilitas ketika para migran menyesuaikan diri dengan lingkungan budaya dan sosial baru, seringkali melalui pusat-pusat keagamaan atau budaya yang memungkinkan kelanjutan tradisi mereka.

Identitas agama dalam konteks diaspora seringkali menjadi penanda pelestarian identitas, terutama ketika dihadapkan pada disonansi budaya atau marginalisasi dalam masyarakat tempat tinggal. Sebagai contoh, Modood (2019) berpendapat bahwa ekspresi agama di kalangan komunitas diaspora dapat berfungsi sebagai pernyataan identitas baik secara pribadi maupun kolektif, terutama dalam lingkungan multikultural di mana berbagai praktik agama hidup berdampingan. Di negara-negara seperti Amerika Serikat, Kanada, dan Australia, yang menampung beragam komunitas diaspora, agama seringkali menjadi saluran penguatan identitas, menyediakan struktur yang familiar dan rasa persatuan di tengah lanskap budaya yang seringkali kontras (Vertovec, 2013). Fenomena ini membantu kelompok diaspora mempertahankan identitas yang koheren sambil menyesuaikan diri dengan norma dan nilai baru.

Lebih jauh lagi, tantangan yang dihadapi komunitas diaspora dalam melestarikan identitas budaya dan agama mereka menyoroti sifat dinamis identitas dalam konteks transnasional. Identitas diaspora tidaklah statis; mereka berkembang saat para migran bernegosiasi antara tradisi dan akulturasi, menciptakan “ruang ketiga” identitas yang menyatukan unsur-unsur dari budaya tanah air dan negara tempat tinggal (Bhabha, 1994). Proses negosiasi ini sering kali menghasilkan bentuk-bentuk praktik budaya dan agama yang unik dan terhibridisasi yang memungkinkan komunitas diaspora untuk berkembang di negara tempat tinggal mereka. Namun, identitas hibrida ini juga dapat menimbulkan ketegangan, saat

individu berupaya menghormati warisan mereka sambil mengintegrasikan aspek-aspek praktik budaya negara tempat tinggal mereka. Pada akhirnya, komunitas diaspora menunjukkan ketahanan dan adaptabilitas identitas budaya dan agama melintasi batas-batas negara.

Meskipun moderasi beragama menawarkan banyak manfaat, ada juga tantangan yang perlu dihadapi. Misalnya, perbedaan interpretasi keagamaan dan tekanan dari kelompok ekstremis dapat menghambat upaya moderasi. Namun, dengan pendekatan yang tepat, moderasi beragama dapat menjadi alat yang efektif untuk mempromosikan perubahan sosial positif dalam komunitas diaspora. Jaringan sosial dan tingkat integrasi dalam masyarakat tuan rumah memainkan peran penting dalam praktik keagamaan komunitas diaspora. Interaksi dengan sesama migran dan keterikatan yang kuat dengan negara asal meningkatkan frekuensi partisipasi keagamaan, sebaliknya, kesulitan integrasi dalam masyarakat tuan rumah cenderung mengurangnya (Gherghina & Plopeanu, 2021). Komunitas muslim sebagai minoritas akan menghadapi tantangan dalam mempertahankan identitas keagamaan mereka sambil beradaptasi dengan nilai-nilai di negara sekuler. Krisis multikulturalisme telah mempengaruhi cara komunitas diaspora muslim berinteraksi dengan masyarakat mayoritas. Moderasi beragama menjadi penting dalam konteks ini untuk memfasilitasi integrasi tanpa asimilasi penuh, menjaga keseimbangan antara identitas keagamaan dan nilai-nilai sekuler.

Dalam konteks diaspora, moderasi beragama dapat menjadi alat penting untuk membangun jembatan antara berbagai komunitas. Misalnya, Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag) telah menginisiasi Jaringan Diaspora Penggerak Moderasi Beragama (JDPMB) yang bertujuan untuk memperkuat pemahaman moderat di kalangan mahasiswa Indonesia di luar negeri. Inisiatif ini menunjukkan bahwa pemahaman yang mendalam tentang agama dapat meningkatkan toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Komunitas diaspora sering kali menghadapi tantangan dalam menerapkan toleransi beragama. Mereka mungkin terpapar pada stereotip atau prasangka negatif terhadap agama mereka. Oleh karena itu, penting bagi mereka untuk terlibat dalam dialog lintas agama dan kegiatan komunitas yang mempromosikan pemahaman dan kerjasama. Dialog lintas agama seperti yang dilakukan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Belanda menunjukkan bagaimana interaksi positif dapat memperkuat toleransi.

Implementasi moderasi beragama dan toleransi dapat menghasilkan perubahan sosial yang signifikan dalam komunitas diaspora. Dengan mengedepankan nilai-nilai moderat, komunitas diaspora dapat membangun identitas baru yang inklusif, mengurangi segregasi sosial, dan meningkatkan solidaritas antar anggota komunitas. Misalnya, inisiatif JDPMB tidak hanya bertujuan untuk mempromosikan moderasi beragama tetapi juga untuk menciptakan

citra positif Indonesia di luar negeri sebagai negara dengan mayoritas Muslim yang menjunjung tinggi perdamaian. Hal ini menunjukkan bahwa melalui moderasi dan toleransi, komunitas diaspora dapat memainkan peran aktif dalam memperkuat hubungan antar budaya. Moderasi beragama dan toleransi beragama adalah dua konsep kunci yang sangat penting bagi komunitas diaspora. Dengan menerapkan kedua konsep ini, diaspora tidak hanya dapat mempertahankan identitas budaya mereka tetapi juga berkontribusi pada perubahan sosial positif di masyarakat tempat mereka tinggal. Upaya-upaya seperti JDPMB dan dialog lintas agama menjadi contoh nyata bagaimana moderasi dan toleransi dapat diintegrasikan ke dalam kehidupan sehari-hari di komunitas diaspora.

Moderasi beragama memainkan peran penting dalam mempengaruhi perubahan sosial dalam komunitas diaspora. Dengan mengedepankan toleransi, inklusivitas, dan adaptasi, moderasi beragama dapat membantu individu dan komunitas menavigasi tantangan yang dihadapi dalam lingkungan sosial yang beragam. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami dinamika ini secara lebih mendalam dan mengembangkan strategi yang efektif untuk mempromosikan moderasi beragama dalam komunitas diaspora.

C. Diaspora dan Teori Perubahan Sosial

Konsep diaspora telah menjadi topik yang semakin relevan dalam kajian perubahan sosial, terutama dalam konteks migrasi dan dampaknya terhadap identitas budaya, sosial, dan politik. Diaspora merujuk pada fenomena perpindahan kelompok manusia dari tanah air mereka ke tempat lain, namun tetap mempertahankan keterikatan dengan tanah air asal mereka (Santoso, 2014). Konsep diaspora berkaitan erat dengan teori perubahan sosial, yang mempelajari perubahan struktur, budaya, dan dinamika masyarakat dari waktu ke waktu. Komunitas diaspora, yang terbentuk ketika orang bermigrasi dari tanah air mereka dan menetap di negara lain, mengalami dan mendorong perubahan sosial yang signifikan, memengaruhi negara asal maupun masyarakat penerima. Proses ini dapat dianalisis melalui berbagai lensa dalam teori perubahan sosial, termasuk teori modernisasi, globalisasi, dan hibriditas budaya (Turner & Nasir, 2016).

Menurut Cohen (2022), anggota diaspora cenderung mempertahankan orientasi terhadap tanah air mereka melalui praktik budaya dan agama yang menghubungkan mereka dengan tempat asal. Hal ini menciptakan suatu ikatan sosial yang mengalir melintasi batas negara, yang pada gilirannya memengaruhi perubahan sosial baik di negara asal maupun negara tujuan. Teori perubahan sosial yang menganggap bahwa masyarakat bergerak dan berkembang

berdasarkan dinamika internal dan eksternal sangat relevan untuk memahami bagaimana diaspora berperan dalam proses-proses ini.

Dalam kerangka teori perubahan sosial, diaspora dapat dilihat sebagai aktor yang membawa perubahan baik di dalam komunitasnya sendiri maupun dalam masyarakat tempat mereka beradaptasi. Teori modernisasi yang dikemukakan oleh Talcott Parsons (2010) menyatakan bahwa perubahan sosial terjadi ketika individu atau kelompok bergerak menuju nilai-nilai yang lebih modern dan rasional, termasuk melalui proses akulturasi dalam konteks diaspora. Namun, perspektif ini seringkali mengabaikan peran komunitas diaspora dalam memengaruhi transformasi sosial di kedua belah pihak—baik negara asal maupun negara tujuan. Oleh karena itu, pendekatan teori perubahan sosial yang lebih bersifat transnasional atau global dapat lebih tepat dalam menggambarkan dinamika yang dihadapi oleh komunitas diaspora.

Proses perubahan sosial yang terjadi dalam diaspora sering kali melibatkan integrasi budaya dan penyesuaian sosial. Vertovec (2023) dalam teorinya tentang “*super-diversity*” menjelaskan bagaimana diaspora membawa keragaman budaya yang melampaui batas tradisional dan menciptakan bentuk-bentuk sosial baru. Diaspora tidak hanya beradaptasi dengan masyarakat baru, tetapi mereka juga mempengaruhi dinamika sosial, seperti melalui kegiatan ekonomi, politik, dan budaya di negara tujuan. Di sisi lain, diaspora juga terpengaruh oleh perubahan dalam masyarakat asal mereka, melalui arus informasi dan pengaruh yang datang dari negara tempat mereka tinggal. Hal ini mengarah pada terciptanya bentuk identitas yang hibrida, di mana elemen-elemen budaya asal dan negara tempat tinggal saling bertemu dan mempengaruhi satu sama lain.

Selain itu, diaspora memainkan peran penting dalam perubahan sosial dengan membawa perspektif baru terhadap isu-isu politik dan ekonomi. Giddens (1990) dalam teori globalisasinya menjelaskan bahwa aliran orang, ide, dan budaya melintasi batas negara berkontribusi pada pembentukan tatanan sosial yang lebih global. Diaspora, dengan pengalaman hidup mereka yang berada di dua dunia yang berbeda, sering kali menjadi jembatan antara negara asal dan negara tujuan dalam hal politik dan kebijakan. Mereka dapat berperan dalam memperkenalkan perubahan sosial melalui jaringan yang mereka bangun, baik untuk memperjuangkan hak-hak imigran maupun untuk memberikan kontribusi dalam pembangunan negara asal, melalui remittances atau proyek-proyek kemanusiaan.

Perubahan sosial yang ditimbulkan oleh diaspora juga dapat dilihat dalam konteks transformasi nilai-nilai dan identitas. Bhabha (1994) mengemukakan konsep “ruang ketiga” yang menggambarkan bagaimana identitas diaspora berkembang melalui proses negosiasi

antara tradisi asal dan budaya negara tempat mereka tinggal. Proses ini tidak hanya menciptakan identitas baru yang hibrida, tetapi juga memungkinkan terbentuknya budaya global yang lebih inklusif dan beragam. Oleh karena itu, diaspora berfungsi sebagai agen perubahan sosial yang dinamis, baik di dalam komunitas mereka sendiri maupun dalam masyarakat yang lebih luas, yang pada akhirnya berkontribusi pada perubahan sosial yang lebih besar di tingkat global.

Teori hibriditas budaya, seperti “ruang ketiga” dari Homi Bhabha tersebut, menekankan peran transformatif diaspora dalam menciptakan identitas sosial baru. Komunitas diaspora berada di ruang yang menggabungkan pengaruh budaya dari tanah air dan negara penerima, menghasilkan ekspresi budaya hibrida yang menantang batasan identitas tradisional. Negosiasi yang terus berlangsung antara budaya ini di dalam komunitas diaspora mendorong perubahan sosial dengan menciptakan bentuk budaya baru dan mempromosikan toleransi, adaptabilitas, dan inklusi di antara kelompok-kelompok sosial dan budaya yang berbeda. Dengan demikian, diaspora menjelaskan teori perubahan sosial dengan menggambarkan bagaimana migrasi dan pertukaran budaya mengubah identitas sosial dan hubungan di seluruh masyarakat (Hollinshead, 1998).

Dalam konteks teori modernisasi, komunitas diaspora sering kali beradaptasi dan mengasimilasi aspek-aspek budaya, bahasa, dan norma masyarakat penerima sambil tetap mempertahankan elemen warisan budaya mereka. Adaptasi ganda ini merupakan contoh proses modernisasi, di mana individu atau komunitas mengintegrasikan aspek-aspek baru dan modern sambil menjaga hubungan dengan praktik tradisional. Dalam hal ini, kelompok diaspora memfasilitasi perubahan sosial dengan menggabungkan yang modern dan tradisional, menciptakan identitas budaya dinamis yang beradaptasi dengan lingkungan baru sambil mempertahankan hubungan dengan masa lalu (Safran, 1991).

Dari perspektif globalisasi, komunitas diaspora berkontribusi pada pertukaran budaya global, di mana ide, nilai, dan norma sosial melampaui batas-batas nasional. Para ahli sosial seperti Anthony Giddens (1990) berpendapat bahwa globalisasi mendorong keterhubungan, dan komunitas diaspora menjadi pusat dalam proses ini. Komunitas diaspora mentransmisikan praktik budaya, keyakinan agama, dan ide politik kembali ke negara asal mereka dan berbagi aspek budaya tanah air mereka dengan masyarakat penerima. Pertukaran transnasional ini mengarah pada difusi budaya dan perubahan sosial dalam skala global, ketika masyarakat menjadi semakin terhubung dan beragam (Reis, 2004).

BAB III AUSTRALIA DAN ORGANISASI KEAGAMAAN DIASPORA INDONESIA

Membahas Australia dan keragaman masyarakatnya tentu menjadi diskusi yang sangat menarik, terutama jika menelusuri sejarah terbentuknya negara tersebut. Sebagai benua yang didominasi oleh komunitas masyarakat pendatang dari berbagai penjuru dunia, Australia berkembang menjadi salah satu negara paling heterogen dan multikultural di dunia. Beragam budaya, bahasa, dan tradisi hadir karena arus migrasi yang intensif sejak masa kolonisasi. Sementara itu, keberadaan penduduk asli, yakni suku Aborigin, hanya mencakup persentase kecil dari total populasi, sehingga memperkuat narasi dominasi komunitas pendatang. Keanekaragaman ini kemudian menciptakan berbagai komunitas yang terorganisasi berdasarkan asal negara, etnis, ras, dan agama, yang semuanya memainkan peran signifikan dalam membentuk dinamika kehidupan sosial di Australia. Tradisi dan kepercayaan yang dibawa oleh para pendatang tetap lestari dan terpadu ke dalam masyarakat, membuat interaksi sehari-hari di Australia penuh dengan warna dan keunikan budaya.

Masyarakat Indonesia, dengan berbagai tujuan dan kepentingan, menjadi bagian penting dari komunitas internasional yang bermukim di Australia, tersebar di enam negara bagian utama. Keberadaan komunitas diaspora Indonesia tidak hanya memperkaya keragaman budaya di Australia tetapi juga berkontribusi dalam berbagai aspek sosial, ekonomi, dan budaya di negeri tersebut. Meskipun jumlah mereka relatif kecil jika dibandingkan dengan komunitas diaspora dari negara lain, keberadaan mereka tetap signifikan dalam menciptakan jaringan sosial dan memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia. Keragaman komunitas diaspora Indonesia ini tercermin dalam berbagai bentuk perkumpulan, seperti organisasi berbasis kedaerahan yang menjaga tradisi dan budaya asal, komunitas profesional yang aktif dalam dunia kerja, kelompok mahasiswa yang sering terlibat dalam kegiatan akademis dan sosial, serta kelompok-kelompok keagamaan yang mempererat solidaritas spiritual. Melalui berbagai aktivitas ini, komunitas diaspora Indonesia memberikan kontribusi nyata dalam memperkenalkan budaya Indonesia.

Bagian ini akan membahas Gambaran umum mengenai keragaman Australia, dan secara khusus akan dibahas keragaman yang ada di Sydney. Kemudian dilanjutkan dengan Gambaran komunitas diasporan Indonesia yang ada di Sydney dengan berbagai organisasi atau perkumpulan Masyarakat diasporan Indonesia. Secara khusus bagian ini akan bentuk-bentuk

moderasi beragama kelompok diaspora Indonesia di Sydney, dan tipologi kesadaran beragama kelompok-kelompok tersebut.

A. Australia dan Keragaman Masyarakat

Australia, benua yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, adalah negara persemakmuran Inggris Raya yang merdeka dan menduduki satu benua penuh. Dikenal sebagai “benua terakhir” dan juga terkecil di dunia, Australia memiliki populasi sekitar 26,3 juta jiwa berdasarkan sensus terbaru tahun 2022. Sejarahnya yang panjang dimulai dengan kehadiran bangsa Aborigin, masyarakat asli yang telah menghuni benua ini selama puluhan ribu tahun dengan pola hidup nomaden yang terdistribusi di berbagai wilayah, dari padang gurun hingga hutan pesisir.

Sebelum kolonisasi oleh bangsa Eropa, benua ini juga sempat dikunjungi oleh komunitas Makassar (Macassarese) pada abad ke-16 dan ke-17. Komunitas Makassar dari Sulawesi Selatan dikenal sebagai pelaut handal yang melakukan perjalanan ke pesisir utara Australia untuk berdagang teripang dengan penduduk lokal. Mereka diyakini sebagai komunitas Islam pertama yang tiba di Australia, jauh sebelum kedatangan bangsa Eropa, dan membangun interaksi yang damai dengan masyarakat Aborigin di wilayah tersebut (Saeed, 2004:7).

Kedatangan kolonial Eropa dimulai secara signifikan dengan ekspedisi Kapten Arthur Phillip pada tahun 1788, yang memimpin rombongan pertama dari Kerajaan Inggris untuk mendirikan koloni di Australia. Proses kolonisasi ini membawa perubahan besar, mengakibatkan komunitas Aborigin mengalami marginalisasi dan kehilangan tanah serta sumber daya yang menjadi bagian penting dari kehidupan mereka. Selama abad ke-19, komunitas lainnya, seperti Afghan Cameleers, juga datang untuk berperan dalam pembangunan jalur transportasi pedalaman dengan menunggang unta, yang memudahkan pengangkutan barang di area tandus Australia.

Meskipun memiliki warisan budaya yang kaya, komunitas Aborigin tetap menjadi kelompok minoritas yang terpinggirkan dalam struktur sosial Australia. Berdasarkan sensus tahun 2011, populasi Aborigin hanya sekitar 550 ribu jiwa, dan pada sensus tahun 2016, jumlah tersebut meningkat sedikit menjadi 649.171 jiwa, yang mewakili hanya 2,8 persen dari total populasi Australia (Australian Bureau of Statistics, 2016). Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun ada pertumbuhan, perkembangan jumlah komunitas Aborigin masih relatif lambat, dan mereka terus menghadapi tantangan dalam berbagai aspek, termasuk kesejahteraan sosial, kesehatan, dan pendidikan.

Australia, yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari gurun pasir, memiliki pola pemukiman yang terkonsentrasi di daerah perkotaan. Menurut Australian Bureau of Statistics (ABS), sekitar dua dari tiga penduduk Australia tinggal di kawasan urban. Hal ini disebabkan oleh kondisi geografis Australia yang didominasi oleh tanah kering, kurang subur, dan jarang ditumbuhi pepohonan lebat. Hanya daerah-daerah tertentu di sepanjang pantai dan wilayah subur lainnya yang cocok untuk permukiman, sehingga kawasan ini berkembang menjadi pusat populasi dan aktivitas ekonomi. Di daerah yang lebih subur ini, sektor pertanian yang beradaptasi dengan iklim kering tumbuh subur, seperti perkebunan anggur, jeruk, apel, stroberi, blueberry, alpukat, dan sayur-mayur. Peternakan juga menjadi sektor penting, dengan peternakan sapi, kambing, dan kuda tersebar di berbagai wilayah. Hewan liar seperti kanguru hidup dalam jumlah besar di habitat alami mereka, sementara populasi koala terus menurun akibat kehilangan habitat dan ancaman lainnya.

Sejak kedatangan banyak imigran, Australia telah menjadi rumah bagi lebih dari 270 kelompok etnis dari seluruh penjuru dunia. Hingga abad ke-20, populasi Australia didominasi oleh keturunan Eropa, khususnya etnis Inggris atau Anglo-Celtic, yang mencerminkan sejarah kolonisasi Inggris. Namun, perubahan mulai terjadi pada pertengahan abad ke-19 dengan masuknya etnis China yang bekerja di sektor pertambangan selama masa demam emas. Meskipun sebagian dari mereka kembali ke China setelah masa kerja mereka berakhir, banyak yang memilih untuk menetap, membangun keluarga, dan berkontribusi pada keberagaman masyarakat Australia. Pada akhir abad ke-20, migrasi dari Asia meningkat secara signifikan, dengan komunitas besar dari China, India, Vietnam, Filipina, Lebanon, dan negara-negara Timur Tengah lainnya datang dan menetap.

Peningkatan migrasi non-Eropa ini sempat menimbulkan respons kebijakan kontroversial dari pemerintah Australia, yang memperkenalkan *White Australia Policy* atau kebijakan tanah untuk orang kulit putih. Kebijakan ini bertujuan untuk membatasi imigrasi dari Asia dan mempertahankan dominasi etnis Eropa. Meskipun kebijakan ini mulai dilonggarkan pada paruh kedua abad ke-20, jejak sejarahnya tetap memengaruhi perdebatan tentang identitas nasional dan hubungan antar-ras di Australia. Kini, Australia dikenal sebagai negara yang multikultural, meskipun warisan sejarah migrasi dan kolonialisme tetap menjadi bagian penting dari narasi sosial dan politiknya.

Setelah Perang Dunia II, kondisi Australia sangat memprihatinkan. Jumlah penduduk mengalami penurunan yang signifikan akibat kematian lebih dari 40 ribu orang, dan tingkat pertumbuhan populasi hanya mencapai 1 persen per tahun (Britannica.com). Kekurangan tenaga kerja menjadi salah satu masalah utama yang mengancam pembangunan ekonomi

negara. Untuk mengatasi krisis ini, pemerintah Australia meluncurkan kebijakan baru yang berfokus pada imigrasi besar-besaran dari Eropa. Pada awalnya, target utama kebijakan ini adalah mendatangkan imigran dari Inggris, tetapi rencana tersebut menghadapi tantangan. Dengan membaiknya kondisi ekonomi di Inggris pasca-perang, semakin sedikit warga Inggris yang tertarik berimigrasi ke Australia.

Akibatnya, pemerintah Australia mulai mengalihkan perhatian mereka ke negara-negara Eropa lain yang terdampak oleh pendudukan Soviet, seperti Polandia, Yugoslavia, Latvia, Lituania, Estonia, Ukraina, Cekoslowakia, dan Hongaria. Imigran dari negara-negara ini mulai tiba di Australia, memberikan tenaga kerja yang sangat dibutuhkan dan mulai membentuk fondasi masyarakat multikultural Australia, meskipun tetap didominasi oleh etnis kulit putih Eropa pada masa itu. Kebijakan ini secara perlahan mulai mengubah demografi Australia, dengan berbagai budaya dan tradisi Eropa mulai memengaruhi kehidupan sehari-hari di negeri tersebut.

Era 1970-an menjadi titik penting dalam sejarah Australia sebagai negara multikultural. Kebijakan imigrasi yang lebih terbuka, termasuk untuk komunitas Asia, mengubah lanskap sosial secara besar-besaran. Australia menjadi tujuan baru bagi para pencari suaka yang melarikan diri dari konflik dan perang. Salah satu gelombang imigrasi terbesar terjadi setelah berakhirnya Perang Vietnam pada tahun 1975, ketika ribuan pengungsi Vietnam tiba di pesisir utara Australia, khususnya di Darwin, dengan menggunakan perahu. Gelombang imigrasi terus berlanjut hingga tahun 1980-an, dan pada tahun 1985, tercatat sekitar 75 ribu orang dari Asia Tenggara, termasuk pengungsi dari Vietnam, Laos, dan Kamboja, telah menetap di Australia.

Tren ini terus meningkat hingga tahun 1990-an, dan pada sensus Australia tahun 1998, 33 persen dari total imigran berasal dari Asia (Britannica.com). Ini menandakan perubahan besar dalam demografi penduduk Australia, di mana masyarakat tidak lagi didominasi oleh kulit putih Eropa tetapi juga mencakup komunitas besar dari Asia. Keberagaman ini telah memperkaya budaya Australia, menjadikannya sebuah masyarakat yang multikultural dengan beragam tradisi, bahasa, dan nilai-nilai yang mencerminkan sejarah panjang imigrasi yang beragam.

Victoria dan New South Wales adalah dua negara bagian yang paling diminati oleh para imigran di Australia. Kedua wilayah ini tidak hanya menjadi pusat kegiatan ekonomi, pendidikan, dan budaya, tetapi juga simbol keberagaman etnis yang khas. Kota-kota besar seperti Melbourne di Victoria dan Sydney di New South Wales menjadi magnet bagi para imigran karena menawarkan peluang kerja yang luas, fasilitas pendidikan berkualitas, dan

komunitas internasional yang dinamis. Tidak mengherankan jika kepadatan penduduk di kedua negara bagian ini cukup tinggi, dan komposisi etniknya sangat beragam.

Victoria dan New South Wales menjadi cerminan nyata dari keragaman Australia yang terus berkembang. Berbagai kelompok etnis dari seluruh dunia, termasuk Eropa, Asia, Timur Tengah, dan Afrika, berkumpul dan hidup berdampingan, menciptakan masyarakat multikultural yang aktif dan saling berinteraksi. Pasar-pasar lokal, festival budaya, dan berbagai acara komunitas memperlihatkan kekayaan budaya yang hadir di wilayah ini, menciptakan lingkungan yang penuh warna dan toleransi.

Namun, tidak hanya Victoria dan New South Wales yang merefleksikan keberagaman ini. Hampir semua negara bagian di Australia memiliki populasi yang mencerminkan campuran budaya global. Berdasarkan data Britannica tahun 2007, komposisi etnik di Australia menunjukkan dominasi kelompok kulit putih lebih dari 90 persen, sementara komunitas Asia menyumbang sekitar 7,3 persen, dan penduduk Aborigin, yang merupakan penduduk asli Australia, hanya sekitar 2,5 persen. Meski begitu, tren imigrasi modern telah meningkatkan kehadiran kelompok-kelompok etnik lain, menambah dimensi baru dalam struktur sosial dan kultural Australia. Berbagai inisiatif dan kebijakan pemerintah terus mendukung integrasi dan penghargaan terhadap keragaman, yang menjadikan Australia sebagai contoh menarik dari negara multikultural di dunia.

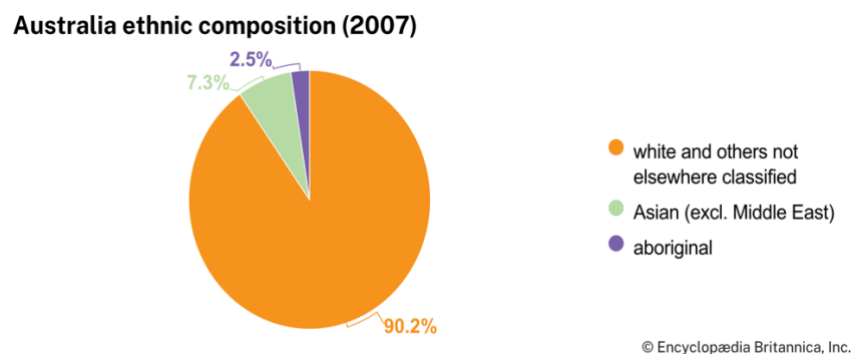


Figure 1. Komposisi Etnik di Australia

Jumlah penduduk Australia terus berkembang dengan komposisi etnis yang semakin beragam, terutama karena banyak imigran yang kemudian menetap secara permanen dan berkeluarga. Generasi baru yang lahir dari keluarga imigran ini membawa warisan budaya yang lebih kompleks, menciptakan jaringan komunitas yang memperkaya kehidupan sosial dan budaya Australia. Anak-anak imigran sering tumbuh dengan identitas hibrid, yang mencakup

elemen tradisi asal orang tua mereka, sekaligus nilai-nilai dan gaya hidup khas Australia. Proses ini secara bertahap memperdalam keberagaman demografis di seluruh wilayah negara.

Data dari tahun 2011 yang dihimpun Britannica memberikan gambaran yang jelas tentang perkembangan etnik di Australia berdasarkan asal kelahiran penduduk. Pada tahun itu, tercatat peningkatan yang signifikan dalam jumlah penduduk yang lahir di luar Australia, khususnya dari Asia dan kawasan lain di luar Eropa. Sementara kelompok keturunan Inggris dan Eropa masih mendominasi, komunitas dari Tiongkok, India, dan negara-negara Asia Tenggara terus bertambah, menciptakan perubahan demografis yang cukup besar. Bahkan, kehadiran komunitas dari Timur Tengah dan Afrika mulai terasa, yang semakin memperkaya keragaman masyarakat Australia.

Perubahan ini tidak hanya memengaruhi komposisi penduduk, tetapi juga tercermin dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, seperti makanan, bahasa, tradisi, dan tempat ibadah. Kota-kota besar seperti Sydney, Melbourne, dan Brisbane kini dikenal sebagai pusat budaya global, di mana masakan Asia berdampingan dengan pub Inggris, dan perayaan Imlek bersanding dengan festival tradisional Australia. Peningkatan populasi imigran ini juga memengaruhi kebijakan pemerintah, yang harus lebih inklusif dalam menyediakan layanan publik, pendidikan, dan program integrasi sosial. Secara keseluruhan, perkembangan ini menjadikan Australia sebagai salah satu negara dengan keragaman etnik yang paling dinamis di dunia.

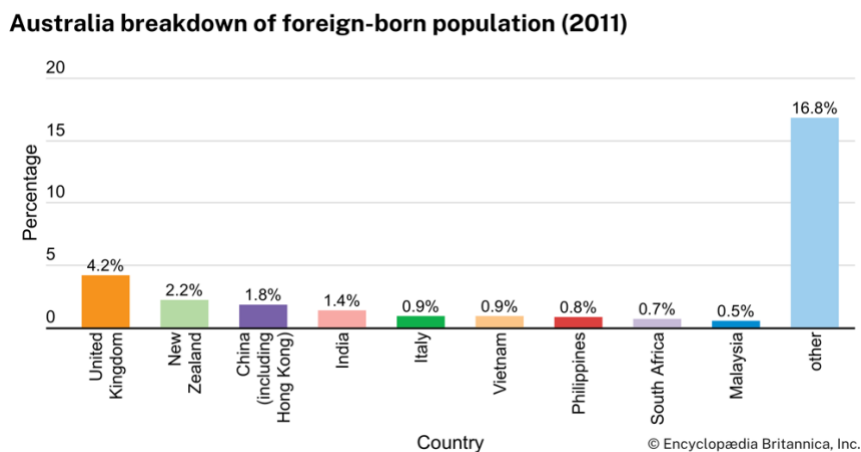


Figure 2. Populasi Kelahiran Berdasar Asal Negara

Data di atas menggarisbawahi dominasi keturunan Inggris dan New Zealand dalam populasi Australia, yang menempati posisi tertinggi dibandingkan dengan kelompok etnik lainnya. Di samping itu, kehadiran komunitas dari China dan India terus menunjukkan peningkatan yang signifikan. Antara tahun 2011 dan 2016, jumlah penduduk kelahiran China

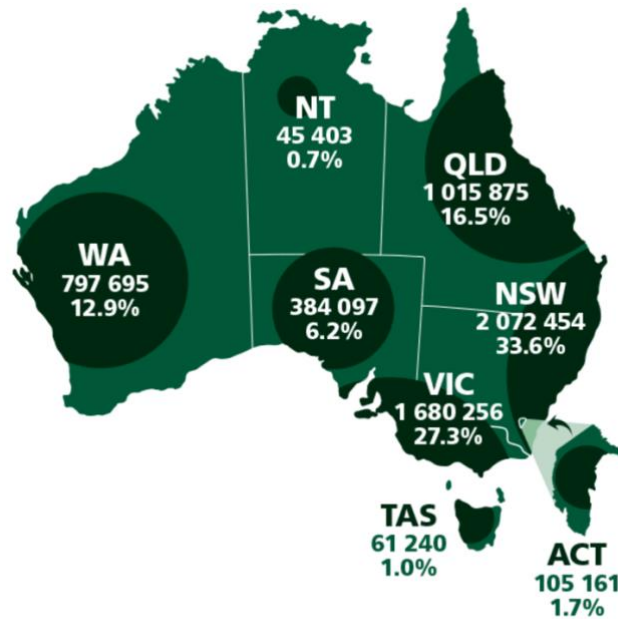
naik dari 1,8% menjadi 2,2%, sementara jumlah penduduk kelahiran India meningkat dari 1,4% menjadi 1,9% (Australian Bureau of Statistics, 2016). Lonjakan ini mencerminkan tren migrasi yang makin berkembang, dengan lebih banyak orang dari Asia yang memilih Australia sebagai tempat tinggal untuk mencari peluang pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan yang lebih baik.

Keberagaman etnik ini tersebar merata di enam negara bagian utama, ditambah kawasan Australian Capital Territory (ACT) di Canberra. New South Wales (NSW) menjadi negara bagian dengan jumlah penduduk terbesar, menyumbang sekitar 22,6% dari total populasi, sementara Victoria memiliki komposisi penduduk terbesar kedua dengan 27,3%. Queensland menempati posisi ketiga dengan 16,5%, disusul Western Australia sebesar 12,9%, dan South Australia dengan 6,2%. Australian Capital Territory, sebagai pusat pemerintahan nasional, memiliki persentase populasi sebesar 1,7%, sedangkan Tasmania dan Northern Territory masing-masing menyumbang 1,0% dan 0,7% dari populasi Australia.

Sebaran populasi ini menunjukkan dinamika yang unik di setiap negara bagian. New South Wales dan Victoria, yang menjadi magnet bagi imigran internasional, terkenal dengan lingkungan perkotaan yang sangat beragam dan kehidupan multikultural yang kaya. Di kedua negara bagian ini, komunitas etnik berkontribusi pada kekayaan budaya yang terlihat dalam berbagai festival, kuliner, dan institusi pendidikan yang inklusif. Sementara itu, wilayah seperti Queensland dan Western Australia, meski lebih jarang penduduknya, terus berkembang sebagai pusat ekonomi dan pertanian yang didukung oleh kehadiran pekerja imigran.

Keberagaman demografis yang terus berkembang di Australia mendorong pemerintah dan masyarakat untuk menghadapi tantangan baru dalam hal integrasi sosial, layanan publik, dan kebijakan multikultural. Upaya untuk memastikan inklusi sosial bagi semua kelompok etnik menjadi prioritas penting, dengan berbagai inisiatif yang mendukung pemahaman lintas budaya dan harmoni sosial di seluruh wilayah negara.

OVERSEAS-BORN POPULATION RESIDING IN EACH STATE AND TERRITORY 2016(a)



(a) Usual residence Census counts. Excludes overseas visitors.
Source: ABS Census of Population and Housing, 2016

Figure 3. Populasi Berdasarkan Negara Bagian

Keragaman etnik di Australia, yang berasal dari berbagai gelombang migrasi, tidak hanya berdampak pada aspek demografis tetapi juga membawa konsekuensi penting dalam hal keragaman keyakinan dan agama. Menurut data statistik sensus Australia tahun 2016, lebih dari separuh penduduk Australia mengidentifikasi diri mereka dengan agama Kristen, yang terdiri dari beberapa denominasi utama. Komunitas Katolik adalah yang terbesar, mencakup 22,6% dari populasi, diikuti oleh penganut Anglikan sebesar 13,3%, serta kelompok Kristen lainnya yang menyumbang 16,3%.

Namun, keanekaragaman agama di Australia tidak berhenti di sana. Keberadaan komunitas agama non-Kristen semakin meningkat, mencerminkan arus migrasi yang datang dari kawasan Asia dan Timur Tengah. Agama Islam menjadi yang paling dominan di antara kelompok agama non-Kristen, dengan persentase 2,6%, diikuti oleh agama Buddha sebesar 2,4%, dan Hindu yang mencapai 1,9%. Komunitas Sikh, meskipun masih tergolong kecil, telah tumbuh hingga mencapai 0,5%, sementara komunitas Yahudi berjumlah 0,4%, bersama dengan kelompok keyakinan lainnya yang meliputi 0,4% dari total populasi.

Selain itu, terdapat tren yang signifikan dalam jumlah orang yang menyatakan tidak memiliki afiliasi agama, mencapai 30,1% dari populasi. Angka ini menunjukkan adanya pergeseran sosial yang mencerminkan sekularisasi yang berkembang di masyarakat Australia, khususnya di kalangan generasi muda yang lebih cenderung mengadopsi pandangan dunia

yang sekuler atau agnostik. Fenomena ini menyoroti perubahan lanskap spiritual di Australia, yang menjadi lebih pluralistik dan beragam seiring waktu.

Keragaman keyakinan di Australia juga tercermin dalam kehidupan sosial dan budaya. Kota-kota besar seperti Sydney dan Melbourne menjadi pusat bagi banyak komunitas keagamaan, di mana masjid, kuil, dan gereja berdiri berdampingan, melambangkan koeksistensi dan toleransi antar umat beragama. Di tengah keberagaman ini, pemerintah Australia terus berupaya menjaga harmoni sosial melalui kebijakan yang mendukung kebebasan beragama dan menghormati tradisi spiritual yang beragam. Berbagai perayaan keagamaan, seperti Idul Fitri, Diwali, dan Vesak, diakui dan dirayakan secara terbuka, menandakan penerimaan terhadap berbagai tradisi keagamaan.

Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam upaya mengintegrasikan komunitas-komunitas yang berbeda latar belakang budaya dan kepercayaan. Isu-isu seperti Islamofobia, diskriminasi rasial, dan ketegangan antar kelompok keagamaan kadang-kadang muncul, menuntut upaya terus-menerus dari masyarakat sipil dan pemerintah untuk mempromosikan dialog antaragama dan saling pengertian. Secara keseluruhan, keragaman keyakinan ini memperkaya identitas Australia sebagai negara multikultural, di mana perbedaan dihargai dan berbagai tradisi agama dapat hidup berdampingan dengan damai.

Religious Affiliation		Population ('000)	Population (%)
Christian	Catholic	5 291.8	22.6
	Anglican	3 101.2	13.3
	Other Christian	3 808.6	16.3
	Total	12 201.6	52.1
Other Religions	Islam	604.2	2.6
	Buddhism	563.7	2.4
	Hinduism	440.3	1.9
	Sikhism	125.9	0.5
	Judaism	91.0	0.4
	Other	95.7	0.4
	Total	1 920.8	8.2
No Religion ^a		7 040.7	30.1
Australia ^b		23 401.9	100

a No religion includes secular and other spiritual beliefs.

b As religion was an optional question, the total for Australia will not equal the sum of the items above it.

Source: ABS Census of Population and Housing, 2016

Figure 4. Afiliasi Agama Masyarakat Australia

Keragaman budaya di Australia terus dilestarikan dan dirayakan oleh berbagai komunitas etnik yang mempertahankan warisan budaya mereka. Komunitas-komunitas migran tidak hanya hadir sebagai bagian dari populasi, tetapi juga membawa serta tradisi, bahasa, dan arsitektur yang khas dari negara asal mereka. Budaya dari berbagai penjuru dunia menjadi

bagian dari lanskap sosial dan fisik Australia, tercermin dalam kehidupan sehari-hari dan elemen budaya material yang terlihat di banyak kawasan perkotaan.

Salah satu contoh paling menonjol dari pelestarian budaya ini adalah komunitas Tionghoa, yang menghadirkan simbol-simbol budaya dalam berbagai aspek kehidupan. Di hampir setiap negara bagian, terutama di Victoria dan New South Wales, terdapat kawasan China Town yang menjadi pusat perdagangan dan budaya Tionghoa. Area ini dipenuhi dengan toko-toko yang menjual barang dagangan khas Tionghoa, restoran yang menyajikan masakan autentik, dan dekorasi yang mencolok, seperti lampion merah dan tulisan Hanzi yang memperkuat identitas budaya mereka. Keberadaan China Town adalah bukti nyata bagaimana komunitas Tionghoa mempertahankan tradisi mereka di tengah masyarakat multikultural Australia.

Hal yang serupa berlaku untuk komunitas-komunitas lain, seperti Vietnam, India, Lebanon, dan banyak lagi. Tradisi-tradisi budaya dihidupkan melalui arsitektur bangunan, makanan khas, dan kegiatan sosial komunitas. Desain rumah ibadah seperti masjid, kuil, dan klenteng mempertahankan elemen arsitektur yang mencerminkan asal-usul komunitas tersebut. Sebagai contoh, masjid-masjid milik komunitas Lebanon, Turki, atau Bosnia-Herzegovina memiliki desain unik yang merepresentasikan budaya Islam dari negara mereka, sementara klenteng-klenteng Tionghoa menampilkan dekorasi khas yang mencerminkan kepercayaan dan tradisi leluhur mereka. Bahkan, bahasa yang digunakan dalam interaksi sehari-hari di antara komunitas ini juga tetap hidup. Bahasa seperti Mandarin, Arab, dan Vietnam terus digunakan dalam kehidupan sosial, melengkapi dominasi bahasa Inggris sebagai bahasa mayoritas.

Menurut Australian Bureau of Statistics (ABS) pada tahun 2016, bahasa Inggris digunakan oleh 72,7% populasi sebagai bahasa utama, namun bahasa-bahasa lain juga sangat signifikan, mencerminkan keragaman demografis negara ini. Mandarin digunakan oleh 2,5% dari populasi, diikuti oleh Cantonese (1,2%), Arab (1,4%), dan Vietnam (1,2%). Keanekaragaman bahasa ini memperkaya kehidupan sosial Australia dan menunjukkan betapa pentingnya identitas budaya bagi komunitas-komunitas tersebut. Australia pun diakui sebagai salah satu negara dengan kondisi sosio-kultural yang sangat heterogen, di mana keberagaman tidak hanya dihormati tetapi juga dijadikan bagian integral dari identitas nasional.

Keberagaman ini menciptakan peluang dan tantangan. Di satu sisi, keanekaragaman budaya memperkuat kreativitas, inovasi, dan daya tarik pariwisata. Australia menjadi tujuan yang menarik bagi wisatawan yang ingin mengalami beragam tradisi dan masakan dari berbagai budaya tanpa harus meninggalkan negara tersebut. Di sisi lain, pemerintah dan masyarakat harus terus berupaya menjaga harmoni sosial dan mengatasi potensi konflik

budaya, dengan mendorong dialog antarbudaya dan mengimplementasikan kebijakan yang adil bagi semua komunitas. Hasilnya adalah sebuah negara yang terus berkembang menjadi mozaik budaya, di mana perbedaan dihargai dan berbagai tradisi hidup berdampingan dengan damai, menjadikan Australia contoh nyata dari masyarakat multikultural yang dinamis.

B. Organisasi-Organisasi Masyarakat Indonesia Diaspora di Australia

Masyarakat diaspora Indonesia yang tinggal di Australia mencapai sekitar 100 ribu orang berdasarkan data tahun 2024. Mereka tersebar di berbagai negara bagian, dan keberadaan mereka membentuk jaringan komunitas yang dinamis dan beragam. Komunitas diaspora ini terbentuk melalui berbagai organisasi, baik yang dibuat secara mandiri oleh anggota komunitas maupun yang berafiliasi dengan organisasi atau lembaga dari Indonesia. Secara garis besar, terdapat tiga kelompok utama dalam komunitas diaspora Indonesia, yaitu komunitas berbasis kedaerahan, komunitas kemahasiswaan atau kepelajaran, dan komunitas keagamaan.

Komunitas berbasis kedaerahan umumnya dibentuk oleh warga Indonesia yang memiliki latar belakang daerah asal yang sama, seperti Jawa Barat, Jawa Timur, Minang, atau lainnya. Komunitas ini bertujuan untuk menjaga dan melestarikan tradisi, bahasa, serta budaya khas daerah masing-masing. Kegiatan yang dilakukan meliputi perayaan hari besar daerah, kegiatan budaya seperti pertunjukan seni tari atau musik, dan acara kuliner khas. Komunitas ini juga berperan dalam memberikan dukungan sosial kepada anggotanya, seperti membantu proses adaptasi bagi pendatang baru atau memberikan bantuan dalam situasi darurat.

Kelompok kemahasiswaan atau kepelajaran, di sisi lain, didominasi oleh mahasiswa Indonesia yang menempuh pendidikan di berbagai universitas di Australia. Organisasi ini biasanya berfokus pada pengembangan akademik, jaringan profesional, serta solidaritas antar mahasiswa. Kegiatan yang diadakan mencakup seminar akademik, diskusi ilmiah, bimbingan karir, dan acara sosial untuk mempererat hubungan antar pelajar Indonesia. Selain itu, kelompok ini juga sering bekerja sama dengan pihak universitas atau pemerintah Indonesia untuk mempromosikan pendidikan dan budaya Indonesia di Australia.

Komunitas berbasis keagamaan memainkan peran penting dalam menjaga nilai-nilai spiritual dan keagamaan di kalangan diaspora Indonesia. Mereka mengadakan berbagai kegiatan keagamaan seperti pengajian, diskusi keagamaan, perayaan hari besar agama, dan program sosial keagamaan. Komunitas ini mencakup berbagai agama, seperti Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha, yang semua berupaya memfasilitasi kebutuhan spiritual anggotanya sekaligus mempererat solidaritas melalui kegiatan-kegiatan religius. Masjid-masjid dan tempat

ibadah komunitas diaspora menjadi pusat aktivitas keagamaan, sering kali berfungsi pula sebagai tempat bertukar cerita dan pengalaman bagi para anggotanya.

Menariknya, keanggotaan dalam kelompok-kelompok ini sering kali beririsan. Seorang mahasiswa, misalnya, bisa menjadi anggota dalam komunitas berbasis kedaerahan dan juga aktif dalam kelompok keagamaan atau organisasi mahasiswa. Hal ini wajar, mengingat tujuan dan kepentingan dari masing-masing komunitas berbeda-beda. Komunitas kedaerahan mungkin bertujuan untuk melestarikan budaya, sementara kelompok keagamaan berfokus pada penguatan iman dan spiritualitas, dan organisasi mahasiswa mendorong pengembangan akademik dan profesional. Kombinasi ini mencerminkan fleksibilitas dan solidaritas tinggi di antara masyarakat diaspora Indonesia di Australia, yang mampu menyesuaikan diri dengan beragam kebutuhan sambil tetap mempertahankan identitas dan budaya asal mereka.

Perpaduan dan interaksi di antara berbagai komunitas ini menciptakan lingkungan sosial yang kuat dan beragam, di mana solidaritas menjadi fondasi yang memungkinkan anggotanya saling mendukung satu sama lain. Komunitas-komunitas ini tidak hanya membantu diaspora Indonesia dalam menavigasi kehidupan di luar negeri tetapi juga memperkuat hubungan dengan tanah air. Dengan menjaga tradisi, mempererat ikatan sosial, dan mengembangkan potensi anggota komunitas, diaspora Indonesia di Australia terus memperkaya keberagaman budaya di negara tersebut dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi kedua negara.

Dalam penelitian ini, komunitas diaspora Indonesia di Australia dipilah berdasarkan kelompok keagamaan saja. Pembatasan ini dilakukan karena keterbatasan waktu penelitian, yang tidak memungkinkan peneliti untuk mencermati semua komunitas diaspora yang beragam. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada dua organisasi keagamaan utama dan satu organisasi diaspora umum. Organisasi yang dimaksud adalah Pimpinan Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCI NU) dan Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah (PCIM), serta satu organisasi diaspora, yaitu Indonesian Diaspora Network (IDN).

Pemilihan PCI NU dan PCIM sebagai fokus penelitian didasarkan pada fakta bahwa kedua organisasi tersebut memiliki pengaruh yang signifikan dan diikuti oleh banyak anggota masyarakat Islam Indonesia di Australia. PCI NU dan PCIM mewakili komunitas Islam yang moderat, yang dikenal dengan pendekatan inklusif dan toleran terhadap keberagaman. Dengan keterlibatan yang kuat dalam aktivitas keagamaan dan sosial, kedua organisasi ini memainkan peran penting dalam membina kehidupan spiritual dan mendukung anggotanya dalam menghadapi tantangan sebagai diaspora. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana kedua organisasi keagamaan ini memelihara tradisi keislaman yang moderat di lingkungan

multikultural seperti Australia dan bagaimana mereka membangun jaringan serta solidaritas di antara anggota komunitas.

Sementara itu, pemilihan Indonesian Diaspora Network (IDN) sebagai perwakilan organisasi diaspora bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih luas tentang komunitas Indonesia di Australia tanpa mengacu pada identitas keagamaan tertentu. IDN berfungsi sebagai platform yang menyatukan masyarakat Indonesia dari berbagai latar belakang, baik agama, budaya, maupun profesi. Organisasi ini berfokus pada pengembangan jejaring sosial, ekonomi, dan budaya di antara diaspora Indonesia, serta memperkuat hubungan dengan tanah air. Dengan IDN, penelitian ini berupaya melihat bagaimana komunitas diaspora yang bersifat umum ini berperan dalam mendukung kepentingan bersama, mengorganisasi kegiatan sosial dan budaya, serta memperkuat rasa kebersamaan di antara para anggota.

Dengan memfokuskan penelitian pada PCI NU, PCIM, dan IDN, diharapkan hasilnya dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang dinamika komunitas keagamaan moderat dan diaspora secara umum di Australia. Penelitian ini juga akan mengungkap bagaimana ketiga organisasi ini berkontribusi dalam mempertahankan identitas keagamaan dan budaya Indonesia, sekaligus beradaptasi dengan lingkungan sosial Australia yang multikultural.

1) Pimpinan Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCI NU) Australia-New Zealand.

Pimpinan Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCI NU) Australia-New Zealand merupakan salah satu cabang organisasi keagamaan yang memainkan peran penting dalam komunitas diaspora Indonesia di kawasan Australia dan New Zealand. Organisasi ini mewakili kelompok Islam tradisional moderat, yang menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman yang damai, inklusif, dan penuh toleransi. Dengan pendekatan ini, PCI NU berupaya untuk mempertahankan ajaran dan tradisi Islam ala Ahlus Sunnah wal Jama'ah di lingkungan masyarakat Indonesia di Australia dan New Zealand. Sebagai organisasi berbasis Islam tradisional, PCI NU tetap setia pada prinsip-prinsip keagamaan yang dipadukan dengan semangat kebhinekaan dan keterbukaan terhadap budaya serta sistem sosial di negara-negara tersebut.

PCI NU Australia-New Zealand berafiliasi dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), yang berkedudukan di Indonesia dan berpusat di Jakarta. Afiliasi ini menjadikan PCI NU sebagai bagian integral dari jaringan global Nahdlatul Ulama, yang merupakan organisasi Islam terbesar di Indonesia. Hubungan ini memastikan bahwa PCI NU di Australia dan New Zealand dapat terhubung dengan agenda keislaman yang lebih luas, termasuk kebijakan keagamaan, sosial, dan budaya yang diusung oleh PBNU. Selain itu, afiliasi ini juga

memungkinkan PCI NU untuk berperan sebagai perpanjangan tangan PBNU dalam menyebarkan misi keagamaan yang moderat di luar negeri, khususnya di komunitas diaspora Indonesia yang terus berkembang.

Dalam menjalankan kegiatannya, PCI NU Australia-New Zealand memfokuskan diri pada berbagai program keagamaan dan sosial yang dirancang untuk memperkuat identitas keislaman di kalangan diaspora. Program-program tersebut meliputi pengajian rutin, pelatihan keislaman, kegiatan sosial seperti bantuan bagi anggota komunitas yang membutuhkan, dan peringatan hari-hari besar Islam. PCI NU juga terlibat dalam dialog antaragama dan kerja sama lintas budaya untuk mempererat hubungan dengan komunitas lokal dan menciptakan keharmonisan dalam masyarakat multikultural Australia dan New Zealand. Organisasi ini menyadari pentingnya membangun jembatan antara tradisi Islam yang diusungnya dengan nilai-nilai kebebasan dan keberagaman yang diakui di kedua negara tersebut.

Selain menjalankan program keagamaan, PCI NU Australia-New Zealand juga berupaya untuk melestarikan dan mempromosikan budaya Indonesia di kalangan diaspora. Melalui kegiatan-kegiatan yang memadukan aspek keagamaan dan budaya, organisasi ini berperan dalam menjaga tradisi-tradisi Nusantara yang khas, seperti tradisi tahlilan, yasinan, halal bi halal, dan peringatan hari-hari besar Islam. Upaya ini menjadi sarana bagi masyarakat Indonesia untuk terus terhubung dengan akar budaya mereka, meskipun berada di lingkungan yang berbeda. Pelestarian tradisi ini juga menjadi salah satu bentuk perlawanan terhadap arus globalisasi yang kerap kali mengikis identitas budaya lokal.

PCI NU Australia-New Zealand juga berfungsi sebagai ruang solidaritas dan dukungan sosial bagi komunitas Indonesia di perantauan. Anggota komunitas dapat saling berbagi pengalaman dan memberikan dukungan satu sama lain, baik dalam aspek spiritual, sosial, maupun material. Organisasi ini menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi masyarakat Indonesia, di mana mereka dapat menjalankan keyakinan agama dan tradisi budaya tanpa merasa terasing di lingkungan yang asing. Kehadiran PCI NU di Australia dan New Zealand menjadi bukti bahwa nilai-nilai Islam tradisional yang moderat dapat berjalan seiring dengan prinsip-prinsip kehidupan modern, sekaligus memperkaya keberagaman budaya yang ada di negara-negara tersebut.

Pimpinan Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCI NU) Australia-New Zealand telah membentuk tujuh ranting di berbagai wilayah, yaitu Victoria, Australian Capital Territory (ACT), New South Wales, Queensland, South Australia, Western Australia, Darwin, dan New Zealand. Setiap ranting ini berperan aktif dalam memperkuat eksistensi PCI NU di kawasan Australia dan New Zealand, sekaligus menjadi wadah bagi komunitas Indonesia yang

berafiliasi dengan ajaran ahlussunnah wal jamaah. Setiap ranting memiliki otonomi dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan yang sejalan dengan nilai-nilai NU serta menyesuaikan dengan karakteristik masyarakat setempat.

2) *Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah (PCIM) Australia*

Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah (PCIM) Australia adalah organisasi nirlaba yang menjadi wadah bagi komunitas Muhammadiyah di Australia. Dengan pusat dewan di Victoria, PCIM Australia menjadi salah satu cabang istimewa yang berfungsi untuk menghubungkan nilai-nilai Muhammadiyah dengan konteks kehidupan diaspora Indonesia di Australia. Organisasi ini juga merupakan bagian dari 28 cabang internasional Muhammadiyah yang tersebar di seluruh dunia, memperlihatkan jangkauan global gerakan Muhammadiyah yang kuat dan terus berkembang.

Sebagai cabang dari Muhammadiyah, PCIM Australia mengemban misi serupa dengan organisasi induknya yang berdiri di Indonesia pada tahun 1912 oleh Kyai Haji Ahmad Dahlan. Muhammadiyah didirikan sebagai gerakan sosial dan keagamaan yang reformis, dengan pendekatan yang berfokus pada ijtihad atau interpretasi mandiri terhadap Al-Qur'an dan Sunnah, alih-alih taqlid atau mengikuti pandangan yang disampaikan oleh ulama tanpa melakukan penafsiran lebih lanjut. Sebagai organisasi modernis berbasis Islam Sunni di Indonesia, Muhammadiyah memiliki kepedulian yang tinggi terhadap pendidikan, kesehatan, dan berbagai kegiatan sosial. Di Indonesia, Muhammadiyah telah membangun lebih dari 5000 sekolah dasar dan menengah, serta lebih dari 175 perguruan tinggi, yang menunjukkan kontribusi besarnya dalam dunia pendidikan. Bahkan, di beberapa wilayah di timur Indonesia, sekolah-sekolah Muhammadiyah menerima banyak mahasiswa non-Muslim, mencerminkan semangat inklusivitasnya.

PCIM Australia didirikan sebagai upaya untuk melanjutkan misi besar ini di Australia. Gagasan untuk mendirikan PCIM Australia muncul pada tahun 2005 melalui inisiatif para mahasiswa internasional Indonesia dan masyarakat setempat. Pada 4 Juni 2010, PCIM Australia diresmikan melalui Surat Keputusan Nomor 118/KEP/I.0/2010 yang dikeluarkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah (PCIM, 2024). Hal ini memperkuat kedudukan PCIM Australia sebagai cabang resmi Muhammadiyah di luar negeri, dengan peran untuk memperkuat ikatan spiritual dan sosial komunitas Indonesia yang berada di Australia.

Untuk memperluas jangkauannya, PCIM Australia juga memiliki cabang perwakilan di beberapa negara bagian di Australia yang disebut Pimpinan Ranting Istimewa Muhammadiyah (PRIM). Cabang-cabang tersebut, yang meliputi PRIM di New South Wales, Queensland,

Australian Capital Territory (ACT), serta Western Australia yang saat ini dalam tahap pembentukan, memungkinkan PCIM untuk hadir dan berperan aktif di berbagai wilayah Australia. Dengan adanya cabang-cabang ini, PCIM Australia dapat menjangkau lebih banyak komunitas dan mengorganisir kegiatan secara lebih luas.

PCIM Australia aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan keagamaan, bekerja sama dengan berbagai kelompok masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan saling memahami. Beberapa kegiatan yang telah dijalankan meliputi *halaqa* atau diskusi keagamaan, Clean-Up Australia Day sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan, serta berbagai seminar dan acara diskusi yang menghadirkan pakar dalam berbagai bidang. Selain itu, PCIM Australia juga sering mengadakan kegiatan penggalangan dana untuk bencana alam, baik untuk membantu masyarakat Indonesia maupun komunitas lokal di Australia. Ketika pandemi COVID-19 melanda, PCIM Australia juga turut berperan dalam mengumpulkan dan menyalurkan bantuan bagi masyarakat yang terdampak.

Melalui kegiatan-kegiatan tersebut, PCIM Australia tidak hanya berfungsi sebagai pusat keagamaan, tetapi juga sebagai jembatan yang mempererat solidaritas antara komunitas Indonesia dan masyarakat luas di Australia. Organisasi ini terus berkomitmen untuk bekerja sama dengan individu dan organisasi yang memiliki visi dan misi yang sejalan, dengan harapan untuk membangun jembatan komunikasi yang lebih kuat, solidaritas yang mendalam, serta pemahaman yang saling menghargai dalam masyarakat Australia yang multikultural. Di masa depan, PCIM Australia bertekad untuk melanjutkan perannya dalam mendukung keragaman, inklusivitas, dan kebersamaan di tengah masyarakat Australia yang dinamis.

3) *Iqra Foundation*

IQRO Foundation berawal dari majelis-majelis pengajian yang sederhana dengan tujuan utama meningkatkan keterampilan membaca Al-Quran di kalangan anggotanya. Majelis ini merupakan ruang untuk berbagi ilmu agama yang juga menyegarkan jiwa dan menumbuhkan kedekatan dengan ajaran Islam. Seiring waktu, forum ini berkembang dengan menyisipkan ceramah-ceramah Islam kontemporer yang bertujuan untuk memperkuat pemahaman dan keyakinan anggota mengenai Islam sebagai agama yang damai, penuh kasih, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Ceramah-ceramah tersebut tidak hanya memperkaya pengetahuan agama tetapi juga membangun kesadaran anggota akan peran penting mereka dalam menyebarkan nilai-nilai Islam kepada masyarakat luas.

Kesadaran dan keyakinan ini mendorong para anggota IQRO Foundation untuk berkontribusi lebih besar kepada masyarakat. Salah satu upaya yang mereka lakukan adalah

mengadakan kursus-kursus membaca Al-Quran dan kelas pengajaran agama Islam untuk anak-anak. Dengan meningkatnya kebutuhan komunitas Muslim di Australia untuk mendapatkan pendidikan dan pemahaman Islam yang moderat, para pendiri IQRO Foundation sepakat untuk memformalkan kelompok ini menjadi organisasi yang lebih terstruktur. Pada tahun 2000, IQRO Foundation resmi terdaftar sebagai organisasi masyarakat nirlaba di Australia. Anggotanya terdiri dari berbagai latar belakang, tetapi mayoritas merupakan Muslim asal Indonesia yang berkomitmen untuk memelihara identitas keagamaan sekaligus berintegrasi dengan masyarakat setempat.

Sejak pendiriannya, IQRO Foundation aktif menyelenggarakan berbagai kegiatan untuk mendukung komunitas Muslim, terutama komunitas Muslim Indonesia di Australia. Beragam acara yang diselenggarakan meliputi seminar dan dialog publik, pelatihan dan lokakarya, rekreasi keluarga, ceramah rutin, hingga pameran budaya. Acara-acara tersebut dirancang untuk mengedepankan nilai-nilai Islam yang dinamis, harmonis, dan toleran. Melalui pendekatan ini, IQRO Foundation menegaskan komitmennya dalam membangun suasana komunitas yang inklusif, mempererat hubungan antarkelompok, serta mempromosikan pesan damai yang menjadi inti dari ajaran Islam.

Dalam pelaksanaannya, IQRO Foundation berupaya mencontoh teladan Nabi Muhammad SAW, mempraktikkan ajaran Islam yang menekankan cinta, kasih sayang, dan kepedulian terhadap sesama. Hal ini diwujudkan dalam program-program yang mengedepankan kolaborasi dan kebersamaan di antara berbagai komunitas Muslim maupun masyarakat luas. IQRO Foundation memandang bahwa menciptakan hubungan yang harmonis dengan lingkungan sekitarnya adalah bentuk nyata dari cinta dan rahmat Allah SWT.

Visi IQRO Foundation adalah menjadi organisasi masyarakat yang solid dan tangguh, yang mampu menerapkan dan mempromosikan nilai-nilai Islam yang komprehensif kepada masyarakat Australia. Misi organisasi ini mencakup sosialisasi ajaran dan nilai-nilai Islam yang moderat melalui pendidikan, seminar, acara sosial, dan kegiatan budaya. Selain itu, IQRO Foundation berkomitmen untuk mempromosikan keseimbangan perkembangan mental, spiritual, dan fisik bagi para anggotanya. Tidak hanya itu, kerja sama dengan berbagai kelompok masyarakat, organisasi sosial, serta perwakilan pemerintah Indonesia dan Australia juga menjadi salah satu pilar penting dalam mewujudkan misi tersebut (IQRO Foundation, 2024). Dengan strategi ini, IQRO Foundation berharap dapat terus tumbuh dan menjadi jembatan komunikasi yang kokoh antara komunitas Muslim dan masyarakat Australia secara umum.

4) *Indonesian Diaspora Network (IDN)*

Dengan populasi yang mencapai lebih dari 8 juta orang, komunitas diaspora Indonesia tersebar di seluruh dunia, mewakili sekitar tiga persen dari populasi total Indonesia. Diaspora ini tersebar di tujuh benua, termasuk Amerika Utara, Amerika Selatan, Antartika, Afrika, Eropa, Asia, dan Australia. Komunitas Indonesia yang tinggal di luar negeri terdiri dari individu-individu dengan latar belakang yang beragam, mencakup berbagai suku, agama, dan tingkat sosial-ekonomi serta pendidikan. Mereka datang dengan beragam ide, keterampilan, dan potensi, yang memperkaya kontribusi mereka tidak hanya bagi negara tempat tinggal mereka, tetapi juga bagi tanah air mereka, Indonesia.

Selain individu, banyak perusahaan internasional yang memiliki minat besar dan hubungan erat dengan Indonesia, baik dalam bidang perdagangan, budaya, maupun investasi. Bersama-sama, individu dan perusahaan ini membentuk diaspora Indonesia, yang memiliki potensi besar untuk berperan sebagai kekuatan signifikan dalam pembangunan nasional. Mereka dapat membantu mempromosikan Indonesia di kancah internasional dan memainkan peran penting dalam menciptakan hubungan diplomatik serta kolaborasi global yang lebih erat. Potensi ini menjadikan diaspora Indonesia sebagai aset strategis yang mampu mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Kesadaran akan potensi besar ini mendorong para anggota diaspora Indonesia untuk mengorganisasi diri mereka dalam sebuah jaringan global, yang dikenal sebagai Indonesian Diaspora Network (IDN). IDN bertujuan untuk menghubungkan dan menyatukan anggota diaspora di seluruh dunia, memfasilitasi komunikasi dan kerja sama yang lebih baik di antara mereka. Pembentukan IDN merupakan hasil dari diskusi mendalam pada sesi “Ways Forward” dalam Kongres Diaspora Indonesia (CID) pertama yang diadakan di Los Angeles pada 2012, serta pertemuan CID II di Jakarta pada 2013 (IDN, 2024). Inisiatif ini bertujuan untuk menjembatani para diaspora dengan tanah air serta memfasilitasi transfer pengetahuan, pengalaman, dan investasi ke Indonesia.

Sejak didirikan, IDN telah berperan aktif dalam menginisiasi berbagai kelompok gugus tugas yang dirancang untuk mencapai tujuan-tujuan strategis dan melaksanakan advokasi dalam berbagai bidang, baik di dalam maupun di luar negeri. Kelompok gugus tugas ini mencakup berbagai sektor penting seperti Imigran dan Kewarganegaraan, yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan warga Indonesia yang tinggal di luar negeri dan isu-isu terkait status kewarganegaraan. Selain itu, ada juga gugus tugas Pekerja Migran yang berupaya melindungi hak-hak pekerja Indonesia di luar negeri, serta Warisan Kuliner dan Promosi Budaya, yang bertujuan memperkenalkan keanekaragaman kuliner dan budaya Indonesia ke kancah global.

Bidang lain yang menjadi perhatian IDN termasuk Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, yang memfokuskan pada peningkatan akses pendidikan dan pengembangan keterampilan bagi warga Indonesia di diaspora. Di sisi lain, gugus tugas Dirgantara berupaya mendorong kolaborasi di bidang teknologi penerbangan dan antariksa, sementara gugus tugas Kota Layak Huni bertujuan membantu merancang solusi untuk perencanaan kota yang berkelanjutan. Gugus tugas Kerjasama Pemerintah dan Tata Kelola yang Baik berperan untuk mendukung hubungan diplomasi dan memperkuat tata kelola yang transparan dan efektif, serta bidang Sains dan Teknologi yang bertujuan menghubungkan ilmuwan dan profesional teknologi di diaspora dengan kolega di Indonesia untuk pertukaran inovasi.

Dengan berbagai inisiatif ini, IDN membuktikan peran strategisnya dalam memperkuat ikatan diaspora Indonesia dengan tanah air, membangun solidaritas global, dan berkontribusi untuk pembangunan yang lebih baik, baik bagi Indonesia maupun komunitas global.

C. Transformasi dan Penguatan Kesadaran Beragama Kelompok Diaspora

Pemahaman keagamaan dan kesadaran beragama menjadi hal yang sangat krusial bagi masyarakat Indonesia diaspora. Terlebih keberadaan mereka di luar negeri, khususnya di negara-negara sekuler dengan budaya Barat seperti Australia. Kekeringan spiritual yang seringkali dirasakan oleh masyarakat diaspora terjadi karena mereka telah meninggalkan tanah air, yang budaya dan lingkungannya mendukung kehidupan beragama. Kebiasaan dan ketaatan beragama yang mereka jalani di Indonesia menjadi sebuah kerinduan yang mendalam ketika tinggal di negara rantau. Oleh karena itu, tidak jarang masyarakat diaspora mencari komunitas sesama Indonesia untuk berbagi pengalaman spiritual dan mengatasi rasa rindu tersebut. Bahkan, seringkali ketaatan beragama justru semakin menguat ketika mereka hidup di tengah masyarakat sekuler yang cenderung kering secara spiritual.

Ada beberapa alasan mengapa masyarakat diaspora Indonesia menjadi lebih taat beragama dan ingin mendalami ajaran agama ketika berada di negara asing. Pertama, mereka terlepas dari komunitas religius di Indonesia yang umumnya memiliki tradisi keberagamaan yang kuat. Ketika menghadapi realitas masyarakat sekuler di negara asing, mereka merasakan kebutuhan untuk mengisi kekosongan spiritual yang muncul. Kedua, kesamaan pengalaman hidup di perantauan mendorong mereka untuk bergabung dengan komunitas diaspora yang menawarkan kesempatan belajar agama secara mendalam. Dalam hal ini, kecenderungan individu untuk memilih komunitas berdasarkan latar belakang keagamaannya di Indonesia

sangat terlihat. Misalnya, mereka yang terbiasa dengan tradisi Nahdlatul Ulama (NU) akan mencari komunitas diaspora NU, sementara yang berorientasi pada Islam modern cenderung bergabung dengan komunitas Islam modern.

Ketiga, kesadaran baru dalam beragama sering kali muncul saat mereka tinggal di negara asing. Banyak individu merasa bahwa pemahaman dan praktik keberagamaan mereka di Indonesia masih kurang mendalam. Hidup di lingkungan yang berbeda memotivasi mereka untuk lebih serius dalam mendalami ajaran agama dan memperkuat identitas keagamaan mereka. Hal ini menjadi peluang bagi kelompok-kelompok diaspora untuk membentuk komunitas keagamaan yang sesuai dengan kebutuhan anggota.

Di Australia, misalnya, beberapa kelompok diaspora Indonesia telah menginisiasi berbagai kegiatan untuk mendukung transformasi pengetahuan dan penguatan kesadaran beragama. Di antara kelompok tersebut adalah Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCI NU) Australia-New Zealand, Pengurus Cabang Istimewa Muhammadiyah (PCIM) Australia, Iqro Foundation, dan Indonesian Diaspora Network (IDN). Kelompok-kelompok ini memiliki pola dan pendekatan yang berbeda dalam mendukung kehidupan beragama masyarakat diaspora.

PCI NU, misalnya, secara rutin mengadakan pengajian, peringatan hari besar Islam, serta kegiatan keagamaan lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan anggotanya. Selain itu, mereka juga menyelenggarakan pendidikan Al-Qur'an untuk anak-anak usia sekolah dasar, sehingga generasi muda diaspora tetap terhubung dengan nilai-nilai agama Islam. Wendi Wijarwadi (Wakil Ketua PCI NU Australia New Zealand, wawancara via Zoom 21 Oktober 2024) menyampaikan:

“NU secara rutin menggelar pengajian, baik melalui wadah NU itu sendiri atau majelis-majelis pengajian yang berafiliasi dengan NU. Karena Australia ini luas, terdapat 6 negara bagian, NU juga memiliki kegiatan yang bersifat mandiri sesuai dengan daerah masing-masing. Misalnya di Sydney, NU melakukan pengajian rutin bulanan lewat Kaifa NU. Selain, Kaifa NU, para ustadz, seperti Ustadz Emil (Rois Syuriah PCI NU Australia New Zealand) atau Ustadz Yusdi Maksum (Wakil Rais Syuriah PCI NU Australia New Zealand) juga memiliki pengajian tersendiri. Baik Kaifa NU atau pun pengajian yang digelar oleh orang-orang NU menjadi bagian dari transformasi pengetahuan beragama pada jamaah”.

Pengajian bulanan Kaifa NU telah menjadi salah satu wadah paling efektif untuk mentransformasikan pengetahuan agama kepada masyarakat, khususnya dalam konteks mempertahankan tradisi keagamaan ala Nahdliyyin. Dalam pengajian ini, tidak hanya mentradisikan amalan-amalan khas Nahdliyyin, seperti pembacaan tahlil, yasinan, dan shalawatan, tetapi juga memperkuat pemahaman keislaman melalui kajian kitab-kitab klasik.

Salah satu kitab yang sering menjadi rujukan adalah *Kitab Al-Hikam*, yang kaya akan hikmah dan pelajaran spiritual. Selain itu, pengajian ini juga menjadi ruang dialog yang mendalam, di mana para jamaah dapat mendiskusikan berbagai isu keagamaan yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Dengan kombinasi tradisi dan pembelajaran ini, pengajian bulanan Kaifa NU tidak hanya melestarikan nilai-nilai keislaman yang diwariskan para ulama, tetapi juga menjadi sarana penguatan ukhuwah Islamiyah dan peningkatan kualitas spiritual masyarakat.

Selain pengajian rutin Kaifa NU, PCI NU, khususnya di Sydney, juga mengelola program pembelajaran agama yang berfokus pada anak-anak, yaitu Taman Pendidikan Al-Quran (TPQ) Ma'arif NU. TPQ ini dirancang untuk menjadi medium yang efektif dalam menanamkan nilai-nilai keislaman sejak usia dini. Program ini tidak hanya mengajarkan anak-anak membaca dan menghafal Al-Quran, tetapi juga melatih mereka menulis huruf Arab dengan baik. Lebih dari itu, mereka mendapatkan pemahaman dasar-dasar agama, seperti tata cara bersuci, pelaksanaan shalat, zakat, dan puasa, yang disampaikan secara sederhana namun bermakna. Selain aspek ritual, TPQ Ma'arif NU juga menekankan pengajaran akhlak Islami, sehingga anak-anak dapat membangun karakter mulia dalam keseharian mereka. Melalui pendekatan yang menyenangkan dan interaktif, TPQ ini berperan penting dalam mencetak generasi Muslim yang tidak hanya cakap secara religius, tetapi juga memiliki moralitas yang tinggi. Keberadaan TPQ Ma'arif NU ini diharapkan mampu menjadi fondasi kuat dalam membangun komunitas Muslim yang harmonis dan berintegritas di lingkungan diaspora.

PCIM Australia juga aktif melaksanakan berbagai kegiatan keagamaan, seperti pengajian rutin dan peringatan hari-hari besar Islam, yang bertujuan mempererat silaturahmi dan memperkuat pemahaman agama di kalangan komunitas diaspora Indonesia. Dengan pendekatan yang serupa namun dengan ciri khas masing-masing, baik PCI NU maupun PCIM Australia sama-sama berkontribusi dalam transformasi pengetahuan keagamaan dan penguatan kesadaran spiritual.

Pengajian yang diadakan oleh PCIM Australia biasanya dilakukan secara bergilir dari rumah ke rumah, melibatkan anggota Muhammadiyah yang saling mendukung dalam memperdalam ilmu agama. Kegiatan ini tidak hanya membahas ajaran-ajaran agama, tetapi juga menjadi momen untuk memperkuat ikatan kekeluargaan di antara para anggotanya. Selain fokus pada kegiatan internal, PCIM juga berkolaborasi dengan kelompok-kelompok pengajian lain, seperti Iqro, kelompok Pengajian Mahasiswa gabungan di Sydney, dan Ashabul Kahfi. Kehadiran PCIM dalam berbagai komunitas pengajian ini menunjukkan keterbukaan dan

komitmen untuk membangun jejaring yang lebih luas. Dr. Izza, selalu ketua PCI Muhammadiyyah Sydney (Wawancara via Zoom, 18 November 2024) menyatakan:

“Kegiatan PCI Muhammadiyyah bersifat fleksibel. Pengajaran Islam, kita sampaikan melalui pengajian-pengajian. Yang paling pokok kita mengajarkan Islam sesuai dengan prinsip Muhammadiyyah. Jadi di Muhammadiyyah ada prinsip pengajaran agama Islam. Jadi itu yang kita ajarkan. Selain itu, kita juga terlibat dalam beberapa kegiatan keagamaan komunitas lainnya, seperti Iqro’, Ashabul Kahdi, atau pun di masjid lainnya”.

Melalui kegiatan-kegiatan tersebut, PCIM tidak hanya memperkuat pemahaman agama di kalangan anggotanya, tetapi juga turut berperan dalam mempererat hubungan antarwarga diaspora. Dengan menjadikan pengajian sebagai sarana edukasi dan dialog, PCIM berupaya menciptakan komunitas diaspora yang religius, inklusif, dan harmonis, serta mampu menjadi teladan bagi komunitas lainnya di Australia.

Di sisi lain, organisasi seperti Iqro telah menunjukkan kemapanannya sebagai salah satu kelompok keagamaan yang konsisten dan terorganisasi dengan baik di kalangan komunitas Muslim. Mereka secara rutin mengadakan pengajian dan kegiatan keagamaan yang terjadwal, baik dalam bentuk mingguan, bulanan, maupun acara khusus untuk memperingati hari-hari besar Islam. Program-program ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan spiritual, edukasi, dan sosial anggota komunitas, sehingga memberikan dampak yang positif bagi penguatan keislaman mereka.

Dalam kegiatan mingguan, Iqro menyelenggarakan berbagai program yang beragam, seperti Tahsin Al-Quran, Tahfidzul Quran, Kajian Muslimah, dan TPA Salsabeela, yang masing-masing dirancang untuk menjangkau berbagai segmen komunitas (Iqro Foundation, 2024). Berikut adalah jadwal pelaksanaannya:

1. Tahsin Al-Quran dilaksanakan setiap Minggu pagi setelah salat Subuh, program ini bertujuan untuk memperbaiki bacaan Al-Quran, baik dari segi makharijul huruf maupun tajwid.
2. Tahfidzul Quran diadakan setiap Sabtu pagi pukul 06.00-07.00, program ini fokus pada hafalan Al-Quran, dengan pendekatan sistematis yang cocok untuk berbagai tingkat kemampuan peserta.
3. Kajian Muslimah dilaksanakan setiap Rabu pagi pukul 10.30-13.30, program ini dirancang khusus untuk wanita, membahas berbagai tema keislaman yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, termasuk fiqih, akhlak, dan keluarga.

4. TPA Salsabeela. Kegiatan ini berlangsung setiap Sabtu pukul 13.00-16.00, memberikan pendidikan agama kepada anak-anak dengan metode yang interaktif, mencakup belajar Al-Quran, kisah-kisah Islam, dan pembentukan karakter Islami.

Dengan keberagaman program ini, Iqro tidak hanya berfokus pada peningkatan kualitas bacaan dan hafalan Al-Quran, tetapi juga menciptakan ruang edukasi agama yang inklusif untuk wanita dan anak-anak. Konsistensi dalam pelaksanaan kegiatan ini menjadikan Iqro sebagai pusat pembelajaran agama yang berkelanjutan, memberikan manfaat tidak hanya bagi anggota komunitas tetapi juga memperkuat nilai-nilai Islam di lingkungan diaspora. Kegiatan ini juga mempererat ukhuwah Islamiyah di antara anggotanya melalui interaksi dan kolaborasi yang harmonis. Ustadz Hasran Addahroni (Wawancara via Zoom, 21 Oktober 2024) menyatakan:

“Iqro menyelenggarakan banyak program kegiatan mulai dari kajian untuk dewasa, ibu-ibu, hingga anak-anak. Semua kegiatan berlangsung di Masjid Iqro yang berada di Wiley Park. Ada pula kajian Tahsin Al-Quran dan Tahfidz Al-Quran. Sementara untuk anak-anak, kita menyelenggarakan TPA. Kajian-kajian yang bersifat rutin namun tidak minggu, kajian Ramadhan. Pada bulan Ramadhan full kegiatan mulai tarawih, hingga kajian rutin ada”.

Dalam pengamatan, kelompok pengajian Iqro tampaknya berhasil menempatkan diri sebagai lembaga keagamaan yang paling sistematis dalam mengorganisasi dan menyelenggarakan kajian keislaman di komunitasnya. Hal ini terlihat dari jadwal kegiatan yang tertata rapi dan dilaksanakan secara intensif sesuai dengan agenda yang telah direncanakan. Konsistensi dan kedisiplinan dalam menjalankan program-programnya mencerminkan profesionalisme organisasi ini dalam memberikan pelayanan keagamaan kepada jamaahnya.

Tidak hanya itu, kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Iqro juga menarik partisipasi jamaah yang cukup besar, dengan tingkat kehadiran yang konsisten pada setiap majelis pengajian. Hal ini menunjukkan bahwa program yang ditawarkan tidak hanya relevan, tetapi juga memenuhi kebutuhan spiritual dan intelektual komunitas. Faktor lain yang turut mendukung keberhasilan ini adalah keberadaan masjid atau pusat kegiatan yang dikelola oleh Iqro. Fasilitas ini tidak hanya menjadi tempat pelaksanaan pengajian, tetapi juga berfungsi sebagai pusat aktivitas sosial dan spiritual yang memudahkan jamaah dalam mengakses berbagai program yang ditawarkan.

Selain itu, pengelolaan masjid yang baik memberikan ruang yang nyaman dan kondusif untuk belajar, beribadah, serta berinteraksi antaranggota komunitas. Keberadaan masjid ini

juga memungkinkan Iqro untuk mengembangkan berbagai kegiatan keagamaan lainnya, seperti kelas tahsin, tahfidz, kajian Muslimah, dan pendidikan untuk anak-anak. Dengan pendekatan yang sistematis dan fasilitas yang memadai, Iqro tidak hanya berfungsi sebagai tempat belajar agama, tetapi juga menjadi motor penggerak dalam mempererat ukhuwah Islamiyah dan membangun komunitas Muslim yang harmonis, produktif, dan religius.

Sementara Indonesian Diaspora Network (IDN) tidak memiliki fokus khusus pada kegiatan keagamaan, organisasi ini memainkan peran strategis sebagai penghubung bagi berbagai kelompok diaspora Indonesia di Australia. IDN berfungsi sebagai wadah yang mengintegrasikan komunitas diaspora dari latar belakang dan minat yang beragam, menciptakan platform untuk kolaborasi, pertukaran informasi, dan penguatan solidaritas. Karena IDN tidak secara spesifik mengarahkan kegiatannya pada pengajaran agama, pembentukan kesadaran keagamaan lebih banyak diserahkan kepada masing-masing kelompok diaspora yang memang memiliki fokus utama pada gerakan keagamaan. Salut Muhidin (Ketua IDN Australia, Wawancara via Zoom, 12 Oktober 2024), menyatakan:

“Indonesian Diaspora Network (IDN) ini ada di mana-mana, pusatnya Jakarta. Tujuan dari organisasi ini menjadi penghubung berbagai komunitas Indonesia yang tersebar di berbagai negara. Di Australia, saya kordinatornya. Untuk kegiatan keagamaan kita tidak memiliki, karena sifat dari organisasi ini (IDN) menjadi penghubung dari berbagai organisasi-organisasi yang telah ada. Kita menjadi semacam simpul. Jadi untuk kegiatan diserahkan masing-masing organisasi. Jadi terserah para diaspora, mau ikut di mana saja silakan”.

Dengan pendekatan yang inklusif, IDN memberikan ruang bagi berbagai organisasi berbasis agama, seperti PCI NU, PCIM, dan Iqro Foundation, untuk berkontribusi dalam memperkuat nilai-nilai spiritual komunitas diaspora. IDN juga mendukung keragaman ini dengan menciptakan jaringan komunikasi yang memungkinkan kelompok-kelompok tersebut bekerja sama dalam kegiatan lintas organisasi, seperti acara perayaan keagamaan, kegiatan sosial, atau diskusi komunitas.

Meskipun tidak secara langsung terlibat dalam program keagamaan, peran IDN sebagai penghubung memiliki dampak penting dalam memperluas pengaruh dan jangkauan kegiatan keagamaan. IDN membantu memperkuat interaksi antaranggota diaspora dari berbagai kelompok, baik yang fokus pada agama maupun isu lainnya, sehingga tercipta harmoni dalam keberagaman. Dengan demikian, IDN berperan sebagai katalisator dalam membangun kesadaran kolektif yang mencakup dimensi sosial, budaya, dan spiritual, sekaligus mendorong kolaborasi yang produktif di antara komunitas diaspora Indonesia di Australia.

Dari analisis terhadap empat kelompok diaspora tersebut, terlihat bahwa pola transformasi pengetahuan dan kesadaran beragama di Australia tidak hanya memperkuat identitas religius, tetapi juga membangun solidaritas komunitas diaspora. Kelompok-kelompok ini menjadi wadah penting bagi masyarakat Indonesia di Australia untuk tetap terhubung dengan nilai-nilai keagamaan dan budaya mereka, sambil menghadapi tantangan hidup di lingkungan yang berbeda secara budaya maupun spiritual.

BAB IV KEBIJAKAN PUBLIK DI AUSTRALIA

A. Kebijakan Lembaga Publik dan Pendidikan

Penduduk pertama Australia adalah orang Aborigin dan Penduduk Asli Kepulauan Torres Strait, yang memiliki budaya dan tradisi berkelanjutan tertua di dunia. Penduduk Australia lainnya adalah migran atau keturunan migran yang tiba di Australia dari sekitar 200 negara sejak Inggris mendirikan pemukiman Eropa yang pertama di Sydney Cove pada 1788. Para migran pertama kebanyakan dari negara Inggris dan Irlandia dengan latar belakang Anglo-Celtic, yang memberikan pengaruh signifikan dan berkelanjutan pada sejarah, budaya dan tradisi politik Australia. Pada 1945, penduduk Australia berjumlah sekitar 7 juta jiwa dan mayoritas Anglo-Celtic. Sejak saat itu, lebih dari 6,5 juta imigran, termasuk 675.000 pengungsi, bermukim di Australia, secara nyata memperluas profil sosial dan budayanya. Gelombang imigrasi berikutnya telah membawa orang-orang dari seluruh dunia, semuanya yang telah memberikan kontribusi unik pada Australia dan cara hidupnya (Holland, 2010).

Banyak orang yang datang ke Australia sejak 1945 memiliki motivasi komitmen kepada keluarga, atau keinginan untuk melepaskan diri dari kemiskinan, perang atau penganiayaan. Gelombang pertama migran dan pengungsi kebanyakan datang dari Eropa. Gelombang-gelombang berikutnya datang dari kawasan Asia-Pasifik, Timur Tengah dan Afrika. Migran telah memperkaya hampir setiap aspek kehidupan Australia, dari bisnis hingga kesenian, dari masakan hingga komedi dan dari ilmu pengetahuan hingga olahraga. Mereka, pada gilirannya, beradaptasi dengan masyarakat Australia yang toleran, informal dan secara garis besar egalitarian (Collins, 2020).

Kini penduduk Australia mencapai lebih dari 21 juta jiwa. Lebih dari 43 persen penduduk Australia kelahiran luar negeri atau memiliki orang tua yang lahir di luar negeri. Penduduk asli Australia diperkirakan berjumlah 483.000, atau 2,3 persen. Kekhasan Australia masa kini tidak hanya kemajemukan budaya penduduknya, namun hingga tahap dimana mereka dipersatukan oleh komitmen yang mendasar dan menyatu terhadap Australia. Dalam kerangka hukum Australia, seluruh penduduk Australia berhak untuk mengungkapkan kebudayaan dan kepercayaan dan untuk ambil bagian dengan bebas dalam kehidupan nasional Australia. Pada saat yang sama, setiap orang diharapkan untuk menjunjung prinsip-prinsip dan nilai-nilai bersama yang menyokong cara hidup Australia (McCallum, 2023).

Secara umum, Australia adalah masyarakat egalitarian dalam kemajemukan masyarakat masa kini. Dalam hal agama, Australia adalah negara berpenduduk mayoritas Kristen, dengan

sekitar 64 persen penduduk Australia mengaku sebagai penganut agama Kristen. Namun, agama-agama besar lainnya juga memiliki penganut, yang mencerminkan masyarakat Australia yang majemuk secara budaya. Agama atau aliran kepercayaan Australia paling awal mulai dengan Penduduk Aborijin dan Penduduk Kepulauan Selat Torres, yang telah mendiami Australia selama antara 40.000 dan 60.000 tahun. Penduduk Asli Australia memiliki tradisi agama dan nilai-nilai rohani yang unik. Australia tidak mempunyai agama negara yang resmi dan masyarakat bebas menganut segala agama yang mereka pilih, sepanjang mereka patuh pada hukum. Penduduk Australia juga bebas untuk tidak memeluk agama (Turner, 2020).

1) *Kebijakan Sosial dan Multikulturalisme Australia*

Kerangka kebijakan publik pemerintah Australia mencakup berbagai bidang yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan penduduknya, memastikan pertumbuhan ekonomi, dan mendorong pemerataan sosial. Kebijakan tersebut biasanya dibentuk di tingkat federal dan negara bagian/teritori, tergantung pada pembagian tanggung jawab yang diuraikan dalam Konstitusi Australia. Kebijakan publik Australia mencerminkan nilai-nilai demokrasinya, yang menangani berbagai masalah sosial, ekonomi, lingkungan, dan keamanan. Fokus pemerintah pada pembuatan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy making*), inklusivitas, dan pemerataan memastikan bahwa kebijakan publik dirancang untuk memenuhi kebutuhan penduduknya yang beragam, meskipun bidang-bidang tertentu seperti kebijakan iklim dan urusan pribumi tetap menjadi tantangan yang berkelanjutan (Colebatch, 2020).

Australia telah lama dikenal sebagai salah satu negara multikultural paling sukses di dunia. Penduduknya yang beragam, yang dibentuk oleh gelombang imigrasi dari berbagai latar belakang budaya, etnis, dan agama, telah memperkaya tatanan sosial negara tersebut dan berkontribusi pada identitas globalnya. Inti dari keberhasilan multikultural ini adalah komitmen Australia terhadap inklusivitas dan pemerataan, yang tercermin dalam kebijakan sosialnya. Kebijakan ini dirancang untuk memastikan bahwa semua warga Australia, apa pun latar belakangnya, memiliki akses ke layanan penting seperti perawatan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial (Althaus et al., 2022). Studi ini mengkaji bagaimana kebijakan sosial Australia disusun untuk mendukung penduduknya yang multikultural, mendorong kohesi dan kesetaraan sosial sekaligus mengatasi tantangan yang muncul dalam masyarakat yang beragam.

Sejarah imigrasi Australia telah berlangsung lebih dari dua abad, dimulai dengan para pemukim Inggris awal dan berlanjut dengan gelombang besar migran dari Eropa, Asia, Timur Tengah, dan Afrika. Kebijakan imigrasi pasca-Perang Dunia II menjadi kunci dalam mengubah

Australia menjadi masyarakat multikultural. Penghapusan Kebijakan Australia Kulit Putih (*White Australia Policy*) pada tahun 1970-an menandai perubahan penting dalam identitas nasional, dengan negara tersebut merangkul keberagaman budaya sebagai landasan pembangunan sosial dan ekonominya (Holland, 2010).

Multikulturalisme secara resmi diadopsi sebagai kebijakan publik pada tahun 1970-an, yang mengakui pentingnya melestarikan identitas budaya sambil mempromosikan integrasi sosial. Kerangka kebijakan ini memungkinkan para migran untuk mempertahankan warisan budaya mereka sambil berpartisipasi penuh dalam masyarakat Australia. Pemerintah Australia mendukung visi ini melalui program-program yang dirancang untuk membantu para pendatang baru dalam berintegrasi ke dalam masyarakat, seperti kelas bahasa Inggris, dukungan pekerjaan, dan inisiatif keterlibatan masyarakat. Fokus ganda pada keberagaman budaya dan inklusi sosial ini menjadi ciri khas identitas Australia dan terus membentuk lanskap kebijakan sosialnya saat ini (Elias et al., 2021).

Kebijakan sosial Australia mencerminkan komitmennya terhadap kesetaraan dan inklusivitas, dengan memastikan bahwa semua individu, terlepas dari latar belakang budaya mereka, memiliki akses ke layanan dan peluang dasar. Kebijakan ini sangat penting dalam masyarakat multikultural di mana populasi mungkin memiliki kebutuhan yang berbeda, khususnya di bidang-bidang seperti pendidikan, perawatan kesehatan, dan kesejahteraan sosial (O'Flynn et al., 2011).

Sistem perawatan kesehatan universal Australia, *Medicare*, memastikan bahwa semua penduduk, termasuk migran dan pengungsi, memiliki akses ke layanan medis. Sistem ini dirancang untuk mengurangi hambatan finansial terhadap perawatan kesehatan dan meningkatkan hasil kesehatan di semua kelompok populasi. Yang terpenting, layanan kesehatan disesuaikan untuk memenuhi berbagai kebutuhan populasi multikultural Australia. Misalnya, layanan penerjemahan dan interpretasi tersedia secara luas di rumah sakit dan klinik untuk membantu pasien dengan kemampuan bahasa Inggris terbatas. Selain itu, program khusus tersedia untuk mengatasi tantangan kesehatan khusus yang dihadapi oleh migran, seperti dukungan kesehatan mental bagi pengungsi yang mungkin mengalami trauma (Dugdale, 2020).

Pendidikan merupakan bidang penting lainnya yang bersinggungan dengan kebijakan sosial dengan multikulturalisme. Sistem pendidikan Australia menekankan akses yang sama terhadap pendidikan berkualitas bagi semua siswa, apa pun latar belakangnya. Program seperti inisiatif Bahasa Inggris sebagai Bahasa Tambahan (*English as an Additional Language*, EAL) memberikan dukungan kepada siswa dari latar belakang yang tidak berbahasa Inggris,

memastikan mereka dapat berpartisipasi penuh di kelas dan meraih keberhasilan akademis. Selain itu, sekolah dan universitas di Australia semakin banyak memasukkan pendidikan multikultural ke dalam kurikulum mereka, mengajarkan siswa untuk menghargai keberagaman dan memahami berbagai perspektif budaya (Maritz et al., 2021).

Pada saat yang sama, Australia memiliki kebijakan yang bertujuan untuk menutup kesenjangan pendidikan antara siswa pribumi dan non-pribumi, aspek penting dari komitmennya terhadap kesetaraan sosial. Meskipun populasi pribumi berbeda dari komunitas migran, kedua kelompok tersebut menghadapi tantangan unik dalam mengakses pendidikan, dan upaya pemerintah untuk mendukung keduanya menyoroti tujuan utamanya yaitu inklusivitas (Maritz et al., 2021).

Sistem kesejahteraan sosial Australia dirancang untuk mendukung individu dan keluarga yang menghadapi kesulitan keuangan, dengan perhatian khusus pada populasi yang rentan, termasuk migran dan pengungsi. *Centrelink*, badan pemerintah yang bertanggung jawab untuk memberikan pembayaran jaminan sosial, memberikan bantuan keuangan kepada mereka yang membutuhkan, terlepas dari latar belakang budaya atau etnis mereka. Program-program seperti tunjangan pengangguran, dukungan pengasuhan anak, dan pensiun usia lanjut membantu memastikan bahwa semua warga Australia dapat hidup dengan bermartabat dan aman (Humphries, 2020).

Untuk migran, terutama pengungsi dan pencari suaka, pemerintah Australia menawarkan program dukungan khusus untuk memfasilitasi integrasi ke dalam masyarakat. Ini termasuk layanan pemukiman, pelatihan kerja, dan bantuan perumahan. Program Pemukiman Kemanusiaan (*Humanitarian Settlement Program* atau HSP), misalnya, memberikan dukungan khusus untuk pengungsi yang baru tiba, membantu mereka mengakses layanan penting, menemukan perumahan, dan mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan untuk integrasi yang sukses ke dalam masyarakat Australia (Vogl et al., 2020).

Meskipun kebijakan sosial Australia sebagian besar berhasil dalam mempromosikan kesetaraan dan inklusi, tantangan tetap ada dalam memastikan bahwa semua segmen populasi dapat memperoleh manfaat penuh dari kebijakan ini. Salah satu tantangan utama adalah mengatasi kesenjangan sosial ekonomi yang masih ada di antara komunitas migran tertentu dan penduduk asli Australia. Banyak migran, terutama mereka yang berasal dari latar belakang non-penutur bahasa Inggris, menghadapi hambatan dalam pekerjaan dan partisipasi ekonomi, yang dapat membatasi akses mereka ke perumahan, pendidikan, dan perawatan kesehatan (Collins, 2020).

Selain itu, terlepas dari upaya pemerintah untuk mempromosikan kohesi sosial, isu rasisme dan diskriminasi terkadang muncul, yang mengancam rasa inklusivitas yang merupakan inti dari identitas multikultural Australia. Respons kebijakan publik terhadap isu-isu ini, seperti undang-undang antidiskriminasi dan kampanye kesadaran publik, bertujuan untuk mengurangi prasangka dan menumbuhkan rasa saling menghormati di antara kelompok budaya yang berbeda. Namun, upaya berkelanjutan diperlukan untuk memastikan bahwa semua warga Australia merasa diterima dan dihargai dalam masyarakat mereka (Collins, 2020).

Seiring dengan pertumbuhan dan diversifikasi Australia, prinsip-prinsip multikulturalisme akan tetap penting untuk membentuk masa depannya. Kebijakan publik perlu beradaptasi dengan kebutuhan yang terus berkembang dari populasi yang semakin multikultural, mengatasi tantangan yang muncul sambil terus mempromosikan inklusivitas dan kohesi sosial. Kebijakan yang mendukung integrasi migran, mengatasi kesenjangan sosial ekonomi, dan memerangi diskriminasi akan sangat penting untuk mempertahankan keberhasilan Australia sebagai negara multicultural (Elias et al., 2021).

Selain itu, dengan globalisasi dan peningkatan mobilitas, multikulturalisme Australia menghadirkan peluang yang signifikan untuk pengayaan ekonomi dan budaya. Populasi negara yang beragam menyediakan banyak pengetahuan, keterampilan, dan koneksi global, yang memposisikan Australia sebagai pemain yang dinamis dalam komunitas internasional (Elias et al., 2021).

Kebijakan sosial Australia mencerminkan komitmen mendalam terhadap inklusivitas dan kesetaraan, yang memastikan bahwa semua individu, terlepas dari latar belakang budaya atau etnis mereka, memiliki akses ke layanan dan peluang penting. Dengan mempromosikan program perawatan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial yang memenuhi kebutuhan populasi multikultural, Australia telah membangun fondasi yang kuat untuk kohesi sosial dan identitas nasional. Namun, tantangan ketidaksetaraan sosial ekonomi dan diskriminasi sesekali menggarisbawahi perlunya upaya berkelanjutan dalam menyempurnakan kebijakan ini. Pada akhirnya, komitmen Australia terhadap multikulturalisme, yang didukung oleh kebijakan sosialnya yang kuat, akan tetap menjadi kekuatan utama dalam menavigasi masa depannya sebagai negara yang beragam dan inklusif (Elias et al., 2021).

2) Kebijakan Publik Australia tentang Agama

Kebijakan publik Australia mengenai agama didasarkan pada prinsip kebebasan beragama, sekularisme, dan toleransi. Negara ini dikenal dengan pendekatan inklusifnya, memungkinkan orang-orang dari semua agama atau tanpa agama untuk hidup berdampingan

dengan damai dalam kerangka demokrasi. Kerangka kebijakan ini bertujuan untuk melindungi hak-hak individu sambil memastikan bahwa institusi dan praktik keagamaan tidak mengganggu hukum dan hak-hak orang lain (Althaus et al., 2022).

Konstitusi Australia, khususnya Pasal 116, menjamin kebebasan beragama dengan menyatakan bahwa pemerintah tidak dapat: menetapkan agama negara, mewajibkan pelaksanaan ibadah agama tertentu, melarang pelaksanaan bebas agama apapun, dan mensyaratkan uji agama sebagai kualifikasi untuk jabatan publik (*the government cannot: establish a state religion, impose any religious observance, prohibit the free exercise of any religion, and require a religious test as a qualification for any public office*). Ketentuan konstitusi ini memastikan bahwa Australia tetap menjadi negara sekuler, di mana agama dan pemerintah terpisah, serta warga negara bebas menjalankan keyakinan mereka tanpa campur tangan dari negara (Chavura et al., 2019).

Kebebasan beragama adalah hak mendasar di Australia, didukung oleh undang-undang nasional dan perjanjian internasional. Warga Australia bebas menganut agama apapun yang mereka pilih, atau tidak beragama sama sekali, tanpa takut akan diskriminasi atau penganiayaan. Organisasi keagamaan memiliki hak untuk beroperasi secara bebas, mendirikan tempat ibadah, dan menyelenggarakan acara keagamaan. Namun, kebebasan beragama tidak bersifat mutlak. Pemerintah dapat memberlakukan pembatasan jika praktik keagamaan bertentangan dengan undang-undang lain atau hak asasi manusia. Sebagai contoh, praktik yang mempromosikan kekerasan atau merusak kohesi sosial dapat dibatasi oleh hukum (Randell-Moon, 2013).

Australia secara resmi adalah masyarakat sekuler, yang berarti pemerintah tidak mendukung agama apapun, dan institusi keagamaan tidak memiliki kekuasaan formal atas kebijakan publik atau lembaga pemerintah. Meskipun agama memainkan peran pribadi dan budaya bagi banyak warga Australia, negara tetap bersikap netral dalam hal-hal yang berkaitan dengan agama. Namun, agama masih terlihat dalam kehidupan publik. Misalnya, sekolah agama, lembaga amal, dan rumah sakit beroperasi di negara ini, dan banyak yang menerima dana publik, terutama di sektor pendidikan. Pemimpin dan organisasi keagamaan juga bebas berpartisipasi dalam debat publik mengenai isu moral atau sosial, seperti kesetaraan pernikahan, eutanasia, atau aborsi, meskipun pengaruh mereka lebih melalui advokasi, bukan kewenangan pemerintah (Chavura et al., 2019).

Australia adalah negara dengan keragaman agama, di mana Kristen menjadi agama yang paling banyak dianut, diikuti oleh Islam, Buddhisme, Hinduisme, dan Yudaisme, serta semakin banyak orang yang mengidentifikasi diri sebagai tidak beragama. Kebijakan multikultural

negara ini merangkul keragaman agama sebagai bagian dari pendekatan inklusivitas yang lebih luas. Pemerintah mengakui pentingnya mempromosikan dialog antaragama dan kohesi sosial. Inisiatif telah diterapkan untuk mendukung pemahaman antaragama dan melawan diskriminasi agama. Acara publik, forum, dan program pendidikan sering menyoroti pentingnya menghormati keragaman agama (Elias et al., 2021).

Terkait aturan tentang anti-diskriminasi, kerangka anti-diskriminasi Australia mencakup ketentuan untuk melindungi individu dari diskriminasi atas dasar agama. Baik undang-undang federal maupun negara bagian melarang diskriminasi agama dalam bidang seperti pekerjaan, pendidikan, perumahan, dan akses terhadap layanan. Sebagai contoh, *Racial Discrimination Act* (1975) dan berbagai undang-undang negara bagian, seperti *Anti-Discrimination Act* di New South Wales, melindungi individu dari perlakuan tidak adil karena keyakinan atau praktik agama mereka. Pada saat yang sama, lembaga keagamaan sering kali memiliki pengecualian yang memungkinkan mereka untuk mempekerjakan karyawan sesuai dengan doktrin agama mereka, terutama di sekolah agama atau lembaga amal (Baines, 2013).

Terkait pendidikan agama, kebijakan publik mengenai pendidikan agama di Australia bersifat fleksibel, mencerminkan keragaman keyakinan agama dan sekuler di negara tersebut. Sekolah-sekolah negeri bersifat sekuler, tetapi mereka memperbolehkan pengajaran agama pada waktu tertentu, yang disediakan oleh kelompok agama eksternal, di bawah kerangka yang dikenal sebagai *Special Religious Education* (SRE) atau Kelas Etika Khusus (*Special Ethics Classes*). Orang tua dapat memilih apakah anak-anak mereka akan mengikuti kelas ini, dan tersedia alternatif bagi mereka yang tidak ingin terlibat dalam pengajaran agama. Selain itu, Australia memiliki banyak sekolah agama swasta, terutama sekolah Katolik, Anglikan, dan Islam, yang menerima dana dari pemerintah dan beroperasi sesuai dengan standar pendidikan negara sambil mengintegrasikan ajaran agama ke dalam kurikulum mereka (Firth, 2022).

Dalam beberapa tahun terakhir, telah terjadi perdebatan publik yang berkelanjutan mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Diskriminasi Agama (*Religious Discrimination Bill*), yang diusulkan untuk memberikan perlindungan tambahan bagi individu dan organisasi keagamaan, terutama terkait kebebasan berpendapat dan keyakinan agama. RUU ini bertujuan untuk memastikan bahwa orang-orang beragama tidak didiskriminasi dalam berbagai situasi karena keyakinan mereka. Namun, RUU ini menjadi kontroversial, dengan kekhawatiran bahwa hal itu dapat bertentangan dengan undang-undang anti-diskriminasi yang sudah ada, terutama yang melindungi hak-hak LGBTQ+. Perdebatan ini menyoroti tantangan dalam menyeimbangkan kebebasan beragama dengan hak-hak kelompok minoritas lainnya, yang merupakan isu penting dalam kebijakan publik modern di Australia (Abordo & Deagon, 2023).

Kebijakan publik Australia juga menangani kekhawatiran terkait ekstremisme agama, terutama dalam konteks keamanan nasional. Menyusul peristiwa global terkait terorisme, kebijakan Australia telah mencakup langkah-langkah untuk melawan ekstremisme kekerasan, dengan fokus pada pencegahan dan keterlibatan komunitas. Pemerintah bekerja sama dengan pemimpin agama dan komunitas untuk mencegah radikalisasi dan mempromosikan interpretasi agama yang damai dan moderat. Program-program seperti *Countering Violent Extremism Strategy* bertujuan untuk membangun ketahanan di masyarakat dan mendukung individu rentan yang berisiko teradikalisasi (Harris-Hogan et al., 2016).

Kebijakan publik Australia mengenai agama mencapai keseimbangan antara mempromosikan kebebasan beragama (*freedom of religion*) dan memastikan pemerintahan sekuler (*secular governance*). Sementara warga negara menikmati hak untuk menjalankan keyakinan mereka dengan bebas, negara tetap netral dan menegakkan hukum yang melindungi individu dari diskriminasi. Seiring dengan terus beragamnya populasi Australia, kebijakan publik perlu beradaptasi untuk memastikan bahwa hak semua kelompok agama dihormati sambil menjaga keharmonisan sosial dalam masyarakat multicultural (Abordo & Deagon, 2023).

Pemerintah Australia menekankan keharmonisan antaragama dan mendukung masyarakat yang pluralis di mana individu bebas untuk menjalankan agama apapun atau tidak beragama sama sekali. Hukum Australia melindungi kebebasan beragama dan melarang diskriminasi agama, serta mempromosikan kohesi sosial melalui kebijakan multikultural. Oleh karena itulah, masyarakat Muslim Australia berusaha menjalankan nilai-nilai Islam yang moderat. Untuk mendukung keberagamaan yang moderat ini, antara lain, Darul Fatwa Australiamenjalinkan kerja sama dengan Kementerian Agama Republik Indonesia dalam bidang diseminasi moderasi beragama (Firmansyah, 2022).

3) Kebijakan Australia tentang Pendidikan

Kebijakan pemerintah Australia mengenai pendidikan menekankan pentingnya menyediakan pendidikan yang berkualitas tinggi, adil, dan dapat diakses oleh semua warga negara. Kebijakan ini beroperasi di bawah kerangka federal, dengan tanggung jawab yang dibagi antara pemerintah nasional dan pemerintah negara bagian/teritori. Australia bertujuan untuk memastikan bahwa semua anak memiliki akses ke pendidikan wajib mulai dari Taman Kanak-Kanak hingga Kelas 12. Pemerintah menyediakan dana untuk sekolah negeri dan swasta, memastikan bahwa semua siswa, tanpa memandang latar belakang, dapat mengakses pendidikan (Isri, 2015).

Australia memiliki kurikulum nasional yang dikenal sebagai *Australian Curriculum*, yang menguraikan bidang-bidang pembelajaran utama untuk pendidikan dasar dan menengah. Ini mencakup mata pelajaran seperti Bahasa Inggris, matematika, sains, sejarah, dan seni. Kurikulum ini bertujuan untuk mendorong berpikir kritis, kreativitas, dan kesadaran global pada siswa. Sistem pendidikan di Australia mencakup campuran sekolah negeri (didanai oleh pemerintah) dan sekolah swasta (termasuk sekolah agama dan independen). Sekolah negeri dikelola oleh pemerintah negara bagian dan gratis untuk semua siswa (dengan beberapa biaya untuk kegiatan ekstrakurikuler), sementara sekolah swasta, termasuk sekolah agama, menerima dana dari pemerintah dan dapat memungut biaya sekolah (Isri, 2015).

Pendidikan terutama didanai melalui kombinasi pendanaan dari pemerintah federal dan negara bagian. Reformasi Gonski memperkenalkan model pendanaan berbasis kebutuhan, yang mengalokasikan sumber daya berdasarkan kebutuhan siswa, dengan lebih banyak dana diarahkan ke sekolah-sekolah yang kurang beruntung. Reformasi Gonski merujuk pada serangkaian perubahan signifikan pada sistem pendanaan sekolah di Australia, berdasarkan rekomendasi dari tinjauan tahun 2011 yang dipimpin oleh pengusaha David Gonski. Tujuan dari reformasi ini adalah untuk menciptakan model pendanaan berbasis kebutuhan guna meningkatkan kesetaraan dalam pendidikan dan mengatasi kesenjangan antara sekolah-sekolah (Keating & Klatt, 2013).

Pemerintah Australia mendukung pendidikan tinggi melalui sistem universitas dan institusi Pendidikan dan Pelatihan Kejuruan (*Vocational Education and Training* atau VET). Program Pinjaman Pendidikan Tinggi (*Higher Education Loan Program* atau HELP) menyediakan pinjaman berbasis pendapatan untuk membantu mahasiswa menutupi biaya kuliah, memastikan bahwa pendidikan tinggi tetap dapat diakses. Pemerintah memprioritaskan kebijakan pendidikan inklusif, dengan fokus pada akses yang adil bagi siswa dari latar belakang kurang mampu, komunitas pribumi, dan penyandang disabilitas. Inisiatif seperti *Closing the Gap* bertujuan untuk meningkatkan hasil pendidikan bagi masyarakat pribumi Australia. Dana dan dukungan khusus juga diberikan kepada siswa penyandang disabilitas (Kenway, 2013).

Pemerintah menempatkan penekanan besar pada pendidikan anak usia dini, dengan mempromosikan program seperti *Universal Access to Early Childhood Education*, yang bertujuan untuk memastikan bahwa anak-anak memiliki akses ke pendidikan prasekolah berkualitas sebelum memasuki sekolah dasar (Molla & Nolan, 2019). Selain itu, pemerintah Australia berkomitmen untuk memastikan pengajaran yang berkualitas tinggi dengan berinvestasi dalam pelatihan guru dan pengembangan profesional. Para guru diharuskan memenuhi standar nasional, dan program-program telah diterapkan untuk meningkatkan

kualitas pengajaran, terutama di bidang STEM (*Science, Technology, Engineering, and Mathematics*) (DeCoito et al., 2016).

Australia adalah tujuan populer bagi mahasiswa internasional, dan pemerintah memiliki kebijakan untuk mengatur dan mendukung sektor pendidikan internasional. *Education Services for Overseas Students (ESOS) Act* memastikan bahwa mahasiswa internasional menerima pendidikan berkualitas dan dilindungi oleh hukum Australia. Pemerintah mendorong penggunaan teknologi dalam pendidikan, mempromosikan literasi digital dan platform pembelajaran daring untuk mempersiapkan siswa menghadapi ekonomi digital. Kebijakan juga mendukung inovasi dalam pendidikan melalui hibah dan program yang berfokus pada peningkatan pembelajaran melalui teknologi (Ogawa, 2007).

Kebijakan pendidikan Australia berfokus pada penyediaan sistem pendidikan yang inklusif dan berkualitas tinggi yang mendukung pembelajaran sepanjang hayat. Pemerintah berkomitmen untuk memastikan bahwa pendidikan dapat diakses oleh semua warga Australia, mempromosikan kesetaraan kesempatan sambil mempertahankan standar tinggi dalam pencapaian akademik dan kejuruan (Kenway, 2013).

Pendidikan agama dan pendidikan multikultural di Australia adalah dua aspek penting dari sistem pendidikan negara ini, yang mencerminkan masyarakatnya yang beragam dan komitmennya terhadap inklusivitas. Pendidikan agama di Australia biasanya ditawarkan di sekolah negeri dan swasta. Di sekolah negeri, pendidikan agama sering berbentuk *Special Religious Education (SRE)* atau *Special Ethics Classes*. Ini memungkinkan siswa menerima pengajaran agama yang diberikan oleh organisasi agama eksternal pada jam tertentu, terpisah dari kurikulum standar. Orang tua dapat memilih apakah anak mereka mengikuti kelas-kelas ini atau tidak (Firth, 2022).

Banyak sekolah swasta di Australia, termasuk sekolah Katolik, Anglikan, dan Islam, mengintegrasikan pendidikan agama ke dalam kurikulum mereka. Sekolah-sekolah ini menerima pendanaan dari pemerintah tetapi beroperasi secara independen dan mengikuti doktrin agama mereka sambil menyediakan pendidikan standar (Jafralie & Zaver, 2019).

Pendidikan agama, baik di lingkungan sekolah negeri maupun swasta, sering kali menekankan pengembangan moral dan etika. Pendidikan ini bertujuan untuk mempromosikan nilai-nilai seperti rasa hormat, toleransi, dan pemahaman terhadap berbagai sistem kepercayaan. Orang tua memiliki hak untuk memutuskan apakah anak mereka mengikuti program pendidikan agama atau tidak. Alternatif tersedia bagi mereka yang memilih instruksi non-agama (Jafralie & Zaver, 2019).

Australia adalah masyarakat multikultural dengan kekayaan budaya, bahasa, dan agama yang beragam. Dengan demikian, pendidikan multikultural merupakan hal yang sangat penting, yang bertujuan untuk mengenali dan merayakan keberagaman ini, serta mempromosikan pemahaman dan rasa hormat di antara siswa dari latar belakang yang berbeda. Kurikulum Australia mencakup konten yang mencerminkan sifat multikultural negara ini. Ini melibatkan pengajaran kepada siswa tentang berbagai budaya, sejarah, dan perspektif, serta menumbuhkan apresiasi terhadap keberagaman. Pendidikan multikultural mempromosikan kohesi sosial dan membantu siswa mengembangkan kompetensi antarbudaya. Sekolah sering mengadakan acara, forum, dan kegiatan yang mendorong siswa untuk saling berinteraksi dan belajar satu sama lain (Firth, 2022).

Pemerintah Australia telah menerapkan berbagai kebijakan untuk melawan diskriminasi dan mempromosikan inklusivitas di sekolah. Kebijakan-kebijakan ini mendukung siswa dari latar belakang beragam dan bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman. Sekolah sering bekerja sama dengan komunitas lokal dan organisasi untuk meningkatkan pendidikan multikultural. Ini bisa melibatkan pembicara tamu, hari budaya, dan kemitraan dengan kelompok masyarakat untuk memberikan pengalaman langsung kepada siswa terkait budaya yang berbeda (Baines, 2013).

Pendidikan agama dan pendidikan multikultural di Australia sangat penting dalam membina masyarakat yang inklusif, penuh rasa hormat, dan harmonis. Dengan menyediakan kesempatan bagi siswa untuk belajar tentang berbagai keyakinan dan budaya, sistem pendidikan bertujuan untuk mempersiapkan generasi muda Australia agar berhasil dalam dunia yang beragam dan saling terhubung. Kedua bentuk pendidikan ini mendorong toleransi, pemahaman, dan apresiasi terhadap keberagaman kaya yang menjadi ciri khas masyarakat Australia.

B. *Australian Value: Prinsip Moderat dalam Keragaman*

Nilai-nilai Australia meliputi rasa hormat terhadap kebebasan dan martabat individu; kebebasan beragama (termasuk kebebasan untuk tidak menganut agama tertentu), kebebasan berbicara, dan kebebasan berserikat; komitmen terhadap *the rule of law*, yang berarti bahwa semua orang tunduk pada hukum dan harus mematuhi; demokrasi parlementer, di mana undang-undang Australia ditentukan oleh parlemen yang dipilih oleh rakyat, di mana undang-undang tersebut menjadi yang terpenting dan mengesampingkan hukum agama atau hukum sekuler lainnya yang tidak konsisten; kesetaraan kesempatan bagi semua orang, terlepas dari gender, orientasi seksual, usia, disabilitas, ras, atau asal kebangsaan atau etnis mereka; sebuah

jalan yang adil untuk semua yang merangkul prinsip saling menghormati, toleransi, kasih sayang untuk mereka yang membutuhkan bantuan, persamaan kesempatan untuk semua; dan bahasa Inggris sebagai bahasa nasional, dan sebagai elemen pemersatu yang penting dalam masyarakat Australia (Australian Government, 2020).

Berdasarkan kebijakan dari pemerintah Australia, semua pemohon visa untuk memasuki wilayah Australia harus menandatangani Pernyataan Nilai Australia, yang mengakui nilai-nilai Australia dan berjanji untuk bertindak sesuai dengan nilai tersebut. Pernyataan nilai-nilai bersama tidak menuntut untuk membuat semua orang menjadi sama dengan keyakinan yang sama. Nilai-nilai ini telah diperkenalkan dan didiskusikan oleh orang Australia selama bertahun-tahun dan telah membantu Australia untuk menyambut jutaan orang dari banyak kelompok etnis dan tradisi. Tujuannya adalah untuk membantu penduduk baru dan calon warga negara Australia memahami nilai-nilai dasar yang telah membantu menciptakan dan mempertahankan masyarakat multikultural yang sukses. Di Australia, orang memiliki banyak kebebasan. Namun, setiap orang diharuskan untuk mematuhi hukum Australia, yang telah diberlakukan oleh pemerintah yang dipilih secara demokratis untuk mempertahankan masyarakat yang tertib, bebas dan aman (Braithwaite, 1995).

Nilai-nilai Australia, yang diyakini warga Australia secara bersama-sama, didasarkan pada asas kebebasan, rasa hormat, keadilan dan kesetaraan. Sangat penting bagi masyarakat Australia berpegang pada nilai-nilai ini agar Australia tetap menjadi tempat tinggal yang aman, makmur, dan damai, dan itu membantu Australia menjadi salah satu masyarakat multikultural paling sukses di dunia. Meskipun sebagian besar nilai-nilai ini juga dimiliki banyak negara lain, nilai-nilai tersebut telah disesuaikan dengan pengaturan unik Australia, dan dibentuk melalui pemukiman jutaan orang dari seluruh dunia di Australia. Meskipun mungkin diungkapkan secara berbeda oleh orang yang berbeda, namun artinya tetap sama. Nilai-nilai ini menentukan dan membentuk negara dan budaya Australia dan itu merupakan alasan mengapa begitu banyak orang ingin menjadi warga Australia. Nilai-nilai tersebut dijelaskan sebagai berikut (Australian Government, 2020).

1. Menghormati kebebasan dan martabat individu (*Respect for the freedom and dignity of the individual*)

Di Australia, individu harus menghormati kebebasan dan martabat orang lain, serta pendapat dan pilihan mereka. Merupakan pelanggaran hukum siapapun yang melakukan kekerasan terhadap orang lain. Segala bentuk kekerasan, termasuk pelecehan secara verbal

maupun fisik, adalah ilegal. Warga Australia percaya pada perselisihan yang damai dan di atas segalanya hak untuk aman dan bebas dari kekerasan dan intimidasi.

2. Kebebasan beragama (*Freedom of religion*)

Australia tidak memiliki agama nasional resmi dan orang-orang di Australia bebas menganut agama apa pun yang mereka pilih. Pemerintah memperlakukan semua warga negaranya setara, apa pun agama atau keyakinan mereka. Namun, praktik keagamaan tidak boleh melanggar hukum Australia. Orang-orang di Australia juga dapat memilih untuk tidak menganut suatu agama. Hukum agama tidak memiliki status hukum di Australia. Hukum Australia harus dipatuhi oleh semua orang di Australia, termasuk hal-hal yang berbeda dengan hukum agama. Intoleransi agama tidak dapat diterima dalam masyarakat Australia. Semua orang harus diberi kesempatan yang sama untuk mengejar tujuan dan kepentingan mereka terlepas dari etnis atau agama mereka asalkan mereka mematuhi hukum Australia.

3. Kebebasan berbicara (*Freedom of speech*)

Orang-orang di Australia harus dapat mengekspresikan ide-idenya dengan bebas, asalkan ini sesuai dengan hukum. Di Australia, orang bebas bertemu di tempat umum atau pribadi untuk diskusi sosial atau politik. Orang juga bebas untuk mengatakan dan menulis apa yang mereka pikir tentang topik apa pun dan mendiskusikan ide-ide mereka dengan orang lain. Koran, televisi dan radio memiliki kebebasan yang sama. Mempromosikan kekerasan terhadap orang lain atau sekelompok orang (misalnya karena budaya, etnis, agama atau latar belakang) tidak pernah dapat diterima karena bertentangan dengan nilai dan hukum Australia. Juga ilegal untuk membuat tuduhan palsu atau mendorong orang lain untuk melanggar hukum. Kebebasan berbicara dan kebebasan berekspresi orang lain harus dihormati, asalkan ekspresi tersebut sah menurut hukum.

4. Kebebasan berserikat (*Freedom of association*)

Di Australia, orang bebas untuk bergabung atau keluar dari kelompok apapun secara sukarela asal sesuai dengan hukum. Orang bebas untuk bergabung dengan organisasi legal apa pun, seperti partai politik, serikat buruh, dan kelompok agama, budaya, atau sosial. Individu tidak dapat dipaksa untuk bergabung dengan atau keluar dari suatu organisasi. Warga Australia dapat berkumpul secara bebas dengan orang lain, termasuk untuk memprotes Tindakan pemerintah atau organisasi. Warga Australia diizinkan untuk memprotes tindakan pemerintah secara damai, karena toleransi terhadap protes publik yang damai merupakan bagian penting dari demokrasi. Namun, semua protes harus sesuai

dengan hukum. Ini berarti harus damai, dan tidak boleh melukai siapa pun atau merusak properti.

5. Komitmen terhadap *Rule of Law (Commitment to the Rule of Law)*

Semua warga negara Australia dilindungi oleh hukum dan sistem hukum. Warga Australia menyadari pentingnya hukum dalam menjaga masyarakat yang damai dan tertib. Di bawah *Rule of Law*, semua warga Australia setara dalam kaitannya dengan hukum dan tidak ada orang atau kelompok yang berada di atas hukum. Di Australia, setiap orang harus mematuhi hukum dan tidak boleh melanggarnya kapan pun, dan jika melanggar hukum akan diberikan hukuman. Semua orang yang ada di wilayah Australia harus tetap mematuhi hukum meskipun tidak ada orang lain yang melihat. Hukum Australia berlaku untuk semua orang di Australia. Ini berarti terlepas dari latar belakang atau budaya, siapapun harus mematuhi hukum Australia.

6. Demokrasi parlementer (*Parliamentary democracy*)

Sistem pemerintahan Australia adalah demokrasi parlementer. Hukum kita ditentukan oleh parlemen yang dipilih oleh rakyat. Ini berarti bahwa warga negara Australia dilibatkan dalam pengaturan negara. Kekuasaan pemerintah berasal dari rakyat Australia karena warga negara Australia memilih orang untuk mewakili mereka di parlemen.

7. Kesetaraan kesempatan bagi semua orang (*Equality of opportunity for all people*)

Masyarakat Australia menghargai persamaan hak semua orang, tanpa memandang gender, orientasi seksual, usia, disabilitas, agama, ras, atau asal kebangsaan atau etnis. Ada sejumlah undang-undang di Australia yang melindungi orang agar tidak diperlakukan secara berbeda dari orang lain. Undang-undang di Australia diterapkan sehingga orang-orang dari latar belakang yang berbeda tidak diberikan perlakuan istimewa. Laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama di Australia dan harus diberi kesempatan yang sama untuk mengejar tujuan dan kepentingan mereka. Merupakan pelanggaran hukum untuk mendiskriminasi terhadap orang karena gendernya. Baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak untuk membuat pilihan sendiri tentang masalah pribadi, seperti pernikahan dan agama, dan dilindungi oleh hukum dari intimidasi atau kekerasan.

8. 'Jalan yang adil' untuk semua (*A 'fair go' for all*)

Di Australia, kita percaya bahwa setiap orang berhak mendapatkan 'jalan yang adil' dan bahwa semua orang seharusnya tidak dibatasi oleh perbedaan kelas apa pun. Setiap orang, apa pun latar belakangnya, diberikan kesempatan yang sama untuk mencapai sukses dalam

kehidupan. Memastikan bahwa setiap orang memiliki hak hukum yang sama merupakan aspek penting keadilan dalam masyarakat Australia. Apa yang dicapai orang dalam kehidupan seharusnya merupakan hasil dari kerja keras dan bakat mereka. Banyak migran baru di Australia telah menjadi pemimpin dalam bisnis, profesi, kesenian, layanan publik, dan olahraga melalui upaya kerja keras dan usaha mereka.

9. Saling menghormati dan toleransi terhadap orang lain (*Mutual Respect and tolerance for others*)

Australia menghargai prinsip saling menghormati dan toleransi. Ini berarti mendengarkan orang lain dan menghormati pandangan dan pendapat mereka, meskipun berbeda dengan yang Anda miliki. Orang harus bertoleransi satu sama lain biarpun mereka tidak setuju satu sama lain. Rasisme tidak diterima di Australia. Ini termasuk membuat atau membagikan materi yang menyinggung secara rasial di internet atau publikasi lain dan membuat komentar rasial yang melecehkan orang di tempat umum atau di acara olahraga. Jika mengalami rasisme, Anda juga dapat mengajukan keluhan ke Komisi Hak Asasi Manusia Australia (*Australian Human Rights Commission*).

10. Kasih sayang bagi mereka yang membutuhkan bantuan (*Compassion for those in need*)

Orang Australia menghargai persahabatan (*mateship*). Kita membantu satu sama lain pada saat dibutuhkan. Misalnya, membawa makanan kepada tetangga lansia, mengantar teman ke janji medis, atau mengunjungi orang yang sakit, lemah atau kesepian. Dalam semangat persahabatan ini, Australia memiliki tradisi yang kuat dalam pelayanan masyarakat dan pekerjaan sukarela, untuk saling menjaga dan memperkuat masyarakat. Menjadi sukarelawan merupakan kesempatan bagus untuk berbagi pengetahuan, mempelajari keterampilan baru, dan meningkatkan integrasi ke dalam masyarakat Australia serta rasa menjadi bagian masyarakat Australia. Ada banyak kesempatan untuk menjadi sukarelawan di Australia.

11. Bahasa Inggris sebagai bahasa nasional (*English as the national language*)

Masyarakat Australia menghargai bahasa Inggris sebagai bahasa nasional Australia, dan sebagai elemen pemersatu yang penting dalam masyarakat. Orang yang tinggal di Australia harus berusaha untuk belajar bahasa Inggris. Belajar berbicara bahasa Inggris penting karena membantu orang mendapatkan pendidikan, pekerjaan, dan lebih berintegrasi ke dalam masyarakat. Ini penting untuk partisipasi ekonomi dan kohesi sosial.

Nilai-nilai Australia mencerminkan prinsip-prinsip yang memandu identitas, budaya, dan perilaku sosial bangsa. Nilai-nilai ini membentuk fondasi interaksi sosial dan kehidupan publik di Australia. Australia adalah negara multikultural, dan menjadi orang Australia berarti merangkul keragaman. Warga Australia bangga dengan perpaduan budaya negara mereka, yang memperkaya masyarakat dan menumbuhkan rasa saling menghormati di antara orang-orang dengan latar belakang berbeda. Banyak orang Australia merasakan hubungan yang kuat dengan lanskap unik negara ini, mulai dari pantai dan gurun hingga padang semak. Hubungan ini juga berakar kuat dalam budaya Pribumi, di mana tanah ini memiliki makna spiritual yang mendalam. Selain itu, menjadi warga Australia sangat erat kaitannya dengan gagasan untuk memberikan “kesempatan yang adil” (*a 'fair go'*) kepada semua orang, yang berarti memastikan peluang yang sama bagi semua orang, apa pun latar belakangnya. Ini adalah tentang memperlakukan orang dengan adil dan hormat, menghargai persahabatan (*mateship*, ikatan persahabatan yang kuat), dan saling menjaga satu sama lain. Warga Australia menghargai kebebasan pribadi dan partisipasi demokratis. Menjadi orang Australia berarti menghormati kebebasan ini sambil berkontribusi pada masyarakat yang damai dan teratur (Australian Government, 2020).

C. Koeksistensi Harmonis dalam Masyarakat Plural dan Multikultural

Salah satu ciri khas masyarakat Australia saat ini adalah keragaman budaya warganya dan sejauh mana mereka dipersatukan oleh suatu komitmen yang utama dan pemersatu pada Australia. Ciri khas lainnya adalah sifat demokratis masyarakat Australia. Ini tidak berarti bahwa setiap orang adalah sama atau setiap orang memiliki kekayaan atau harta yang sama. Ini berarti bahwa dengan kerja keras dan komitmen, orang-orang tanpa koneksi tingkat tinggi atau pelindung yang berpengaruh dapat meraih kesuksesan. Dalam kerangka hukum Australia, semua warga Australia dapat mengekspresikan budaya dan kepercayaan mereka dan berpartisipasi secara bebas dalam kehidupan nasional Australia. Australia memegang teguh keyakinan bahwa tidak seorang pun boleh dirugikan atas dasar negara kelahiran, latar belakang budaya, bahasa, gender, atau keyakinan agama mereka. Untuk menjaga masyarakat yang stabil, damai dan sejahtera, warga Australia dari semua latar belakang diharapkan menjunjung tinggi prinsip dan nilai bersama yang menopang masyarakat Australia (Ang et al., 2006).

Perilaku masyarakat di Australia diatur oleh kombinasi hukum formal dan kebiasaan sosial informal. Semua orang di Australia harus mematuhi hukum negara atau menghadapi kemungkinan tuntutan pidana dan perdata. Setiap orang pada umumnya juga diharapkan untuk mematuhi adat istiadat, kebiasaan, dan praktik sosial Australia meskipun biasanya tidak

mengikat secara hukum. Hukum Australia dibuat oleh parlemen Persemakmuran (*Australian Commonwealth parliament*), negara bagian (*state parliament*) dan wilayah Australia (*territory parliament*). Polisi memiliki tugas untuk menjaga perdamaian dan ketertiban dalam masyarakat dan membawa orang-orang yang mereka yakin telah melanggar hukum ke pengadilan. Orang-orang di komunitas lokal dan lingkungan sekitar mereka juga saling membantu jika terjadi masalah dan melaporkan sesuatu yang tidak biasa atau mencurigakan ke kantor polisi setempat (Colebatch, 2020).

Setiap orang berhak untuk mengalami hubungan yang positif dan aman dengan keluarga, teman, dan orang yang mereka cintai. Kekerasan terhadap orang lain ilegal di Australia dan merupakan kejahatan yang sangat serius. Ini termasuk kekerasan di dalam rumah dan dalam pernikahan, yang dikenal sebagai kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan keluarga. Kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan keluarga termasuk perilaku atau ancaman yang bertujuan untuk mengontrol seorang pasangan dengan menyebabkan rasa takut atau mengancam keselamatan mereka. Kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan keluarga dapat mencakup pemukulan, mengisolasi anggota keluarga dari teman dan keluarga, atau mengancam anak-anak atau binatang peliharaan. Kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan keluarga tidak diterima dan melanggar hukum (Holland, 2010).

Selain itu, undang-undang Persemakmuran melarang diskriminasi berdasarkan gender, orientasi seksual, usia dan disabilitas di berbagai bidang kehidupan publik menurut Undang-Undang Diskriminasi Jenis Kelamin tahun 1984 (*Sex Discrimination Act 1984*), Undang-Undang Diskriminasi Usia tahun 2004 (*Age Discrimination Act 2004*), dan Undang-Undang Diskriminasi Disabilitas tahun 1992 (*Disability Discrimination Act 1992*). Komisi Hak Asasi Manusia Australia (*Australian Human Rights Commission*) bertanggung jawab untuk menangani keluhan berdasarkan undang-undang ini (Turner, 2020).

Hidup berdampingan secara harmonis dalam masyarakat majemuk dan multikultural Australia dibangun atas prinsip-prinsip inklusivitas, rasa hormat, dan toleransi. Elemen-elemen kuncinya meliputi merangkul keberagaman, saling menghormati, integrasi sosial, *Rule of Law* dan hak yang sama, serta nilai-nilai bersama (Braithwaite, 1995).

Penduduk Australia terdiri dari orang-orang dari berbagai latar belakang etnis, budaya, dan agama. Keberagaman budaya ini ditangani di berbagai tingkatan dan dengan cara yang lebih terintegrasi. Multikulturalisme dirayakan dengan festival budaya, tradisi, dan bahasa yang diakui dan dihormati dalam kehidupan publik. Warga Australia menghargai pentingnya menghormati perbedaan satu sama lain, memastikan bahwa orang-orang dari semua latar belakang merasa diterima dan diikutsertakan. Rasa hormat ini tercermin dalam undang-undang

antidiskriminasi dan kebijakan sosial yang mempromosikan kesetaraan (Syed & Kramar, 2009).

Kebijakan pemerintah dan program masyarakat bertujuan untuk membantu imigran dan kelompok minoritas berintegrasi ke dalam masyarakat sambil mempertahankan identitas budaya mereka. Akses ke layanan, pendidikan, dan kesempatan kerja memainkan peran kunci dalam membina kohesi sosial. Kerangka hukum yang kuat menegakkan hak yang sama bagi semua orang, memastikan perlindungan terhadap diskriminasi berdasarkan ras, etnis, agama, atau latar belakang. Hal ini menciptakan rasa keadilan dan kesetaraan dalam masyarakat. Meskipun ada perbedaan, warga Australia memiliki nilai-nilai yang sama seperti kebebasan, demokrasi, dan cara yang adil (*a fair go*), yang membantu menjembatani kesenjangan budaya dan menumbuhkan rasa memiliki. Koeksistensi ini memungkinkan Australia untuk mempertahankan masyarakat yang damai, toleran, dan kohesif di mana keberagaman dipandang sebagai kekuatan.

BAB V REKONSEPTUALISASI MODERASI BERAGAMA PADA MASYARAKAT DIASPORA DI SYDNEY

A. Adaptif, Kompromi, dan Membangun Karakter Moderat Indonesia

Diaspora Indonesia di Sydney, Australia, mewakili segmen yang dinamis dan penuh warna dalam lanskap multikultural kota tersebut. Mereka membentuk berbagai macam komunitas, baik keagamaan maupun sosial. Komunitas-komunitas ini mencerminkan perpaduan antara warisan Indonesia dan norma budaya Australia, menghadapi kompleksitas adaptasi ke negara baru sambil mempertahankan akar budaya mereka. Komunitas keagamaan sebagian besar terdiri dari kelompok pengajian yang dibentuk berdasarkan etnisitas, asal daerah, atau afiliasi dengan organisasi Islam Indonesia seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (Wijarwadi, 2024). Komunitas-komunitas ini cenderung memusatkan aktivitas pada kebutuhan sosial dan agama daripada politik, meskipun ada sebagian kecil yang terhubung dengan gerakan transnasional seperti Hizbut Tahrir. Komunitas Muslim Indonesia di Sydney menghadapi berbagai tantangan terkait identitas, integrasi sosial, dan segmentasi internal (Rohman, 2024).

Tantangan utama yang dihadapi antara lain adalah persoalan identitas yang ambigu. Banyak anggota komunitas lebih mengidentifikasi diri sebagai “Muslim Indonesia di Australia” daripada “Muslim Australia” (Muttaqin et al., 2016). Selain itu, mereka juga menghadapi tantangan berupa integrasi dan adaptasi sosial. Hidup di Sydney, kota yang terkenal karena keberagamannya, membutuhkan kemampuan beradaptasi. Anggota diaspora Indonesia belajar menyesuaikan diri dengan norma-norma masyarakat Australia, seperti penekanan pada individualisme, kesetaraan gender, dan pemerintahan sekuler, sambil mempertahankan identitas budaya mereka. Bagi banyak orang Indonesia, ini melibatkan penguasaan bahasa Inggris, memahami budaya kerja Australia, dan berinteraksi dengan masyarakat luas melalui pendidikan dan kegiatan sosial. Mahasiswa Indonesia, misalnya, sering bertindak sebagai duta budaya, memadukan nilai-nilai Indonesia dan Australia dalam kegiatan akademik dan sosial mereka. Praktik keagamaan juga mencerminkan kemampuan beradaptasi ini; masjid dan pusat komunitas di Sydney menyediakan ruang bagi orang Indonesia untuk menjalankan agama mereka, sering kali dengan cara yang mengakomodasi kerangka pluralistik dan sekuler Australia (Muhidin, 2024).

Terkait persoalan identitas, umat Muslim di Australia menghadapi pertanyaan penting, yaitu: apakah mereka akan menempatkan kewarganegaraan dan status sebagai warga Australia di atas agama atau identitas mereka sebagai Muslim. Meskipun sebagian besar Muslim sepakat

bahwa menjadi Muslim yang taat tidak bertentangan dengan menjadi warga Australia yang baik, kecurigaan terhadap komunitas Muslim masih sering terjadi di seluruh negeri. Ustadh Izza Rohman, seorang Muslim Indonesia yang juga merupakan Wakil Ketua PCI Muhammadiyah Australia, sekaligus pengajar studi Islam di beberapa komunitas Indonesia di Sydney, menyarankan agar umat Muslim lebih aktif dalam layanan publik dan acara komunitas untuk mengatasi prasangka ini. Ia juga mengusulkan agar masjid lebih terbuka dengan mengundang masyarakat umum untuk menghadiri kegiatan yang mereka selenggarakan. Beberapa masjid bahkan telah memulai inisiatif ini, membuka diri bagi siapa saja yang ingin mengenal Islam dan komunitas Muslim lebih dekat (Rohman, 2024).

Di Sydney sendiri, Muslim adalah kelompok yang sangat beragam dalam budaya dan bahasa. Menurut Hasran Addahroni, koordinator Masjid Iqro di Sydney, keragaman Muslim di wilayah ini termasuk yang paling heterogen di Australia, mencakup perbedaan etnis, bahasa, dan afiliasi agama. Keragaman ini dapat menjadi potensi besar untuk membangun komunitas Muslim yang beragam, meskipun dalam beberapa kasus dapat memicu konflik internal (Addahroni, 2024). Perbedaan ini tercermin dalam pendirian berbagai tempat ibadah, seperti masjid yang mengadopsi identitas etnis atau afiliasi agama tertentu. Misalnya, ketika afiliasi agama menjadi faktor dominan, akan ada masjid Sunni atau Syiah. Sebaliknya, jika faktor etnis lebih berpengaruh, akan muncul masjid seperti Masjid Turki, Masjid Lebanon, Masjid Bosnia, atau Masjid Indonesia. Dengan demikian, kebutuhan untuk membangun masjid di Sydney sangat tinggi karena keberagaman kebutuhan komunitas Muslim (Muhidin, 2024).

Identitas manusia dapat dipahami dalam kaitannya dengan perubahan tempat, yaitu mobilitas atau migrasi manusia. Karena identitas dibangun dalam interaksi dan pengalaman sehari-hari, mobilitas manusia akan mengenalkan individu pada pengalaman baru dengan hubungan interpersonal, yang mengarah pada perubahan dalam pemahaman identitas mereka sendiri. Menurut hubungan antara identitas, tempat, dan mobilitas ini, diaspora menawarkan lingkungan substansial yang melaluinya identitas migran dapat diteliti. Diaspora berkaitan dengan kondisi di sini dan di sana (Albrecht, 2018). Istilah “di sini” adalah tempat fisik bagi para migran tinggal dan istilah “di sana” adalah tempat di mana rasa memiliki dan keterikatan ditemukan, yaitu di tanah air (Albrecht, 2018). Cendekiawan Muslim mengidentifikasi gagasan diaspora dalam kaitannya dengan teritorialitas Muslim; tanah air Muslim dan non-Muslim lainnya. Menurut para cendekiawan ini, diaspora adalah wilayah migrasi atau pengasingan, tempat Muslim hidup dalam keadaan terasing, karena mayoritas masyarakat adalah non-Muslim (Elmoudden, 2013).

Dengan latar belakang ini, Muslim yang tinggal di wilayah diaspora dianggap sebagai milik tempat asal yang dibayangkan, yang dipegang oleh tempat rujukan teritorial. Tempat rujukan ini mencakup semua wilayah tanah air Muslim, tempat mereka menjadi bagian dari komunitas atau Ummah Muslim global, yang disatukan oleh iman dan batas geografis yang sama. Identitas Muslim, khususnya di diaspora, menurut beberapa cendekiawan Muslim, didorong untuk tetap statis, guna melindungi diri dari pembubaran masyarakat sekuler di Barat (Elmoudden, 2013). Dengan mengacu pada teori identitas modern, serta pendapat cendekiawan Muslim tentang dinamisme identitas agama di masyarakat diaspora, warga diaspora Indonesia di Sydney mempertahankan hakikat identitas Muslim dengan mempertahankan nilai-nilai dari tanah air meskipun dipengaruhi oleh pengalaman baru dalam proses mobilitas tinggal di negeri sekuler Australia.

Umat Muslim Indonesia di Sydney mengatasi persoalan identitas agama dan budaya dengan berbagai pendekatan yang mencerminkan kemampuan adaptasi mereka di tengah masyarakat Australia yang sekuler dan multikultural. Pendekatan dimaksud antara lain melalui kombinasi menjaga tradisi, beradaptasi dengan lingkungan baru, dan mempromosikan nilai-nilai moderasi. Pendekatan ini memungkinkan mereka tidak hanya mempertahankan identitas mereka, tetapi juga berkontribusi dalam memperkaya keragaman budaya di Australia.

Salah satu pendekatan yang banyak dilakukan komunitas Muslim Indonesia di Sydney adalah membentuk kelompok pengajian, organisasi keagamaan, dan asosiasi masyarakat sebagai ruang untuk memperkuat identitas agama mereka. Pertemuan rutin seperti ceramah agama, diskusi Islam, dan perayaan hari besar agama membantu mereka mempertahankan nilai-nilai Islam di lingkungan baru. Tempat ibadah seperti masjid atau mushola juga berfungsi sebagai pusat spiritual sekaligus tempat untuk mempererat hubungan sosial (Muhidin, 2024).

Meskipun berpegang teguh pada nilai-nilai agama, umat Muslim Indonesia berusaha menyesuaikan diri dengan budaya Australia. Mereka mempelajari bahasa Inggris, memahami norma-norma sosial lokal, dan aktif berpartisipasi dalam kegiatan multikultural. Misalnya, mereka sering berkontribusi dalam acara komunitas seperti bazar makanan halal atau festival budaya, yang memperkenalkan tradisi Islam Indonesia kepada masyarakat Australia. Selain itu, komunitas Muslim Indonesia di Sydney umumnya dikenal sebagai kelompok yang moderat. Mereka menekankan prinsip *rahmatan lil alamin* (Islam sebagai rahmat bagi semesta alam) yang sejalan dengan nilai-nilai demokrasi dan toleransi di Australia. Pendekatan moderat ini membantu mereka membangun hubungan yang harmonis dengan masyarakat non-Muslim, sekaligus mengurangi stereotip negatif tentang Islam (Addahroni, 2024).

Untuk mengatasi tantangan identitas generasi muda, komunitas Muslim Indonesia menyediakan pendidikan agama dan budaya melalui kelas bahasa Indonesia, pengajian anak, dan aktivitas yang memperkenalkan sejarah serta tradisi Indonesia. Generasi muda didorong untuk merangkul identitas mereka sebagai Muslim sekaligus warga Australia yang aktif. Sebagai bagian dari upaya membangun toleransi, umat Muslim Indonesia di Sydney sering berpartisipasi dalam dialog antaragama dan forum multikultural. Keterlibatan ini memperkuat hubungan mereka dengan komunitas agama lain dan mempromosikan nilai-nilai harmoni serta pengertian lintas budaya. Beberapa masjid dan organisasi Muslim Indonesia di Sydney telah membuka pintu mereka untuk masyarakat umum. Kegiatan seperti mengunjungi masjid, pameran Islam, dan acara interaktif lainnya bertujuan untuk menghilangkan prasangka dan membangun hubungan yang positif dengan masyarakat lokal (Muhidin, 2024).

Komunitas diaspora Indonesia di Sydney menghadapi realitas tantangan masyarakat sekuler Australia melalui kompromi, adaptasi, dan keterlibatan aktif. Upaya mereka berfokus pada menyelaraskan nilai-nilai agama dengan prinsip inklusivitas, toleransi, dan penghormatan terhadap keberagaman yang menjadi ciri khas lanskap multikultural Australia. Anggota diaspora Indonesia di Sydney berupaya menyesuaikan praktik keagamaan mereka agar sesuai dengan kerangka sekuler Australia sambil tetap menjaga komitmen spiritual mereka. Ini mencakup pelaksanaan ibadah keagamaan Islam secara pribadi atau di ruang komunitas seperti masjid, yang juga berfungsi sebagai pusat kajian Islam dan dialog lintas komunitas. Dengan menghormati hukum sekuler Australia, seperti kesetaraan perlakuan dan non-diskriminasi, mereka menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam dapat hidup berdampingan dengan prinsip-prinsip pemerintahan sekuler (Muhidin, 2024).

Selain itu, para koordinator komunitas pengajian warga diaspora Indonesia di Sydney menekankan interpretasi Islam yang moderat, saling menghargai perbedaan, dan mengambil pandangan inklusif dari ajaran Islam yang sejalan dengan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia di Australia. Pendekatan ini membantu mengurangi stereotip dan mempresentasikan Islam sebagai agama damai dan toleran. Program dan ceramah sering menekankan pentingnya hidup harmonis dalam masyarakat yang beragam. Melalui upaya ini, mereka tidak hanya mempertahankan identitas keagamaan mereka tetapi juga berkontribusi secara positif terhadap tatanan sosial Sydney, memberikan contoh bagaimana agama dapat hidup harmonis dengan sekularisme (Rohman, 2024).

Komunitas Muslim diaspora Indonesia di Sydney juga secara aktif terlibat dalam dialog lintas agama, festival budaya, dan forum publik. Keterlibatan ini mempromosikan saling pengertian, menghilangkan kesalahpahaman tentang Islam, dan menyoroti nilai-nilai bersama

seperti kasih sayang dan keadilan. Dengan berkolaborasi dengan kelompok agama lain dan kelompok-kelompok sekuler lainnya, mereka berkontribusi pada masyarakat yang kohesif dan inklusif.

Program pendidikan yang ditujukan bagi umat Muslim maupun masyarakat umum berperan penting dalam mendorong moderasi. Izza Rohman, ketua PCI Muhammadiyah Australia di Sydney menyatakan bahwa di dalam komunitas, pendidikan agama dan kelompok pengajian menekankan pemikiran terbuka, kritis, menunjang nilai-nilai etika, dan penghormatan terhadap budaya lain. Upaya penyuluhan publik, seperti hari terbuka masjid atau pameran budaya Islam, memberi informasi kepada masyarakat Australia tentang Islam dan kontribusi komunitas Muslim di Australia (Rohman, 2024).

Anggota diaspora Muslim menemukan kesamaan dengan masyarakat Australia melalui penekanan pada prinsip etika bersama, seperti kejujuran, kemurahan hati, dan penghormatan terhadap orang lain. Fondasi bersama ini memfasilitasi hubungan yang lebih baik dan menunjukkan bahwa nilai-nilai agama dapat melengkapi etos sosial yang lebih luas. Menyadari karakter multikultural dan sekuler Australia, diaspora Indonesia membuat kompromi dalam praktik budaya non-esensial bila diperlukan. Misalnya, penyesuaian pola makan yang halal atau berpakaian secara sederhana tanpa secara ketat mengikuti busana tradisional dari tanah air atau pakaian Islami, yang memungkinkan mereka mempertahankan identitas sambil menyatu dengan masyarakat. Selain itu, masjid dan pusat komunitas Muslim di Sydney juga menjadi lebih terbuka untuk masyarakat umum, dengan menyelenggarakan acara yang mengundang non-Muslim untuk mempelajari Islam dalam suasana yang ramah. Ruang-ruang ini mendorong dialog dan menunjukkan kesiapan komunitas untuk berinteraksi dengan berbagai perspektif (Muhidin, 2024).

Kompromi terhadap nilai-nilai budaya Australia, atau sering disebut *Australian values*, merupakan bagian integral dari kehidupan diaspora Indonesia di Sydney. Keluarga-keluarga menghadapi perbedaan dalam praktik budaya, seperti menyeimbangkan adat istiadat tradisional Indonesia dengan norma-norma Australia yang cenderung informal dan terbuka. Penyesuaian dalam pola makan, seperti mencari makanan halal atau mengganti bahan-bahan masakan Indonesia dengan yang tersedia secara lokal, menunjukkan kompromi sehari-hari. Perayaan hari-hari nasional Indonesia, seperti Hari Kemerdekaan, sering kali disesuaikan dengan konteks multikultural, menggabungkan upacara tradisional dengan elemen-elemen yang sesuai dengan audiens Australia. Sakut Muhidin dari organisasi Indonesian Diaspora Network di Sydney menyatakan bahwa kompromi-kompromi ini membantu diaspora

mempertahankan identitas mereka sambil berintegrasi ke dalam masyarakat tuan rumah, yaitu masyarakat Australia (Muhidin, 2024).

Toleransi adalah landasan keberadaan diaspora Indonesia di Sydney. Orang-orang Indonesia secara aktif berpartisipasi dalam dialog lintas agama, festival multikultural, dan acara komunitas untuk mendorong saling pengertian dan rasa hormat. Organisasi Islam dalam diaspora Indonesia sering bekerja sama dengan kelompok agama lain untuk mengadakan kegiatan amal dan program pertukaran budaya, menunjukkan komitmen terhadap harmoni dan inklusivitas. Keterbukaan ini penting tidak hanya untuk keberlangsungan hidup bersama di Sydney tetapi juga untuk melawan stereotip dan mempromosikan citra moderat budaya dan agama Indonesia (Muhidin, 2024).

Diaspora Indonesia di Sydney secara sadar berupaya membangun karakter moderat Indonesia yang menjembatani nilai-nilai tanah air mereka dengan nilai-nilai negara adopsi mereka. Inisiatif pendidikan memainkan peran penting dalam upaya ini. Kelas bahasa dan budaya Indonesia untuk anak-anak yang lahir di Australia membantu melestarikan warisan mereka, sementara diskusi tentang isu-isu global dalam kelompok komunitas mendorong pemikiran kritis dan moderasi. *Platform* media sosial juga dimanfaatkan untuk berbagi cerita tentang integrasi yang sukses dan merayakan kontribusi orang Indonesia terhadap masyarakat Australia.

Tingginya jumlah Muslim Indonesia di Australia telah menciptakan peluang besar bagi umat Islam untuk menampilkan sisi lembut dan bahkan menghilangkan opini keras dan negatif terhadap Islam dan komunitas Muslim. Bagi sebagian orang kulit putih Australia, terutama mereka yang tinggal di lingkungan multikultural seperti Sydney, keberadaan Muslim dan diaspora Indonesia sering kali dianggap sebagai kontribusi positif bagi keragaman budaya kota. Mereka menghargai kontribusi komunitas Muslim dan diaspora Indonesia dalam bidang kuliner, seni, pendidikan, dan kegiatan sosial. Banyak yang melihat umat Muslim Indonesia sebagai komunitas yang moderat, ramah, dan mudah beradaptasi. Kegiatan komunitas seperti acara kebudayaan, bazar makanan, atau festival multikultural seperti kegiatan Clean Up Australia Day sering kali memperkuat persepsi ini (Wijarwadi, 2024). Dengan demikian, peran asosiasi komunitas Indonesia sangat penting dalam mempromosikan Islam kepada masyarakat yang lebih luas. Pertemuan rutin, seperti ceramah agama, pertemuan sosial, perayaan keagamaan, dan pameran buku Islam, terbuka untuk semua orang, tidak hanya terbatas pada umat Muslim.

Agama merupakan sumber identitas pribadi dan bahkan identitas sosial yang paling menonjol bagi masyarakat Muslim di banyak negara. Agama merupakan aspek signifikan dari

identitas seseorang, tetapi agama seringkali dicirikan oleh beberapa ahli sebagai sesuatu yang statis karena diasosiasikan dengan keyakinan yang tetap atau tradisional (Peek, 2005). Namun demikian, berdasarkan pemaparan di atas, warga Muslim diaspora Indonesia di Sydney justru menunjukkan bahwa beragama dapat dilakukan dengan lebih dinamis. Hal ini terlihat dalam kehidupan keagamaan dan budaya Muslim diaspora Indonesia di tengah-tengah masyarakat Sydney yang multikultural. Mereka secara otomatis membawa perilaku keagamaannya ke dalam semua aktifitas kehidupan.

B. Adaptif dan Membangun Karakter ‘Islam’ yang Kokoh

Agama menawarkan konteks spiritual di mana seseorang dapat mengeksplorasi isu-isu yang berkaitan dengan pengembangan identitas. Kepercayaan, pandangan dunia, dan nilai-nilai dari tradisi keagamaan memberikan kerangka ideologis di mana seseorang dapat membangun makna, keteraturan, dan tempatnya di dunia yang penting bagi pembentukan identitas. Spiritualitas membawa kesadaran akan diri sendiri dalam hubungannya dengan orang lain. Agama menawarkan keyakinan dan nilai-nilai moral yang dapat digunakan seseorang untuk membangun sistem kepercayaannya sendiri. Agama dapat memberikan rasa keterhubungan yang mendalam yang memiliki dampak besar terhadap konsep diri (King, 2019).

Bagian ini menjelaskan bagaimana diaspora Muslim Indonesia di Sydney memahami persatuan dalam keberagaman terkait hubungan mereka dengan sesama diaspora seiman yang memiliki latar belakang keagamaan yang berbeda. Faktor gabungan dari beragam perjalanan etno-religius, dampak sekularisasi Pemerintah Australia terhadap individualisasi agama, ditambah dengan kondisi sosial-keagamaan yang beragam, telah melahirkan kebersamaan dalam menjalankan aktivitas keagamaan di kalangan diaspora Muslim Indonesia. Saya berargumen bahwa konsep ideal tentang persatuan dan keberagaman Muslim yang berakar pada *ummah* dipahami dengan baik sebagai bagian dari masyarakat Muslim di negeri sekuler yang multikultural (Taher, 2014).

Konsep *ummah* mencerminkan universalisme Islam yang menyediakan kerangka untuk persatuan para pemeluknya (Muslim) yang mengakomodasi keragaman budaya. Konsep ini merupakan bagian penting dari wacana Islam, baik dalam konteks historis maupun kontemporer. Konsep *ummah* dalam wacana Islam mengalami perkembangan seiring dengan penggunaannya sesuai dengan kondisi sosial, politik, dan ekonomi dunia Muslim saat ini. Para pemeluk Islam memiliki kesadaran *ummah* dalam hubungannya dengan modernitas di negara-negara Muslim seluruh dunia (Hassan, 2006). Dampak globalisasi terhadap *ummah* Islam membentuk perjuangan antara ‘hibriditas’ dan ‘otentisitas’ di kalangan Muslim dan gerakan

Islam. Namun demikian, Hassan (2006) berargumen bahwa masa depan ummah Islam mungkin akan menjadi lebih kuat bukan sebagai komunitas yang terpadu dan satu kesatuan, tetapi sebagai komunitas yang terpisah-pisah, yang terdiri dari ummah yang mewakili berbagai wilayah Islam. Setiap ummah regional akan memiliki dan mewujudkan karakter unik yang dibentuk oleh sejarah dan karakteristik masyarakatnya.

Dengan kerangka lintasan etno-religius mereka, diaspora Muslim Indonesia di Sydney cenderung kurang tertarik untuk bergabung dengan asosiasi Muslim lintas etnis atau berpartisipasi dalam gerakan Islam-politik yang diprakarsai oleh rekan seiman dari Timur Tengah. Interaksi sosial mereka dengan sesama Muslim di luar kelompok Indonesia memang terbatas, namun rasa persatuan Muslim tidaklah terbatas. Merujuk pada analisis sosiologis Hassan (2006) tentang *ummah*, diaspora Muslim Indonesia memahami konsep persatuan Muslim dalam arti sempit, serupa dengan gagasan Tönnies (2001) tentang “komunitas” yang diwujudkan melalui pola homogenitas agama, keseragaman budaya, dan kontak langsung secara tatap muka.

Ferdinand Tönnies (2001), dalam bukunya *Community and Civil Society*, mengonseptualisasikan istilah ‘komunitas’ (*gemeinschaft*) sebagai bentuk organisasi sosial yang ditandai dengan hubungan yang erat, personal, dan langgeng. Menurut Tönnies, komunitas didasarkan pada kehendak alami (*natural will*), tradisi bersama, dan ikatan timbal balik, yang sering kali berakar pada hubungan keluarga, budaya, atau lokalitas. Hubungan dalam komunitas dipandang sebagai organik, muncul secara alami dari kekerabatan, lingkungan, atau nilai-nilai bersama. Hubungan ini bersifat intrinsik, didasarkan pada ikatan emosional dan rasa memiliki.

Dalam komunitas, interaksi bersifat personal dan intim. Anggota komunitas saling mengenal dengan baik, dan hubungan tidak dimediasi oleh struktur formal atau kontrak. Tönnies menekankan rasa persatuan dan solidaritas dalam komunitas. Anggota komunitas sangat mengidentifikasi diri mereka dengan kolektif dan memprioritaskan kepentingan kelompok dibandingkan tujuan individu. Komunitas sering kali terikat pada tradisi dan relatif statis, melestarikan norma-norma sejarah dan budaya. Biasanya, komunitas diasosiasikan dengan lingkungan pedesaan atau kota kecil, di mana perubahan berlangsung secara bertahap (Obadare, 2002).

Tönnies (2001) membedakan komunitas (*gemeinschaft*) dengan masyarakat sipil (*gesellschaft*), yang merepresentasikan bentuk organisasi sosial modern, industrial, dan urban. Masyarakat sipil ditandai oleh hubungan yang impersonal, kontraktual, dan berorientasi pada tujuan, yang digerakkan oleh kehendak individu (*Kürwille*). Hubungan ini bersifat fungsional

dan sering kali sementara, mencerminkan struktur ekonomi dan birokrasi kehidupan modern. Bagi Tönnies, komunitas adalah struktur sosial yang mewujudkan kohesi, kedalaman emosional, dan tujuan bersama, yang berbeda dari hubungan rasional, terukur, dan terfragmentasi dalam masyarakat sipil. Dikotomi ini tetap berpengaruh dalam diskusi sosiologis tentang sifat ikatan sosial dan transformasi masyarakat di era modern.

Dispora Indonesia di Sydney telah membuka cakrawala baru dalam pemahaman mereka tentang sifat komunitas agama mereka. Melalui pertemuan dengan sesama Muslim dari latar belakang etnis, ras, dan sekte yang berbeda, mereka mengalami reformasi sosial-psikologis dalam cara mereka memahami “Muslim lain”. Mereka memperluas batas-batas *ummah* yang sebelumnya dikonstruksi secara etnis dan nasional (Hassan, 2006). Dengan kata lain, rasa imajiner tentang komunitas Muslim, yang disosialisasikan dan diinternalisasi selama masa kecil mereka di tanah air, telah diwujudkan tetapi juga mengalami transformasi secara sosial-budaya melalui interaksi sosial secara langsung, hidup berdampingan dengan sesama diaspora seiman, dan secara sadar atau tidak, berbagi status serupa sebagai anggota komunitas agama minoritas Muslim di Sydney (Rohman, 2024).

Pertemuan sehari-hari dianggap sebagai tahap awal di mana komunitas diaspora Muslim Indonesia di Sydney bertemu dan membangun kontak baru, serta merasakan persaudaraan Muslim dalam praktik. Hal ini paling terlihat ketika umat Muslim saling mengenali dan memperlakukan satu sama lain sebagai saudara selama pertemuan sehari-hari. Pengakuan atas kekerabatan Muslim adalah aspek fundamental dari persatuan dalam diaspora Muslim (Muhidin, 2024).

Bagi perempuan Indonesia, pertemuan publik mereka dimediasi dan ditandai oleh hijab, yang kini dipandang sebagai kode pakaian perempuan yang distandardisasi secara religius. Karena banyak perempuan Muslim tidak mengenakan hijab setiap hari, tidak mengherankan jika pengalaman mereka beragam. Namun bagi laki-laki, proses mengenali sesama Muslim membutuhkan waktu lebih lama. Mereka harus saling mengenal melalui percakapan atau bertemu di tempat yang dianggap religius, seperti masjid. Bagi kaum diaspora Muslim Indonesia di Sydney, pengakuan sehari-hari atas kekerabatan dengan sesama Muslim, tanpa memandang latar belakang etnis atau ras (Wijarwadi, 2024). Hal ini sesuai dengan keyakinan banyak Muslim tentang sifat universalitas Islam sebagaimana yang dinyatakan oleh Rudolf Otto (Ayoub, 1998).

Rudolf Otto (1869–1937), seorang teolog German dan sarjana terkemuka yang menekuni kajian perbandingan agama, dikenal atas eksplorasinya tentang pengalaman religius yang bersifat spiritual (*numinous*) dan sakral (Oldmeadow, 2010). Gagasan Otto tentang

universalitas Islam sejalan dengan kerangka pemahamannya yang lebih luas mengenai agama sebagai fenomena universal yang ditandai oleh sifat numinous, yang membangkitkan rasa kagum dan ketertarikan. Ia memandang Islam sebagai ekspresi unik dari pengalaman universal manusia terhadap yang sakral, dengan penekanan pada penyerahan diri, pengabdian, dan pengakuan atas keagungan Ilahi (*divine majesty*). Interpretasi Rudolf Otto tentang universalitas Islam berpusat pada penekanan teologisnya terhadap kesatuan Ilahi (*divine unity* atau tauhid), kemampuannya untuk membangkitkan pengalaman religius yang mendalam, dan kapasitasnya untuk melampaui batas-batas budaya dan nasional, sehingga menumbuhkan rasa universal akan kebersamaan spiritual dan komunal (Oldmeadow, 2010).

Meskipun Otto tidak menulis karya khusus tentang Islam, diskusinya mengenai universalitas pengalaman religius sering kali mencakup contoh-contoh dari Islam. Ia mengagumi kesederhanaan etika dan teologi Islam, yang dianggapnya sebagai bagian integral dari daya tarik global Islam dan kemampuannya untuk melampaui batas-batas budaya dan ras melalui konsep *ummah*. Meskipun referensi Rudolf Otto tentang Islam tersebar di berbagai karyanya dan tidak terkonsentrasi dalam satu studi tertentu, keterlibatannya dengan konsep-konsep Islam menunjukkan apresiasinya terhadap kedalaman spiritual dan universalitas Islam. Ia memandang penekanan teologis Islam pada kesatuan ilahi dan tradisi mistiknya sebagai kontribusi penting bagi pemahaman global tentang yang sakral (Farid, 2024).

Sebagai bentuk imajiner dari kekerabatan Muslim, pengakuan kekerabatan mencakup makna simbolis dan makna nyata. Secara simbolis, pengakuan menunjukkan kedekatan dalam hubungan, keramahan, dan sambutan hangat yang diperlihatkan kepada dan oleh sesama Muslim. Hal ini dapat dilihat dalam penjelasan Gabriele Marranci (2008) bahwa *ummah* berarti “komunitas rasa”, di mana umat Muslim berbagi rasa memiliki dan merasakan ikatan kekerabatan dalam pertemuan sehari-hari.

Pengalaman lain yang melibatkan kegiatan di masjid dan organisasi sosial-keagamaan untuk melaksanakan ibadah dan doa, atau aktivitas sosial-keagamaan lainnya, memiliki dua makna berbeda: (i) sebagai *platform* untuk memperkuat rasa persatuan umat Muslim, dan (ii) sebagai ajang uji dalam memahami keragaman internal Muslim baik dari segi tradisi keagamaan yang berbeda maupun fragmentasi sectarian (Wardana, 2015). Kegiatan berjamaah di masjid (misalnya salat Jumat) atau perayaan bersama hari besar Islam (seperti Idul Fitri) memberikan kesempatan bagi para diaspora Muslim untuk berbagi rasa sebagai bagian dari komunitas Muslim di negeri asing yang sekuler, sekaligus membentuk kesadaran akan keragaman internal dan fragmentasi di kalangan umat Muslim (Addahroni, 2024).

Komunitas diaspora Indonesia di Sydney mencerminkan kekuatan kemampuan beradaptasi, kompromi, dan toleransi dalam menjalani kehidupan di masyarakat multikultural. Melalui upaya untuk menyeimbangkan identitas Indonesia dengan nilai-nilai Australia, mereka berkontribusi pada kekayaan budaya Sydney sekaligus mempromosikan citra moderat dan inklusif Indonesia. Perjalanan mereka menyoroti pentingnya merangkul keberagaman dan mendorong saling menghormati dalam dunia yang semakin terhubung. Meskipun secara konsisten melaksanakan upaya ini, tantangan bagi komunitas diaspora Indonesia tetap ada. Kasus kesalahpahaman budaya, diskriminasi, dan tekanan untuk berasimilasi dapat menciptakan hambatan bagi diaspora Indonesia. Namun, ketangguhan adalah ciri khas komunitas ini. Jaringan dukungan, seperti asosiasi komunitas Indonesia dan program-program yang dipimpin oleh konsulat, menyediakan bantuan dan mendorong solidaritas. Dengan memanfaatkan kekuatan budaya mereka dan nilai-nilai toleransi serta kemampuan beradaptasi, diaspora Indonesia terus berkembang di Sydney (Muhidin, 2024).

Komunitas diaspora Muslim di Australia menghadapi tantangan unik dalam mempertahankan identitas keagamaan mereka di tengah budaya yang berbeda dari nilai-nilai Islam. Namun, tantangan ini juga membuka peluang bagi mereka untuk membangun karakter Islam yang kokoh melalui strategi adaptasi, penguatan komunitas, dan keterlibatan aktif dalam masyarakat. Upaya menyeimbangkan ajaran agama dengan realitas sosial di negara tuan rumah, komunitas Muslim diaspora mampu mempertahankan nilai-nilai Islam sambil memberikan kontribusi positif kepada masyarakat luas.

Karakter Islam yang kokoh dimulai dengan menjaga praktik dan nilai-nilai dasar agama. Diaspora Muslim secara konsisten melaksanakan ibadah seperti salat, puasa Ramadan, dan menjaga makanan halal. Masjid dan pusat komunitas menjadi tempat penting bagi mereka untuk berkumpul, beribadah, dan memperkuat hubungan sosial. Selain itu, pendidikan agama melalui sekolah Islam, pengajian, atau kelas akhir pekan membantu generasi muda memahami ajaran Islam dan mengintegrasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu, keluarga juga memegang peran sentral dalam membentuk karakter Islam, terutama bagi anak-anak yang tumbuh di lingkungan multikultural. Orang tua diaspora Muslim berusaha menciptakan lingkungan rumah yang mencerminkan nilai-nilai Islam, seperti kesederhanaan, hormat kepada orang tua, dan tanggung jawab sosial. Tradisi Islam seperti berbuka puasa bersama atau merayakan Idul Fitri menjadi momen penting untuk menanamkan identitas keislaman yang kuat pada generasi muda.

Komunitas Muslim diaspora di Sydney aktif berpartisipasi dalam dialog antaragama dan acara multikultural untuk mempromosikan nilai-nilai Islam yang inklusif dan damai.

Keterlibatan ini tidak hanya membantu membangun hubungan yang harmonis dengan masyarakat non-Muslim, tetapi juga membantu memperbaiki persepsi negatif tentang Islam. Acara seperti hari terbuka masjid dan festival budaya sering kali digunakan untuk menunjukkan wajah Islam yang moderat dan ramah.

Solidaritas di antara anggota komunitas diaspora Indonesia memainkan peran penting dalam membangun karakter Islam yang kokoh. Kegiatan sosial seperti penggalangan dana untuk amal, pengajian rutin, dan perayaan hari besar secara bersama memperkuat hubungan di antara anggota komunitas. Solidaritas ini juga terlihat dalam dukungan terhadap anggota komunitas yang menghadapi diskriminasi atau kesulitan dalam beradaptasi dengan lingkungan baru.

Pendidikan menjadi salah satu prioritas utama bagi komunitas diaspora Muslim di Sydney untuk membangun karakter Islam yang kokoh. Generasi muda didorong untuk mengejar pendidikan tinggi dan mengintegrasikan nilai-nilai Islam seperti kejujuran, kerja keras, dan integritas dalam karier mereka. Dengan menjadi profesional yang sukses dan beretika, mereka dapat menjadi representasi positif bagi komunitas Muslim di negara tuan rumah Australia yang sekuler.

Komunitas diaspora Muslim di Australia, terutama Sydney, sering kali mengadopsi pendekatan moderat dalam beragama, yang sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Mereka menyesuaikan beberapa praktik budaya tanpa mengorbankan nilai-nilai inti Islam. Misalnya, penggunaan pakaian yang sopan tetapi tidak selalu tradisional atau penyesuaian dalam pola makan menjadi bagian dari adaptasi ini. Moderasi ini membantu mereka hidup harmonis dalam masyarakat multikultural.

Meskipun menghadapi tantangan seperti Islamofobia dan stereotip negatif, komunitas diaspora Muslim berusaha mengatasi hambatan ini dengan cara-cara yang konstruktif. Mereka membangun kesadaran masyarakat melalui kampanye informasi, keterlibatan dalam diskusi publik, dan advokasi untuk melindungi hak-hak mereka. Upaya ini memperkuat posisi mereka sebagai bagian dari masyarakat yang lebih luas sambil mempertahankan identitas Islam mereka.

Komunitas diaspora Muslim sering kali mengaitkan identitas mereka dengan konsep ummah, yaitu komunitas global umat Islam. Mereka merasa terhubung dengan Muslim di seluruh dunia melalui solidaritas atas isu-isu global, seperti bantuan kemanusiaan untuk negara-negara konflik atau mendukung perjuangan melawan ketidakadilan. Rasa persatuan ini memberikan landasan spiritual yang kuat untuk membangun karakter Islam yang kokoh.

Dengan demikian, komunitas diaspora Muslim di Australia berhasil membangun karakter Islam yang kokoh dengan memadukan nilai-nilai agama mereka dengan realitas sosial yang kompleks di lingkungan baru. Dengan menanamkan nilai-nilai Islam dalam keluarga, berpartisipasi dalam dialog multikultural, mempromosikan pendidikan, dan mengadopsi pendekatan moderat, mereka tidak hanya mempertahankan identitas Islam tetapi juga menjadi bagian integral dari masyarakat Barat. Perjuangan mereka mencerminkan kekuatan Islam sebagai agama yang fleksibel, inklusif, dan relevan dalam dunia modern. Komunitas ini memiliki peluang besar untuk mempromosikan Islam moderat dan nilai-nilai toleransi Indonesia melalui interaksi lintas budaya, bisnis makanan halal, dan aktivitas pendidikan. Keberadaan konsulat Indonesia di Sydney juga memainkan peran penting dalam mendukung promosi nilai-nilai moderasi ini. Komunitas Muslim Indonesia di Sydney dapat menjadi agen penting dalam memperkenalkan wajah Islam yang damai dan harmonis di tengah masyarakat multikultural Australia, asalkan mereka dapat meminimalkan perpecahan internal dan lebih aktif dalam menjangkau komunitas non-Indonesia.

C. Adaptif dan Melebur dalam Moderasi Barat

Keberagaman masyarakat Australia yang berasal dari berbagai latar belakang negara, budaya, dan agama menjadikan negara ini sebagai salah satu contoh nyata multikulturalisme yang sukses. Australia tidak hanya menjadi tujuan bagi imigran dari seluruh dunia, tetapi juga menjadi tempat di mana keragaman sosial, budaya, dan agama dihormati dan dirayakan. Keterbukaan tersebut tercermin dalam sikap inklusif masyarakatnya serta kebijakan pemerintah yang mendorong penerimaan dan penghormatan terhadap perbedaan.

Penerimaan terhadap individu atau komunitas yang datang ke Australia terlihat jelas dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari peluang untuk bekerja, bersekolah, hingga berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan keagamaan tanpa diskriminasi. Australia juga memberikan ruang bagi berbagai komunitas untuk mempertahankan identitas budaya dan agama mereka, termasuk kebebasan mendirikan tempat ibadah, menyelenggarakan festival budaya, atau mengelola sekolah berbasis nilai-nilai tradisional masing-masing.

Lebih dari itu, Australia memiliki kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung toleransi, seperti anti-diskriminasi dan perlindungan hak-hak minoritas. Hal ini menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi individu maupun komunitas untuk hidup berdampingan secara harmonis, sekaligus berkontribusi pada pembangunan sosial dan ekonomi negara. Keterbukaan yang ditunjukkan oleh Australia tidak hanya memperkuat

hubungan antarbudaya di dalam negeri tetapi juga memberikan inspirasi kepada dunia tentang bagaimana keberagaman dapat menjadi kekuatan yang memperkaya kehidupan masyarakat secara keseluruhan.

Kelompok-kelompok diaspora Indonesia di Australia, seperti PCI NU, PCIM, Iqro Foundation, dan Indonesian Diaspora Network (IDN), menunjukkan kemampuan adaptasi yang tinggi dengan cara melebur ke dalam tatanan peradaban dan hukum yang berlaku di negara tersebut. Mereka menyadari bahwa keberhasilan dalam membangun komunitas yang harmonis di Australia memerlukan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip mendasar yang menjadi dasar hidup bersama, seperti penghormatan terhadap hukum, toleransi, dan inklusivitas.

Dalam konteks ini, organisasi-organisasi tersebut tidak hanya menanamkan nilai-nilai keagamaan dan budaya Indonesia di tengah komunitasnya, tetapi juga mengintegrasikannya dengan norma-norma sosial yang berlaku di Australia. Misalnya, kegiatan keagamaan yang mereka selenggarakan disesuaikan dengan kebijakan setempat terkait penggunaan ruang publik atau fasilitas umum. Selain itu, mereka juga aktif mendorong anggota komunitas untuk memahami dan mematuhi hukum Australia, seperti aturan terkait imigrasi, pendidikan, atau pekerjaan.

Pandangan tentang pentingnya menerima keberagaman di Australia menjadi konsensus di antara berbagai kelompok diaspora Indonesia, termasuk organisasi keagamaan seperti PCI NU, PCIM, Iqro Foundation, dan Indonesian Diaspora Network (IDN). Mereka sepakat bahwa keberagaman budaya, agama, dan latar belakang masyarakat di Australia merupakan fondasi penting yang harus dihormati untuk menciptakan kehidupan bersama yang harmonis.

Wendi Wijarwadi, Wakil Ketua PCI NU, menegaskan bahwa penerimaan terhadap keberagaman di Australia tidak hanya merupakan sikap etis, tetapi juga didasarkan pada prinsip-prinsip kemanusiaan universal dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Menurutnya, hukum di Australia yang melindungi kebebasan beragama, hak asasi manusia, dan persamaan di depan hukum menjadi pedoman yang harus dihormati oleh komunitas diaspora Indonesia. Dengan menerima keberagaman ini, komunitas diaspora tidak hanya menunjukkan adaptasi terhadap peradaban setempat, tetapi juga memperkuat posisi mereka sebagai bagian dari masyarakat global yang menghargai inklusivitas dan toleransi. Wendi menjelaskan:

“Apa pun yang ada harus diikuti, karena semua aturan yang ada di Australia ini pada hakikatnya untuk mengatur kehidupan yang multikultural. Sejuah menyangkut kemanusiaan, kita junjung tinggi. Kami rasa tidak ada masalah, hidup dalam masyarakat yang multikultural atau pun plural. Mereka (Masyarakat

Australia) juga tidak mempedulikan dengan agama atau keyakinan kita, bagi mereka sejauh tidak mengganggu kenyamanan publik tidak jadi masalah”.

Sikap keterbukaan dan penerimaan terhadap keragaman yang ditunjukkan oleh komunitas diaspora Indonesia di Australia mencerminkan implementasi nyata dari nilai-nilai keagamaan yang mereka bawa. Organisasi seperti PCI NU dan PCIM mengedepankan prinsip *rahmatan lil ‘alamin* (rahmat bagi seluruh alam) sebagai landasan untuk membangun harmoni dalam masyarakat multikultural Australia. Prinsip ini mengajarkan umat Muslim untuk hidup berdampingan dengan berbagai kelompok, baik yang berasal dari komunitas Muslim maupun non-Muslim, tanpa mengorbankan keyakinan dan identitas keagamaannya.

Izzah Rahman, Ketua PCIM Sydney, dalam sebuah wawancara pada 18 November 2024, menegaskan pentingnya menerima keberagaman sebagai kenyataan hidup di Australia. Izza menjelaskan:

“Kami di Muhammadiyah dapat menerima apa pun, bukan hanya dari kelompok Islam saja, namun juga dari kelompok non-Muslim. Karena kenyataan di Australia memang beragam. Kita berbaur dengan siapa saja, apalagi sesama Muslim dari Indonesia. Dengan Muslim non-Indonesia ataupun dengan orang non-Muslim Australia, kita juga dapat menerima. Kita hormati hukum yang ada dan ketentuan dalam masyarakat Australia”.

Pernyataan ini menunjukkan bahwa komunitas diaspora Muslim, khususnya warga Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, tidak hanya menerima keberagaman sebagai sebuah fakta sosial, tetapi juga menjadikannya peluang untuk mempererat hubungan lintas budaya dan agama. Mereka tidak memandang perbedaan sebagai penghalang, melainkan sebagai sarana untuk memperluas ukhuwah Islamiyah (persaudaraan sesama Muslim) dan ukhuwah insaniyah (persaudaraan sesama manusia).

Lebih jauh, Izzah juga menekankan bahwa komunitas diaspora Muslim di Australia menghormati hukum dan norma yang berlaku dalam masyarakat setempat. Hal ini menjadi salah satu kunci keberhasilan mereka dalam membangun hubungan yang harmonis dengan berbagai kelompok di Australia, baik dalam lingkup keagamaan maupun sosial. Dengan sikap yang inklusif dan berlandaskan pada prinsip toleransi, komunitas diaspora Indonesia mampu mempertahankan identitas keislamannya sekaligus berkontribusi dalam menciptakan masyarakat Australia yang damai dan multikultural.

Pendekatan seperti ini tidak hanya mencerminkan keindahan ajaran Islam yang inklusif, tetapi juga memperlihatkan bagaimana nilai-nilai agama dapat diaplikasikan dalam konteks global tanpa menimbulkan konflik. Komunitas seperti PCI NU dan PCIM telah menjadi contoh nyata bagaimana diaspora Muslim dapat menjalankan kehidupan yang seimbang antara menjaga identitas keagamaan dan menghormati keberagaman budaya di tempat mereka tinggal.

Senada dengan prinsip keterbukaan terhadap keberagaman, Iqro Foundation menunjukkan sikap arif dan bijaksana dalam menyikapi realitas masyarakat multikultural di Australia. Sebagai organisasi keagamaan, meskipun aktivitas utama Iqro berfokus pada penguatan spiritual dan pendidikan agama, mereka tetap terbuka terhadap masyarakat dari berbagai latar belakang. Keterbukaan ini tercermin dalam langkah-langkah mereka untuk meleburkan diri ke dalam lingkungan sosial, termasuk memberikan kesempatan kepada orang lain untuk ikut serta dalam kegiatan mereka dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar Masjid Iqro.

Sikap ini ditegaskan oleh Ustadz Addahroni, Pembina Iqro Foundation, dalam wawancara via Zoom pada 21 Oktober 2024. Beliau menjelaskan bahwa meskipun masyarakat Australia cenderung individualis, Iqro tetap berupaya untuk membangun interaksi sosial yang positif. Ustadz Addahroni menjelaskan:

“Kita ada kegiatan yang bersifat sosial, yakni bersih-bersih di sekitar masjid Iqro. Ini merupakan bagian dari kita menghormati keberadaan masyarakat lain di Australia. Selain itu, jika Ramadhan kita sering ada buka bersama, yang datang bukan hanya jamaah Iqro. Ada masyarakat lain non-Indonesia yang juga datang. Demikian juga pada shalat Idul Fitri atau Idul Adha, ada kelompok lain yang datang ke Iqro untuk shalat dan makan-makan bersama”.

Pernyataan ini menggambarkan bahwa Iqro Foundation tidak hanya berperan sebagai pusat kegiatan keagamaan, tetapi juga sebagai jembatan yang memperkuat hubungan antar komunitas. Dengan membuka ruang bagi partisipasi masyarakat lain, termasuk non-Muslim dan non-Indonesia, Iqro menunjukkan nilai-nilai Islam yang inklusif dan mengedepankan semangat kebersamaan. Hal ini tidak hanya menciptakan hubungan harmonis dengan masyarakat sekitar, tetapi juga memperluas pemahaman tentang Islam sebagai agama yang membawa rahmat bagi semua.

Lebih jauh, kegiatan sosial seperti bersih-bersih lingkungan di sekitar masjid menunjukkan komitmen Iqro untuk berkontribusi dalam kehidupan sosial di Sydney. Kegiatan ini bukan hanya bagian dari penghormatan terhadap komunitas setempat, tetapi juga cara untuk menampilkan wajah Islam yang peduli terhadap kebersihan dan kebaikan bersama. Demikian pula, momen-momen seperti buka puasa bersama atau shalat Idul Fitri dan Idul Adha yang melibatkan berbagai kelompok masyarakat menjadi simbol interaksi lintas budaya dan agama yang damai.

Dengan pendekatan ini, Iqro Foundation tidak hanya menjaga identitas keagamaannya, tetapi juga menunjukkan bagaimana komunitas Muslim dapat berkontribusi dalam masyarakat multikultural seperti Australia. Keterbukaan dan partisipasi aktif mereka dalam berbagai

kegiatan sosial mencerminkan nilai-nilai universal Islam, seperti persaudaraan, toleransi, dan cinta kasih, yang relevan dalam konteks global saat ini.

Indonesian Diaspora Network (IDN) memiliki peran strategis dalam menghubungkan berbagai kelompok diaspora Indonesia di Australia, khususnya dalam konteks dialog antarbudaya dan antaragama. Melalui pendekatan yang inklusif, IDN menekankan pentingnya komunikasi terbuka dan sikap saling menghormati sebagai sarana untuk memperkuat hubungan sosial antar komunitas. Sikap ini tidak hanya membantu menjaga eksistensi diaspora Indonesia di tengah masyarakat multikultural Australia, tetapi juga mendorong mereka untuk lebih aktif berkontribusi dalam kehidupan sosial di negara tersebut. Fokus IDN lebih diarahkan pada penguatan identitas ke-Indonesia-an, sembari memupuk rasa toleransi terhadap perbedaan baik di antara kelompok diaspora maupun dengan kultur Barat yang dominan di Australia.

Sebagai organisasi payung, IDN memfasilitasi pertemuan berbagai kelompok diaspora yang beragam—baik yang berbasis agama, etnisitas, profesi, maupun mahasiswa. Menurut Salut Muhidin, Koordinator IDN Australia, dalam pernyataannya pada Oktober 2024, IDN telah mencatat keberadaan sekitar 50 organisasi diaspora Indonesia yang tersebar di seluruh Australia. Salut Muhidin menyatakan:

“IDN ini menjadi medium pertemuan berbagai macam kelompok diasporan Indonesia. Sesuai dengan catatan kami, sekitar 50 organisasi diaspora ada di Australia, baik kelompok berdasarkan agama, etnisitas, atau pun kelompok profesi dan mahasiswa. Kami tidak melakukan penguatan keagamaan, namun kami memberikan fasilitas kelompok diaspora atau pun individu-individu untuk terhubung dengan lainnya. Sejauh ini, IDN mampu menjembatani berbagai kelompok, termasuk menjembatani dengan budaya Australia”.

Pernyataan ini menegaskan peran IDN sebagai wadah yang berfungsi mempertemukan berbagai elemen diaspora, menciptakan ruang interaksi yang harmonis, dan menjembatani dialog lintas budaya. Melalui kegiatan dan inisiatifnya, IDN berhasil memupuk rasa kebersamaan di antara kelompok diaspora yang beragam. Dengan memfasilitasi pertemuan dan interaksi, IDN mendorong diaspora Indonesia untuk tidak hanya mempertahankan jati diri budaya, tetapi juga beradaptasi secara positif dengan kultur dan nilai-nilai Australia. Sikap saling menghargai dan penerimaan ini membuat komunitas diaspora Indonesia mampu hidup berdampingan dengan masyarakat multikultural Australia tanpa kehilangan identitas mereka. IDN juga berperan penting dalam memperkenalkan nilai-nilai ke-Indonesia-an kepada masyarakat Australia, menjadikan dialog lintas budaya sebagai jembatan untuk saling memahami dan membangun hubungan yang lebih harmonis.

Kesadaran akan pentingnya kepatuhan terhadap kesepakatan hidup bersama ini tidak hanya menjadikan komunitas diaspora Indonesia sebagai warga yang baik, tetapi juga

meningkatkan citra positif masyarakat Indonesia di mata masyarakat Australia. Organisasi-organisasi ini menjadi jembatan yang menghubungkan identitas budaya dan keagamaan dengan nilai-nilai universal, seperti keadilan, kedamaian, dan solidaritas. Dengan cara ini, mereka berhasil mempertahankan identitas ke-Indonesiaan sambil berkontribusi secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat di Australia. Hal ini menjadi bukti bahwa komunitas diaspora Indonesia mampu beradaptasi dengan baik tanpa kehilangan akar budaya dan keagamaannya.

D. Rekonseptualisasi Moderasi Beragama

Keberagaman dalam agama, budaya, maupun pandangan hidup tidak pernah menjadi penghalang bagi keharmonisan sosial di Australia. Sebaliknya, keberagaman dianggap sebagai sumber kekuatan yang memperkaya karakter masyarakat. Australia adalah salah satu negara yang memberikan ruang luas bagi kebebasan beragama dan hak asasi manusia. Baik mereka yang menganut agama tertentu maupun yang memilih untuk tidak beragama sama sekali, semuanya mendapatkan perlindungan yang setara di bawah hukum. Prinsip penghormatan terhadap hak individu ini menjadi dasar bagi terbentuknya masyarakat yang saling menerima, menjadikan keberagaman sebagai bagian integral dalam kehidupan sehari-hari. Dengan pendekatan ini, Australia tidak hanya menjamin hak setiap individu, tetapi juga menumbuhkan harmoni dalam masyarakat multikultural.

Sikap toleransi masyarakat Australia tercermin jelas dalam penerimaan mereka terhadap berbagai aktivitas budaya dan keagamaan. Selama tidak melanggar hak publik, kegiatan-kegiatan ini diterima dengan baik bahkan diadakan secara terbuka. Salah satu contoh nyata adalah pasar malam Ramadhan di Lakemba, wilayah Canterbury-Bankstown, yang berlangsung selama sebulan penuh. Acara ini bukan hanya menjadi simbol perayaan tradisi Muslim di Australia, tetapi juga menarik perhatian masyarakat luas, termasuk non-Muslim, yang turut merasakan kehangatan acara tersebut. Aktivitas serupa juga berkembang di Liverpool, menunjukkan bahwa ruang bagi keberagaman terus diperluas. Acara seperti ini tidak hanya menjadi sarana ekspresi budaya dan agama, tetapi juga berfungsi sebagai platform yang mempererat hubungan antar komunitas, memperkuat pemahaman, dan menciptakan harmoni sosial.

Australia juga memberikan kesempatan luas bagi komunitas diaspora, termasuk masyarakat Indonesia, untuk mempertahankan dan mengembangkan identitas budaya mereka. Diaspora Indonesia dapat dengan bebas mempraktikkan tradisi-tradisi khas Nusantara, seperti pengajian, kesenian tradisional, atau perayaan hari-hari besar seperti Hari Kemerdekaan dan

Idul Fitri. Ruang ini memungkinkan mereka untuk menjalankan nilai-nilai budaya dan keagamaan tanpa khawatir akan diskriminasi atau penolakan. Kehidupan multikultural Australia yang terbuka memberikan rasa aman bagi diaspora untuk menjaga akar budaya mereka sembari tetap terintegrasi dalam masyarakat modern. Dalam konteks ini, masyarakat Indonesia tidak hanya mempertahankan warisan budaya, tetapi juga turut memperkaya mozaik keberagaman di Australia. Sikap ini menggambarkan bagaimana tradisi dan modernitas dapat berjalan berdampingan, menciptakan harmoni yang bermanfaat bagi semua pihak.

Keberadaan diaspora Indonesia di Australia tidak hanya membawa peluang, tetapi juga tantangan, terutama dalam menjaga identitas kebangsaan dan keagamaan mereka. Banyak anggota diaspora yang, seiring waktu, mulai kehilangan ikatan dengan akar budaya dan tradisi Indonesia, karena terpengaruh oleh persinggungan yang intens dengan budaya dan nilai-nilai lokal. Kehidupan di Australia yang sangat terbuka, modern, dan inklusif, sering kali mengarahkan sebagian masyarakat diaspora untuk mengadopsi gaya hidup yang lebih “Barat”. Dalam proses ini, nilai-nilai asli yang mereka bawa dari tanah air, baik yang berlandaskan kebangsaan maupun agama, berpotensi tergerus atau tersisih.

Meskipun moderasi dan toleransi tetap menjadi ciri utama diaspora Indonesia, identitas ini terkadang lebih terefleksi dalam konteks masyarakat Australia yang multikultural. Sikap moderat dan toleran yang mereka tunjukkan sering kali tidak lagi berbasis pada nilai-nilai budaya Indonesia sepenuhnya, melainkan lebih berorientasi pada norma-norma yang berlaku di Australia. Hal ini menciptakan semacam asimilasi budaya, di mana mereka tetap menghormati keberagaman, namun dalam kerangka kehidupan bermasyarakat di Australia.

Fenomena ini mengindikasikan perlunya upaya yang lebih strategis untuk memperkuat identitas diaspora Indonesia, baik melalui penguatan komunitas keagamaan maupun pelestarian budaya. Program-program yang mendorong diaspora untuk terus terhubung dengan akar tradisinya, seperti pengajian, seni budaya, atau perayaan hari besar nasional, menjadi penting untuk memastikan generasi diaspora tidak kehilangan rasa memiliki terhadap nilai-nilai Indonesia. Dengan cara ini, diaspora dapat berintegrasi secara harmonis dengan masyarakat Australia tanpa harus kehilangan identitas kebangsaan dan keagamaannya.

Meskipun diaspora Indonesia di Australia menghadapi tantangan dalam menjaga identitas budaya dan keagamaannya, banyak komunitas yang tetap menunjukkan kebanggaan dan kecintaan terhadap model beragama serta budaya khas Indonesia. Mereka tidak hanya mempertahankan tradisi, tetapi juga berupaya menghidupkan kembali nilai-nilai yang dibawa dari tanah air di lingkungan baru mereka. Bahkan, beberapa individu yang telah berpindah kewarganegaraan dan menjadi *citizen* Australia, tetap dengan bangga mengidentifikasi diri

mereka sebagai bagian dari budaya dan agama Indonesia. Kehidupan mereka di Australia justru menjadi medium untuk melestarikan tradisi yang diwariskan, sekaligus memperkenalkannya kepada masyarakat lokal maupun sesama diaspora.

Salah satu contoh inspiratif adalah Yusdi Maskum, seorang diaspora Indonesia asal Jepara, Jawa Tengah, yang menikah dengan warga negara Australia. Meskipun telah menetap lama di Australia, Yusdi tetap teguh pada identitas ke-Indonesiaannya. Ia bahkan mendirikan kelompok pengajian “Al-Ikhlas”, yang beranggotakan para diaspora Indonesia, terutama mereka yang telah menjadi permanent resident. Melalui kelompok ini, ia mengajarkan nilai-nilai Islam sekaligus menghidupkan kembali tradisi Nusantara seperti tahlilan, yasinan, peringatan Maulid Nabi, serta perayaan hari besar nasional seperti Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Aktivitas-aktivitas ini menjadi wadah untuk menyatukan diaspora Indonesia sekaligus memperkuat hubungan mereka dengan akar budaya yang menjadi bagian dari jati diri mereka.

Inisiatif seperti yang dilakukan oleh Yusdi Maskum mencerminkan semangat diaspora Indonesia dalam menjaga kesinambungan tradisi dan agama mereka di tengah lingkungan multikultural Australia. Dalam skala kecil, upaya ini juga menjadi bentuk dakwah kultural, di mana nilai-nilai toleransi dan keberagaman Indonesia diperkenalkan kepada masyarakat Australia. Lebih dari sekadar mempertahankan identitas, mereka menjadi pelopor yang mengintegrasikan tradisi Indonesia ke dalam kehidupan diaspora dan masyarakat luas, menunjukkan bahwa kebanggaan terhadap asal-usul tidak akan hilang meskipun jauh dari tanah air.

Murtala, seorang seniman asal Aceh, menjadi salah satu diaspora Indonesia yang berhasil mengintegrasikan tradisi budaya tanah air ke dalam masyarakat multikultural Australia. Dengan latar belakang seni yang kuat, ia tidak hanya mempertahankan identitas budaya Aceh, tetapi juga aktif menyebarkannya kepada masyarakat lokal. Meskipun menikah dengan seorang perempuan Australia, Murtala tetap menunjukkan kecintaannya pada seni tradisional Indonesia. Bersama istrinya, yang pernah mengecap pendidikan seni di Indonesia, Murtala mendirikan komunitas seni yang bertujuan mengenalkan keindahan tari tradisional Aceh kepada masyarakat Australia, terutama anak-anak dan remaja.

Melalui program-program seni yang dirancangnya, Murtala menciptakan ruang bagi warga lokal untuk memahami dan mengapresiasi kekayaan budaya Indonesia. Tari-tari tradisional Aceh, seperti Saman dan Ratoh Jaroe, tidak hanya diajarkan sebagai bentuk hiburan, tetapi juga sebagai media edukasi yang menggambarkan nilai-nilai kerjasama, keharmonisan, dan semangat kolektif yang menjadi ciri khas budaya Aceh. Dalam proses ini, Murtala bersama

istrinya tidak hanya melibatkan komunitas Indonesia di Australia, tetapi juga mengundang partisipasi dari berbagai latar belakang budaya, menciptakan interaksi budaya yang positif.

Inisiatif Murtala dan istrinya tidak hanya memperkuat identitas diaspora Indonesia di Australia, tetapi juga menjadi jembatan budaya yang mempererat hubungan antarbangsa. Anak-anak dan remaja yang terlibat dalam programnya tidak hanya belajar seni tari, tetapi juga memahami cerita, nilai, dan filosofi yang terkandung dalam budaya Aceh. Dengan demikian, Murtala telah membuktikan bahwa seni tradisional tidak hanya dapat bertahan di tengah arus globalisasi, tetapi juga memiliki kekuatan untuk memperkaya kehidupan sosial dalam masyarakat multikultural seperti Australia.

Moderasi beragama dalam konteks masyarakat diaspora Indonesia di Australia menunjukkan penerapan prinsip-prinsip moderasi yang cukup baik. Prinsip moderasi, seperti sikap toleransi, penghargaan terhadap perbedaan, dan kemampuan hidup berdampingan dengan berbagai kelompok, tampak nyata dalam kehidupan sehari-hari diaspora. Interaksi yang intens dengan masyarakat multikultural Australia telah mendorong diaspora Indonesia untuk mengedepankan nilai-nilai inklusivitas dan keterbukaan, baik dalam praktik keagamaan maupun kehidupan sosial. Komunitas seperti PCI NU, PCIM, Iqro Foundation, dan IDN menunjukkan bagaimana nilai-nilai moderasi beragama dapat diterapkan di tengah keberagaman agama, budaya, dan pandangan hidup yang ada di Australia.

Namun demikian, ada beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian serius, khususnya dalam menjaga identitas lokal Indonesia yang melekat pada tradisi keagamaan. Persinggungan dengan budaya Barat dan ideologi-ideologi lain yang berkembang di Australia berpotensi melembahkan atau bahkan mengikis nilai-nilai lokal Indonesia yang selama ini menjadi ciri khas cara beragama masyarakat diaspora. Misalnya, praktik-praktik tradisional seperti tahlilan, yasinan, peringatan maulid, atau kebiasaan gotong royong dalam kehidupan beragama mungkin berangsur-angsur berkurang atau mengalami penyesuaian akibat pengaruh gaya hidup individualistik yang lebih dominan di Barat. Selain itu, adanya persentuhan dengan ideologi yang ekstrem atau eksklusif, baik dari dalam maupun luar komunitas, juga berpotensi melunturkan sikap toleransi yang telah lama menjadi fondasi moderasi beragama.

Di sisi lain, diaspora Indonesia di Australia harus memiliki kesadaran bahwa moderasi beragama bukan berarti mencabut akar budaya lokal mereka, melainkan meneguhkan nilai-nilai universal Islam yang sejalan dengan ajaran *rahmatan lil 'alamin*. Upaya untuk mempertahankan tradisi keagamaan ala Indonesia, seperti pengajian rutin, perayaan hari besar keagamaan, dan penguatan nilai-nilai kekeluargaan, sangat penting agar generasi diaspora mendatang tetap memiliki identitas keagamaan yang moderat dan tidak tergerus oleh arus

budaya global. Pemangku kepentingan dalam komunitas diaspora, seperti tokoh agama, pemimpin organisasi, dan generasi muda, memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan antara adaptasi dengan budaya baru dan pelestarian nilai-nilai lokal Indonesia.

Dengan demikian, moderasi beragama di tengah diaspora Indonesia di Australia harus dilihat sebagai sebuah proses dinamis. Di satu sisi, diaspora dapat beradaptasi dengan realitas keberagaman dan multikulturalisme Australia. Di sisi lain, diaspora juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga identitas keagamaan dan budaya lokal Indonesia sebagai warisan berharga yang harus terus dilestarikan. Tantangan ini harus dijawab dengan pendekatan yang kreatif dan strategis agar moderasi beragama tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang sebagai model yang harmonis dan inklusif di tengah masyarakat global.

BAB VI KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan tiga hal penting. Pertama, moderasi beragama pada komunitas diaspora Indonesia didorong oleh peran kelompok-kelompok diaspora, seperti PCI NU Australia New Zealand, PCI Muhammadiyah Australia, Iqrop Foundation dan Indonesian Diaspora Network. Komunitas diaspora tersebut telah menunjukkan komitmen terhadap prinsip moderasi beragama. Prinsip ini tercermin dalam praktik keagamaan yang inklusif, penerimaan terhadap keberagaman, dan partisipasi aktif dalam kegiatan lintas budaya serta sosial di Australia. Moderasi beragama telah menjadi fondasi penting dalam menjaga harmoni internal komunitas diaspora dan memfasilitasi hubungan yang baik dengan masyarakat lokal.

Peran organisasi keagamaan dan non-keagamaan. Organisasi-organisasi diaspora seperti PCI NU, PCIM, Iqro Foundation, dan IDN berperan signifikan dalam menjaga nilai-nilai moderasi beragama dan kebangsaan. Mereka menjadi pusat pembinaan spiritual, edukasi, dan integrasi sosial yang efektif. Selain itu, keberadaan kegiatan keagamaan dan budaya yang inklusif, seperti pengajian, perayaan tradisi, dan partisipasi dalam kegiatan sosial, menunjukkan kemampuan diaspora dalam menjembatani identitas keagamaan Indonesia dengan dinamika sosial di Australia.

Komunitas diaspora tidak hanya mempertahankan identitas mereka, tetapi juga berkontribusi pada kehidupan multikultural di Australia. Melalui praktik moderasi beragama yang toleran, damai, dan produktif, diaspora Indonesia menjadi model dalam membangun koeksistensi dan dialog antarbudaya. Mereka menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam *rahmatan lil 'alamin* dapat diaplikasikan secara kontekstual di negara sekuler tanpa kehilangan substansi ajaran agama.

Kedua, lembaga-lembaga publik di Australia memainkan peran penting dalam mengartikulasikan Australian values atau nilai-nilai dasar yang menjadi fondasi dalam kehidupan berbangsa dan beragama. Nilai-nilai ini, seperti toleransi, kebebasan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap perbedaan, menjadi prinsip utama dalam menjaga keharmonisan dan kerukunan di tengah masyarakat yang multikultural. Prinsip-prinsip tersebut tidak hanya menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga mendasari berbagai interaksi sosial di semua lini kehidupan, menciptakan ruang inklusif bagi individu dan komunitas dari latar belakang yang berbeda.

Lembaga-lembaga publik, seperti pemerintahan, sekolah, universitas, dan lingkungan kerja, memastikan bahwa kebebasan individu, termasuk dalam hal beragama dan berekspresi,

dilindungi sepenuhnya oleh hukum. Pemerintah Australia, melalui kebijakan anti-diskriminasi dan perlindungan hak asasi manusia, menjamin bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk menjalankan keyakinannya tanpa rasa takut akan diskriminasi atau marginalisasi. Hal ini memungkinkan komunitas diaspora, termasuk diaspora Indonesia, untuk menjalankan praktik keagamaan, budaya, dan identitas mereka secara terbuka dan aman.

Lebih lanjut, institusi pendidikan dan lingkungan kerja turut mendukung penerapan nilai-nilai tersebut dengan menciptakan ruang dialog, pemahaman lintas budaya, dan toleransi antar kelompok. Sekolah dan universitas, misalnya, sering menjadi pusat kegiatan inklusif yang merayakan keberagaman budaya dan agama melalui acara-acara seperti hari kebudayaan dan festival multikultural. Sementara itu, di lingkungan kerja, praktik kesetaraan dan penghormatan terhadap perbedaan menjadi bagian integral dari kode etik profesional. Dengan demikian, lembaga-lembaga publik di Australia tidak hanya mempromosikan Australian values, tetapi juga menciptakan ekosistem yang memungkinkan diaspora Indonesia dan komunitas lainnya untuk beradaptasi, mempertahankan identitas mereka, dan berkontribusi aktif dalam masyarakat multikultural Australia.

Ketiga, komunitas-komunitas diaspora Indonesia di Australia menunjukkan kemampuan yang luar biasa dalam melakukan akulturasi antara peradaban Australia dan nilai-nilai lokal Indonesia. Akulturasi ini tidak berarti menghilangkan jati diri, tetapi justru menjadi proses dinamis yang memungkinkan diaspora untuk mengintegrasikan identitas budaya dan keagamaan Indonesia ke dalam realitas kehidupan masyarakat Australia yang multikultural. Dengan tetap mempertahankan tradisi, nilai, dan prinsip moderasi beragama yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia, diaspora berhasil menyeimbangkan antara adaptasi terhadap budaya baru dan pelestarian akar budaya asal.

Kemampuan ini terlihat dari cara komunitas diaspora menjalankan kehidupan beragama dan budaya dalam bingkai sistem yang berlaku di Australia. Mereka mengakui dan menghormati Australian values seperti kebebasan individu, toleransi, dan penghormatan terhadap hukum, namun pada saat yang sama mereka tetap mempraktikkan tradisi khas Indonesia seperti pengajian rutin, perayaan hari besar Islam, tahlilan, yasinan, serta kegiatan seni budaya seperti tari tradisional dan kuliner Nusantara. Praktik-praktik ini tidak hanya menjadi sarana untuk menjaga jati diri dan identitas budaya, tetapi juga sebagai medium untuk memperkenalkan kekayaan tradisi Indonesia kepada masyarakat Australia.

Lebih jauh, prinsip moderasi beragama yang dijalankan oleh komunitas diaspora Indonesia telah menjadi jembatan penting dalam membangun hubungan yang harmonis dengan kelompok lain. Moderasi beragama, yang ditandai dengan sikap toleran, inklusif, dan

menghargai perbedaan, menjadikan komunitas diaspora Indonesia sebagai contoh positif dalam menjalankan kehidupan beragama di tengah lingkungan yang plural dan sekuler. Mereka mampu menyesuaikan praktik keagamaannya dengan sistem hukum dan norma sosial Australia tanpa kehilangan nilai inti ajaran agama mereka. Akulturasi ini menciptakan harmoni yang unik, di mana diaspora Indonesia dapat hidup berdampingan secara damai dengan masyarakat setempat sambil tetap membawa identitas keagamaan dan budayanya. Hal ini membuktikan bahwa diaspora Indonesia tidak hanya mampu beradaptasi, tetapi juga berkontribusi dalam memperkaya mozaik keberagaman budaya dan agama di Australia.

Tantangan identitas dalam lingkungan multikultural. Meski diaspora Indonesia berhasil mempertahankan sebagian besar nilai-nilai keagamaannya, tantangan tetap ada. Persinggungan dengan budaya Barat yang lebih individualistik dan ideologi yang beragam berpotensi melunturkan nilai-nilai lokal keagamaan dan budaya Indonesia. Beberapa diaspora mengalami proses "melunturnya" identitas budaya dan keagamaan, sementara yang lain mampu mengembangkan identitas hibrida yang harmonis antara tradisi asal dan realitas Australia.

B. Rekomendasi

Berdasarkan temuan penelitian ini, beberapa rekomendasi akademik dan praktis untuk Kementerian Agama Republik Indonesia dirumuskan sebagai berikut: Pertama, Rekomendasi Akademik. Kementerian Agama dapat mendukung penelitian lanjutan terkait praktik moderasi beragama dalam komunitas diaspora Indonesia di negara-negara lain. Penelitian ini penting untuk memahami bagaimana moderasi beragama berinteraksi dengan konteks multikultural, tantangan globalisasi, dan dinamika masyarakat sekuler. Penelitian ini dapat menjadi dasar pengembangan modul atau kurikulum moderasi beragama yang relevan bagi komunitas diaspora. Kurikulum ini harus memuat nilai-nilai toleransi, dialog antaragama, serta strategi mempertahankan identitas keagamaan dan budaya dalam lingkungan global yang beragam.

Kedua, rekomendasi praktis. Beberapa hal yang dapat dilakukan oleh Kementerian Agama. Kementerian Agama dapat mendukung organisasi diaspora seperti PCI NU, PCIM, Iqro Foundation, dan IDN melalui program-program yang bertujuan memperkuat identitas budaya dan keagamaan diaspora. Dukungan dapat berupa penyediaan materi ajar, bantuan teknis, dan fasilitasi kegiatan lintas agama serta budaya yang bersifat inklusif. Pemerintah, melalui Kementerian Agama, dapat membentuk Jaringan Diaspora Penggerak Moderasi Beragama (JDPMB) yang lebih luas dan terorganisir. Jaringan ini berperan sebagai wadah koordinasi kegiatan diaspora dalam mempromosikan nilai-nilai moderasi beragama, baik di

kalangan internal diaspora maupun di lingkungan masyarakat setempat. Kementerian Agama disarankan untuk menyelenggarakan pelatihan bagi pemuka agama dan tokoh komunitas diaspora agar mereka mampu membina komunitas dengan pendekatan moderasi. Pelatihan ini dapat mencakup metode dakwah inklusif, teknik dialog antaragama, dan cara menghadapi tantangan globalisasi yang dihadapi diaspora.

Kementerian Agama perlu memaksimalkan potensi diaspora sebagai agen diplomasi budaya dan keagamaan di negara tujuan. Dukungan program-program budaya seperti festival seni, tari, musik, dan pengenalan tradisi keagamaan Indonesia dapat memperkuat citra positif Indonesia sebagai negara dengan mayoritas Muslim yang menjunjung tinggi toleransi dan keberagaman. Pemanfaatan teknologi digital perlu ditingkatkan untuk mendukung komunikasi, pendidikan, dan sosialisasi nilai-nilai moderasi beragama bagi komunitas diaspora. Kementerian Agama dapat menyediakan platform daring yang memuat konten edukatif, ceramah virtual, dan dialog lintas komunitas diaspora untuk memperkuat pemahaman moderasi.

Penelitian ini menegaskan bahwa moderasi beragama memiliki peran sentral dalam menjaga harmoni dan keseimbangan identitas di tengah komunitas diaspora Indonesia di Australia. Dengan pendekatan yang strategis dan kolaboratif, Kementerian Agama diharapkan dapat menjadi mitra utama dalam penguatan moderasi beragama, tidak hanya bagi diaspora Indonesia tetapi juga sebagai model praktik keagamaan yang toleran dan inklusif di tingkat global. Upaya ini tidak hanya memperkuat identitas diaspora Indonesia, tetapi juga memperkuat diplomasi kebudayaan Indonesia di dunia internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Abordo, Y., & Deagon, A. (2023). Religious Freedom and Freedom from Religious Discrimination: Implications for the Religious Discrimination Bill. *Australian Journal of Law and Religion*, 3, 1–19.
- About Indonesian Diaspora Network, Sumber: <https://idn-nsw.org.au/index.php/about-indonesia-diaspora-network/>. Diakses 06 November 2024.
- About Iqro Foundation, Sumber: <https://www.iqro.org.au/history>. Diakses 06 November 2024.
- Addahroni, H. (2024). Interview. *Koordinator Masjid Iqro Sydney*, 9(12).
- AFIC, “History of Islam in Australia”, <https://afic.com.au/history-of-islam/>. Diakses 03 Maret 2024.
- Aidulsyah, F. & Gusnelly. (2019). Mapping Indonesian Muslim Organizations In The Netherlands, *JISSH*, Volume 9, Issue 2, (157–165), DOI:10.14203/jissh.v9i2.150.
- Aisha, S., & Mulyana, D. (2019). Indonesian postgraduate students’ intercultural communication experiences in the United Kingdom. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 7(1), 1–13.
- Al-Asfahani, A.-R. M. (2009). *Al-Mufradat al-Fazil-Qur’an*. Dar al-Fikr.
- Albrecht, Sarah. (2018). *Dār Al-Islām Revisited: Territoriality in Contemporary Islamic Legal Discourse on Muslims in the West*, vol. 29, Leiden: Brill.
- Almu’tasim, A. (2019). Berkaca NU dan Muhammadiyah dalam mewujudkan nilai-nilai moderasi Islam di Indonesia. *Tarbiya Islamia: Jurnal Pendidikan Dan Keislaman*, 8(2), 199–212.
- Althaus, C., Ball, S., Bridgman, P., Davis, G., & Threlfall, D. (2022). *The Australian policy handbook: A practical guide to the policymaking process*. Routledge.
- Andrade, M. S. (2006). International students in English-speaking universities. *Journal of Research in International Education*, 5, 131–154.
- Ang, I., Brand, J. E., Noble, G., & Sternberg, J. (2006). *Connecting diversity: Paradoxes of multicultural Australia*. Research Direct Library Western Sydney University.
- Australian Bureau Statistics (ABS), “Religion in Australia”, <https://web.archive.org/web/20170630034823/http://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/Lookup/by%20Subject/2071.0~2016~Main%20Features~Religion%20Data%20Summary~25>. Diakses 03 Maret 2024,
- Australian Government. (2020). *Life in Australia: Australian values and principles*. Portfolio Media and Engagement Branch.
- Ayoub, M. M. (1998). The numinous in the Qur’an: An assessment of Rudolf Otto’s view of Islam. *The Muslim World*, 88(3/4), 256.
- Baines, C. (2013). A new way forward: Special religious instruction in Victoria, Australia. *Journal of Religious Education*, 61(3).
- Baum, Scott. (1997). “Sydney, Australia: A Global City? Testing the Social Polarisation Thesis.” *Urban Studies*, Volume: 34 issue: 11, pp: 1881-1902, DOI: <https://doi.org/10.1080/0042098975295>.
- Berry, J. W. (1997). Immigration, acculturation and adaptation. *Applied Psychology*, 46(1), 5–34.
- Berry, J. W. (2006). Stress perspectives on acculturation. In D. L. Sam, & J. W. Berry (Eds.), *The Cambridge handbook of acculturation psychology* (pp. 43–57). Cambridge: Cambridge University Press.
- Bevis, T. B. (2002). At a glance: International students in the United States. *International Educator*, 11(3), 12–17.
- Bhabha, H. K. (1994). The postcolonial and the postmodern: The question of agency. In *The location of culture* (pp. 171–197). Routledge.

- Braithwaite, J. (1995). Community values and Australian jurisprudence. *Sydney Law Review*, 17(3), 351–372.
- Brisset, C., Safdar, S., Lewis, J. R., & Sabatier, C. (2010). Psychological and sociocultural adaptation of university students in France: the case of Vietnamese international students. *International Journal of Intercultural Relations*, 34(4), 413–426.
- Britannica, “Australia”, <https://www.britannica.com/place/Australia/The-Mesozoic-and-Cenozoic-eras>. Diakses 03 Maret 2024.
- Brown, J. & Brown, L. (2013). The international student sojourn, identity conflict, and threats to wellbeing. *British Journal of Guidance and Counselling*, 41(4):395-413, DOI:10.1080/03069885.2012.729026.
- Bugg, Laura, & Nicole Gurrán, (2011). Urban Planning Process And Discourses In The Refusal Of Islamic Schools In Sydney, Australia, *Australian Planner*, Volume 48, Issue 4, DOI: <https://doi.org/10.1080/07293682.2011.593531>.
- Chavura, S., Gascoigne, J., & Tregenza, I. (2019). Reason, religion and the Australian polity: A secular state? Routledge.
- Chen, C. P. (1999). Common stressors among international college students: Research and counseling implications. *Journal of College Counseling*, 2, 49–65.
- Chiu, Y. P., Wu, M., Zhuang, W. L., & Hsu, Y. Y. (2009). Influences on expatriate social networks in China. *International Journal of Human Resource Management*, 20(4), 790–809.
- Cholil, S. (2022). Freedom of religion amid polarization and religious moderation policy. *Interreligious Studies and Intercultural Theology*, 6(2), 196–204.
- Cohen, R. (2022). *Global diasporas: An introduction*. Routledge.
- Colebatch, H. K. (2020). *Beyond the policy cycle: The policy process in Australia*. Routledge.
- Collins, J. (2020). Immigration and class: The Australian experience. In *Ethnicity, class and gender in Australia* (pp. 1–27). Routledge.
- DeCoito, I., Steele, A., & Goodnough, K. (2016). Introduction to the special issue on science, technology, engineering, and mathematics (STEM) education. *Canadian Journal of Science, Mathematics and Technology Education*, 16(2), 109–113.
- Devinta, M., Hidayah, N., & Hendrastomo, G. (2015). Fenomena Culture Shock (Gegar Budaya) pada Mahasiswa Perantauan di Yogyakarta. *Jurnal Pendidikan Sosiologi* 2015, 1–15.
- Dufoix, S. (2009). Deconstructing and Reconstructing “Diaspora”: A Study in Socio-Historical Semantics. In *Transnationalism* (pp. 47–74). Brill.
- Dugdale, P. (2020). *Doing health policy in Australia*. Routledge.
- Dunn, Kevin. (2001). “Representations of Islam in the politics of mosque development in Sydney,” *Journal of Economic and Human Geography*, Volume92, Issue3, pp: 291-308, DOI: <https://doi.org/10.1111/1467-9663.00158>.
- Elazar, D. J. (1991). Land, State and Diaspora in the History of the Jewish Polity. *Jewish Political Studies Review*, 3–31.
- Elias, A., Mansouri, F., & Sweid, R. (2021). Public attitudes towards multiculturalism and interculturalism in Australia. *Journal of International Migration and Integration*, 22(3), 1063–1084.
- Elmoudden, S. (2013). Moroccan Muslim women and identity negotiation in diasporic spaces. *Middle East Journal of Culture and Communication*, 6(1), 107–125.
- Farid, F. (2024). The Concept of Religious Experience by Rudolf Otto: A Phenomenological Approach. *Jurnal Filsafat*, 34(2), 235–253.
- Fernando, J.; Marta, R.F.; Hidayati, R.K. (2020). Reaktualisasi mahasiswa diaspora Indonesia dalam menjaga identitas budaya bangsa di Benua Australia. *Jurnal Kajian Komunikasi*, [S.l.], v. 8, n. 2, p. 194-206.

- Firmansyah, A. (2022, November 3). Kemenag-Darul Fatwa Australia kerja sama diseminasi moderasi beragama. Antara: Kantor Berita Indonesia. <https://www.antaranews.com/berita/3219929/kemenag-darul-fatwa-australia-kerja-sama-diseminasi-moderasi-beragama>
- Firth, W. B. (2022). Special Religious Education in a post-secular Australia. *Verbum et Ecclesia*, 43(1), 1–8.
- Forbush, E., & Foucault-Welles, B. (2016). Social media use and adaptation among Chinese students beginning to study in the United States. *International Journal of Intercultural Relations*, 50, 1–12.
- Forrest, James, & Kevin Dunn. (2010). Attitudes to Multicultural Values in Diverse Spaces in Australia's Immigrant Cities, Sydney and Melbourne, *Space and Polity*, 14:1, pp: 81-102, DOI: 10.1080/13562571003737791.
- Furnham, A. (2004). Foreign students: education and culture shock. *The Psychologist*, 17(1), 16–19.
- Gaw, K. F. (2000). Reverse culture shock in students returning from overseas. *International Journal of Intercultural Relations*, 24(1), 83–104.
- Gheasi, M., & Nijkamp, P. (2017). A brief overview of international migration motives and impacts, with specific reference to FDI. *Economies*, 5(3), 31.
- Gherghina, S., & Plopeanu, A. (2021). Social networks, attachment and integration: Understanding the church attendance of Romanian migrants. *Journal of Beliefs & Values*, 42(1), 110–123.
- Giddens, A. (1990). *The Consequences of Modernity*. Polity Press.
- Hargreaves, Julian & Staetsky, L. Daniel (2020) ‘Antisemitism and Islamophobia: measuring everyday sensitivity in the UK’, *Ethnic and Racial Studies*, Vol. 43, No. 12, pp. 2176–2198.
- Harris-Hogan, S., Barrelle, K., & Zammit, A. (2016). What is countering violent extremism? Exploring CVE policy and practice in Australia. *Behavioral Sciences of Terrorism and Political Aggression*, 8(1), 6–24.
- Harrison, P. (2002). Educational exchange for international understanding. *International Educator*, 11(4), 2–4.
- Hassan, R. (2006). Globalisation's challenge to the Islamic Ummah. *Asian Journal of Social Science*, 34(2), 311–323.
- Hendrickson, B., Rosen, D., & Aune, R. K. (2011). An analysis of friendship networks, social connectedness, homesickness and satisfaction levels of international students. *International Journal of Intercultural Relations*, 35(3), 281–295.
- Hilmy, M. (2012). Quo-vadis islam moderat indonesia? Menimbang kembali modernisme nahdlatul ulama dan muhammadiyah. *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 36(2), 262–281.
- Holland, A. (2010). Australian citizenship in the twenty-first century: Historical perspectives. In *From migrant to citizen: Testing language, testing culture* (pp. 39–59). Springer.
- Hollinshead, K. (1998). Tourism, hybridity, and ambiguity: The relevance of Bhabha's 'third space' cultures. *Journal of Leisure Research*, 30(1), 121–156.
- Hotta, J., & Ting-Toomey, S. (2013). Intercultural adjustment and friendship dialectics in international students: a qualitative study. *International Journal of Intercultural Relations*, 37(5), 550–566.
- Humphries, P. (2020). Critical social work in Centrelink: An oxymoron or an opportunity? In *Doing Critical Social Work* (pp. 150–162). Routledge.
- Isri, S. (2015). Konsep Pendidikan Jerman dan Australia; Kajian Komparatif dan Aplikatif terhadap Mutu Pendidikan Indonesia. *Jurnal Pendidikan Islam*, 4(1), 25–47.

- Jafralie, S. N., & Zaver, A. (2019). Teaching religious education: The ethics and religious culture program as case study. 5(1).
- Junaedi, E. (2019). Inilah moderasi beragama perspektif Kemenag. *Jurnal Harmoni*, 18(2), 182–186.
- Kabir, N.A. (2016). Muslim Women in Australia, Britain and the United States: The Role of “Othering” and Biculturalism in Identity Formation, *Journal of Muslim Minority Affairs*, 36: 4, 523–539, DOI: 10.1080/13602004.2016.1257683.
- Karim, K. H. (2018). Migration, diaspora and communication. In *Diaspora and media in Europe: Migration, identity, and integration* (pp. 1–23). Palgrave Macmillan.
- Keating, J., & Klatt, M. (2013). Australian concurrent federalism and its implications for the Gonski Review. *Journal of Education Policy*, 28(4), 411–426.
- Kedutaan Besar Australian di Indonesia, “Penduduk, Kebudayaan dan Gaya Hidup”, https://indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/penduduk_kebudayaan.html. diakses 03 Maret 2024.
- Kementerian Agama, T. P. (2019). Moderasi Beragama. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Kenny, K. (2013). *Diaspora: A Very Short Introduction*. Oxford University Press.
- Kenway, J. (2013). Challenging inequality in Australian schools: Gonski and beyond. *Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education*, 34(2), 286–308.
- King, P. E. (2019). Religion and identity: The role of ideological, social, and spiritual contexts. In *Beyond the self* (pp. 197–204). Routledge.
- Komunitas Diaspora, Embassy of Indonesia to The United Kingdom. available at https://kemlu.go.id/london/en/pages/komunitas_diaspora/4182/etc-menu. Accessed on January 15, 2024.
- Maizan, Sabrina Hasyyati, Bashori, Khoiruddin, Hayati, Elli Nur. (2020). Analytical Theory: Gegar Budaya (Culture Shock). *Psycho Idea*, Tahun 18. No. 2, Agustus 2020, DOI: 10.30595/psychoidea.v18i2.6566.
- Manurung, H. (2015). *Securing Southeast Asian Regional Security: Indonesia Diaspora*. International Seminar & Conference, Semarang.
- Maritz, A., Jones, C., Foley, D., De Klerk, S., Eager, B., & Nguyen, Q. (2021). Entrepreneurship education in Australia. In *Annals of entrepreneurship education and pedagogy–2021* (pp. 208–226). Edward Elgar Publishing.
- Marranci, G. (2008). *The Anthropology of Islam*. Berg Publisher.
- McCallum, J. (2023). *Australia’s new aged: Issues for young and old*. Routledge.
- Misra, R. & Castillo, L. G. (2004). Academic stress among college students: Comparison of American and international students. *International Journal of Stress Management*, 11, 132–148.
- Modood, T. (2019). *Essays on secularism and multiculturalism*. ECPR Press.
- Modood, Tariq (2006) *Multicultural politics: racism, ethnicity and Muslim in Britain*, Edinburgh, UK: Edinburgh University Press.
- Molla, T., & Nolan, A. (2019). The ‘universal access to early childhood education’ agenda in Australia: Rationales and instruments. *Educational Research for Policy and Practice*, 18, 1–16.
- Moreno, O., Ortiz, M., Fuentes, L., Garcia, D., & Leon-Perez, G. (2020). Vaya con Dios: The influence of religious constructs on stressors around the migration process and US lived experiences among Latina/o immigrants. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(11), 3961.
- Mori, S. (2000). Addressing the mental health concerns of international students. *Journal of Counseling and Development*, 78, 137–144.
- Muhidin, S. (2024). Interview. Indonesian Diaspora Network, Sydney, 1(12).

- Muhidin, S., & Utomo, A. (2015). Global Indonesian Diaspora: How many are there and where are they? *Journal of ASEAN Studies*, 3(2), 93–101.
- Muttaqin, A., Arifin, A. Z., & Wajdi, F. (2016). Problems, Challenges and Prospects of Indonesian Muslim Community in Sydney for Promoting Tolerance. *Komunitas: International Journal of Indonesian Society and Culture*, 169–184.
- Nur, A. (2015). Konsep Wasathiyah Dalam Al-Quran (Studi Komparatif antara Tafsir al-Tahrir wa at-Tanwir dan Aisar at-Tafasir). *Jurnal An-Nur*, 4(2), 205–225.
- Nurkholis, A. (2017). Merajut Damai dalam Kebinekaan. *Elex Media Komputindo*.
- O’Flynn, J., Vardon, S., Yeatman, A., & Carson, L. (2011). Perspectives on the capacity of the Australian public service and effective policy development and implementation. *Australian Journal of Public Administration*, 70(3), 309–317.
- Obadare, E. (2002). Book Review: Community and Civil Society, by Ferdinand Tonnies. *Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations*, 13(4), 441.
- Ogawa, M. (2007). Overseas Students Protection Law in Australia: Universities, the ESOS Act, and the National Code. *Statute Law Review*, 28(1), 73–81.
- Oldmeadow, H. (2010). Rudolf Otto, the East and Religious Inclusivism. In *Religion and Retributive Logic* (pp. 224–239). Brill.
- Pantelidou, S., Craig, T. (2006). Culture shock and social support. *Soc Psychiat Epidemiol* 41, 777–781 DOI://doi.org/10.1007/s00127-006-0096-5.
- Parsons, T. (2010). *Social Structure and Personality*. Simon and Schuster.
- Pe-Pua, R., Gendera, S., Katz, I., and O’Connor, A. (2010). Meeting the Needs of Australian Muslim Families: Exploring Marginalisation, Family Issues and ‘Best Practice’ in Service Provision, Australia: Social Policy Research Centre University of New South Wales.
- Pedersen, A. (1995). *The Five Stages of Culture Shock*. Connecticut: Greenwood Press.
- Peek, L. (2005). Becoming Muslim: The development of a religious identity. *Sociology of Religion*, 66(3), 215–242.
- Pimpinan Cabang Muhammadiyah Australia, sumber <https://www.pcim-australia.org.au/about-us/>. Diakses 06 November 2024.
- Poole, Elizabeth (2002), *Reporting Islam: media representations of British Muslims*, London: I.B Tauris.
- Randell-Moon, H. (2013). The secular contract: Sovereignty, secularism and law in Australia. *Social Semiotics*, 23(3), 352–367.
- Reis, M. (2004). Theorizing diaspora: Perspectives on “classical” and “contemporary” diaspora. *International Migration*, 42(2), 41–60.
- Rohman, I. (2024). Interview. Ketua PCI Muhammadiyah Australia, Sydney, 18(11).
- Romdiati, H. (2015). Globalisasi migrasi dan peran diaspora: Suatu kajian pustaka. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 10(2), 89–100.
- Saasa, S. K. (2019). Discrimination, coping, and social exclusion among African immigrants in the United States: A moderation analysis. *Social Work*, 64(3), 198–206.
- Saeed, Abdullah, *Muslim Australians: Their Beliefs, Practices, and Institutions*, Australia: Department of Immigration and Multicultural and Indigenous Affairs, Australian Multicultural Foundation, and the University of Melbourne, 2004.
- Saeed, Amir (2007), ‘Media, racism and Islamophobia: the representation of Islam and Muslims in the media, *Sociology Compass* 1/2 (2007): 443–462, 10.1111/j.1751-9020.2007.00039.x.
- Safran, W. (1991). Diasporas in modern societies: Myths of homeland and return. *Diaspora: A Journal of Transnational Studies*, 1(1), 83–99.
- Santoso, I. (2014). *Diaspora, globalisasi, keamanan, dan keimigrasian*. Pustaka Reka Cipta.

- Sari, A. A. P. (2021). Penerapan Nilai-nilai Moderasi Beragama pada Pendidikan Anak Usia Dini Melalui Pendidikan Agama Islam [Thesis]. IAIN Bengkulu.
- Seeber, M., Cattaneo, M., Huisman, J., & Paleari, S. (2016). Why higher education institutions internationalize? An investigation of the multilevel determinants of internationalization rationales. *Higher Education*, 1–18.
- Setianto, Y.P. (2015). “Mediatization of Religion: How the Indonesian Muslim Diasporas Mediatized Islamic Practices,” *Journal of Media and Religion* 14, No. 4, 230–44. doi.org/10.1080/15348423.2015.1116268.
- Shihab, M. Q. (2017). *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudu'i atas Berbagai Persoalan Umat*. Mizan.
- Siregar, M. A. A. (2016). Studi Perbandingan Diplomasi Publik Diaspora Turki dengan Diaspora Indonesia sebagai Pendukung Pertahanan Nirmiliter Indonesia [Thesis]. Universitas Pertahanan.
- Smith, R. A., & Khawaja, N. G. (2011). A review of the acculturation experiences of international students. *International Journal of Intercultural Relations*, 35(6), 699–713. doi: 10.1016/j.ijintrel.2011.08.004.
- Srimulyani, E. (2021). Indonesian Muslim Diaspora in Contemporary South Korea: Living as Religious Minority Group in Non-Muslim Country, Samarah: *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2. DOI: http://dx.doi.org/10.22373/sjkh.v5i2.9733.
- Subhi, M. (2019). Modul Training of Trainer untuk Auditor Promosi Toleransi dan Moderasi Beragama. Pustaka Masyarakat Setara.
- Supartono. (2004). *Ilmu Budaya Dasar*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Syafrudin, U. (2009). *Paradigma Tafsir Tekstual dan Kontekstual: Usaha Memaknai Kembali Pesan Alquran*. Pustaka Pelajar.
- Syaifuddin, A. F. (2006). Membumikan multikulturalisme di Indonesia. *ETNOVISI: Jurnal Antropologi Sosial Budaya*, 2(1), 3–10.
- Syed, J., & Kramar, R. (2009). What is the Australian model for managing cultural diversity? *Personnel Review*, 39(1), 96–115.
- Taher, F. (2014). Religious Transnationalism and Identity: A Cultural Approach to the Concept of the ‘Ummah’ in Islam. *The International Journal of Critical Cultural Studies*, 12(2), 1.
- Tan, S.-A., & Liu, S. (2014). Ethnic visibility and preferred acculturation orientations of international students. *International Journal of Intercultural Relations*, 39, 183–187.
- Taufiq, F., & Alkholid, A. M. (2021). Peran Kementerian Agama dalam mempromosikan moderasi beragama di era digital. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 41(2), 134–147.
- Tönnies, F. (2001). *Community and Civil Society*. Cambridge University Press.
- Turner, B. S. (2020). Religion, State and Civil Society: Nation-Building in Australia. In *Church-state Relations* (pp. 233–251). Routledge.
- Turner, B. S., & Nasir, K. M. (2016). Islam, diaspora, and multiculturalism. In *The Sociology of Islam* (pp. 255–272). Routledge.
- Umami, F. (2013). Pluralisme dalam Al-Qur'an (Telaah Pemikiran Abdul Muqsih Ghazali dan Ali Mustafa Ya'qub terhadap Ayat-ayat Pluralistik) [Thesis]. UIN Sunan Ampel.
- Vertonec, Steven (2002), ‘Islamophobia and Muslim Recognition in Britain’, in Haddad, Yvonne Yazbeck (ed), *Muslim in the West: from sojourners to citizens*, Oxford: Oxford University Press.
- Vertovec, S. (2013). Introduction: New directions in the anthropology of migration and multiculturalism. In *Anthropology of migration and multiculturalism* (pp. 1–17). Routledge.
- Vertovec, S. (2023). *Superdiversity: Migration and social complexity*. Taylor & Francis.

- Vogl, A., Hoang, K., & Hirsch, A. (2020). Private humanitarian sponsorship: Searching for the community in Australia's community refugee sponsorship program. *Strangers to Neighbours: Refugee Sponsorship in Context*, 264–285.
- Ward, C. (1996). Acculturation. In D. Landis, & R. Bhagat (Eds.), *Handbook of intercultural training* (2nd ed., pp. 124–147). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Ward, C., & Searle, W. (1991). The impact of value discrepancies and cultural identity on psychological and sociocultural adjustment of sojourners. *International Journal of Intercultural Relations*, 15(2), 209–224.
- Ward, C., Bochner, S., & Furnham, A. (2001). *The Psychology of Culture Shock*. Philadelphia: Routledge.
- Wardana, A. (2013). 'Living in-between': the multiple integration trajectories of the London Indonesian Muslim immigrants, UK: University of Essex.
- Wardana, A. (2013). Institutionalising Diasporic Islam: Multiculturalism, Secularism And The Integration Of Muslim Immigrants In Britain, *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, Vol. 3, Issues 2: 31-72.
- Wardana, A. (2014). Encountering Muslim 'Others': Indonesians in the Muslim Diaspora of London, *Komunitas: International Journal of Indonesian Society and Culture*, Volume 6, Issues 2: 197-211.
- Weeks, Douglas (2020), *Al-Muhajiroun: a case study in contemporary Islam activism*, Switzerland: Palgrave Macmillan.
- Wijarwadi, W. (2024). Interview. Wakil Ketua PCINU Australia Dan Ketua Pengajian Kaifa NU Sydney, 13(11).
- Wulan, N. S., & Fajrussalam, H. (2022). Pengaruh literasi membaca terhadap pemahaman moderasi beragama mahasiswa PGSD. *Jurnal Basicedu*, 6(1), 372–385.
- Yasid, A. (2020). *Membangun Islam Tengah*. Pustaka Pesantren.
- Yusiputra, G.A. & Umar, T.M. (2023). Akulturasi Budaya pada Mahasiswa Diaspora, Bandung Conference Series: Public Relations, Vol. 3 No. 2: 468-477. DOI: <https://doi.org/10.29313/bcspr.v3i2.7704>.
- Zamimah, I. (2018). Moderatisme islam dalam konteks keindonesiaan. *Jurnal Al-Fanar*, 1(1), 75–90.
- Zhou, Y., Jindal-Snape, D., Topping, K., & Todman, J. (2008). Theoretical models of culture shock and adaptation in international students in higher education. *Studies in Higher Education*, 33(1), 63–75.